

menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap ERC. Nurlela dan Islahuddin (2008) juga tidak menemukan pengaruh CSR dengan nilai perusahaan.

Kinerja keuangan mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dan nilai pasar. Kinerja keuangan umumnya terdiri dari profitabilitas dan ukuran perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Terdapat beberapa cara dalam mengukur Profitabilitas perusahaan diantaranya dengan menggunakan ROA (Return on Assets), REO (Return on Equity), NPM (Net Profit Margin) dan yang lainnya. Sedangkan ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah assets, modal, penjualan dan yang lainnya.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, serta merupakan ukuran penting untuk menilai sehat tidaknya perusahaan yang akhirnya akan mempengaruhi investor membuat keputusan penanaman modal atau tidak. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan. Jika perusahaan memiliki assets yang besar, berarti manajemen memiliki keleluasaan untuk mengelola assets yang ada di perusahaan tersebut. Jumlah assets yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dilihat dari aspek pemilik perusahaan, akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan (Grier, 2004).

*Signaling Theory* membahas bagaimana sebaiknya sinyal-sinyal keberhasilan harus disampaikan. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai inisiatif dan motivasi untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal (Tearney, 2000). Motivasi perusahaan untuk memberikan informasi tersebut disebabkan adanya asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal. Asimetri informasi terjadi apabila manajemen mengetahui lebih banyak informasi serta prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan pihak eksternal (Wolk *et al*, 2001).

Kurangnya informasi perusahaan yang dimiliki pihak eksternal menyebabkan menurunnya reputasi perusahaan sehingga memberikan nilai yang rendah untuk perusahaan. Untuk memperkecil asimetri informasi, perusahaan harus mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal baik berupa informasi keuangan maupun non keuangan sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan di masa akan datang.

Salah satu informasi yang wajib untuk diungkapkan oleh perusahaan saat ini adalah

informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* baik yang dimuat dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*) atau laporan sosial terpisah (*sustainability report*). Dengan demikian, perusahaan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk meningkatkan nilai perusahaan (Utomo, 2000).

## METODE

Penelitian ini merupakan tipe penelitian penjelas atau *ekplanatory research*, karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *sekunder*. Data *sekunder* yang digunakan dalam penelitian ini berupa luas pengungkapan CSR, laba, aktiva, equity dan harga pasar saham pada saat penutupan (*closing price*). Data diperoleh dengan mengakses situs resmi BEI yakni [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur lebih banyak mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitarnya (Kamil dan Antonius: 2012). Selain itu alasan lain peneliti menggunakan perusahaan manufaktur adalah mayoritas perusahaan-perusahaan yang *go public* di BEI merupakan jenis perusahaan manufaktur, jenis perusahaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya biasanya telah diatur dengan regulasi tertentu.

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria: 1). Perusahaan manufaktur terdaftar berturut-turut selama periode pengamatan, 2) Perusahaan memperoleh laba selama periode pengamatan, 3) Perusahaan menggunakan satuan mata uang rupiah dalam pelaporan dan 4) Peneliti dapat menemukan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 53 perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini.

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q yang dikembangkan oleh Chung dan Pruitt(1994) dan disesuaikan dengan kondisi transaksi keuangan perusahaan di Indonesia. Rumus perhitungan nilai perusahaan dengan Tobin's Q disajikan pada persamaan 1:

$$Q = \frac{MVE}{DEBT} \dots\dots\dots(1)$$

Notasi :  
Q : Nilai perusahaan

DEBT : Nilai total kewajiban perusahaan  
TA : Nilai buku dari total aktiva perusahaan

MVE : Nilai pasar ekuitas (*Equity Market Value*), merupakan hasil perkalian dari harga saham penutupan (*closing price*) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun.

Variabel independen penelitian ini adalah luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Variabel pengungkapan sosial perusahaan diukur dengan metode *content analysis*. *Content analysis* dapat dilakukan salah satunya dengan cara *checklist*, yang dilakukan dengan melihat pengungkapan sosial perusahaan dalam 7 kategori (Fahrizqi, 2010). Menurut Sembiring (2005), pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat terdiri dari tujuh kategori dengan total 78 item pengungkapan yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tentang tenaga kerja, produk,

keterlibatan masyarakat, umum. Item pengungkapan dalam penelitian ini kemudian dinyatakan dalam bentuk indeks pengungkapan sosial.

Penghitungan luas pengungkapan CSR dilakukan dengan cara *checklist*. *Checklist* dilakukan dengan cara menyusun daftar item pengungkapan CSR sesuai dengan tiap kategori, kemudian memberi tanda (✓) apabila perusahaan yang menjadi sampel melakukan item pengungkapan yang bersangkutan. Pada perusahaan manufaktur terdapat 78 item

pengungkapan CSR, sehingga penghitungan luas pengungkapan CSR disajikan pada persamaan 2.

$$\text{Luas Pengungkapan CSR} = \frac{\text{Jumlah skor yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor yang diharapkan}} \quad 2$$

Variabel independen kinerja keuangan dalam penelitian ini terdiri dari Profitabilitas dan ukuran perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rasio *Return On Total Equity* (ROE). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total equity}} \quad 3$$

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Menurut Heckston dan Milne (1996) dari beberapa penelitian, ukuran perusahaan dapat diukur dengan jumlah karyawan, total nilai aset, volume penjualan, atau peringkat indeks. *Size* perusahaan yang diukur dengan total aset akan

ditransformasikan dalam logaritma untuk menyamakan dengan variabel lain karena total aset perusahaan nilainya relatif besar dibandingkan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Metode pengukuran ini berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu, Machmud dan Djakman (2008).

$$\text{SIZE} = \log (\text{total asset}) \quad 4$$

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 19.0. Sebelum melakukan uji linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hubungan antar variabel disajikan pada persamaan:

Analisis Regresi Linear Berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,...Xn) dengan

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 \dots \dots \dots \quad 5$$

Keterangan:

- Y = Nilai Perusahaan
- X1 = Luas Pengungkapan CSR
- X2 = Profitabilitas
- X3 = Ukuran Perusahaan
- $\alpha$  = Konstanta  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  dan  $\beta_3$  Koefision Regresi

**Uji T-Test.**

Uji signifikansi t digunakan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individu menjelaskan variabel dependen, Untuk memutuskan menerima atau menolak suatu hipotesis pada uji t, yaitu apabila nilai t hitung (*residual value*) > t table, dimana angka tingkat

kepercayaan  $\alpha=5\%$  maka  $H_0$  ditolak begitu juga sebaliknya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Hasil analisis regresi*

**Tabel 1**

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .082 <sup>a</sup> | .707     | .704              | 2,92275                    |

Predictors: (Constant), Size, PROFIT, CSR

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa besarnya adjusted R<sup>2</sup> adalah 0,704, hal ini berarti 70,7% variasi Nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu luas pengungkapan CSR, profitabilitas dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya 29,3% dijelaskan oleh sebab yang lain di luar model.

Tabel 2

ANOVA<sup>b</sup>

| Model        | Sum of Squares | Df  | Mean Square | F       | Sig.              |
|--------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1 Regression | 1554,646       | 3   | 518,215     | 106,607 | .000 <sup>a</sup> |
| Residual     | 227230,321     | 266 | 854,249     |         |                   |

|       |            |     |  |  |  |
|-------|------------|-----|--|--|--|
| Total | 228784,967 | 269 |  |  |  |
|-------|------------|-----|--|--|--|

a. Predictors: (Constant), Size, PROFIT, CSR

b. Dependent Variable: NILAI

Data tabel 2 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 106,607 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Nilai Perusahaan atau dapat dikatakan bahwa luas pengungkapan CSR, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Tabel 3  
Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | 2,775                       | 32,317     |                           | 3,799 | ,000 |
|       | CSR        | ,139                        | ,121       | ,072                      | 1,147 | ,002 |
|       | PROFIT     | ,006                        | ,014       | ,024                      | ,393  | ,005 |
|       | SIZE       | ,007                        | ,017       | ,023                      | ,368  | ,003 |

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan

Data tabel 3 menunjukkan dari ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi yang terdiri dari luas pengungkapan CSR, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan, semua variabel signifikan pada 0,05. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig semua variabel bebas berada dibawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Nilai Perusahaan di pengaruhi oleh Luas pengungkapan CSR, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan dengan persamaan matematis:

$$\text{Nilai Perusahaan} = 2,775 + 0,139 \text{ CSR} + 0,006 \text{ Profit} + 0,007 \text{ Size} \dots\dots\dots 6$$

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Luas Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin

luas pengungkapan CSR, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Semakin banyak kegiatan CSR yang diungkapkan, maka semakin tinggi nilai pasar saham perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan sinyal yang positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya (Ambarwati dan Hikmah, 2013). Sinyal positif ini diwujudkan dengan memperluas pengungkapan CSR nya. Meningkatnya pengungkapan kegiatan CSR merupakan salah satu sinyal bahwa perusahaan sedang memiliki pendanaan yang optimal sehingga memotivasi calon investor membeli saham suatu perusahaan. Meningkatnya permintaan atas saham akan mendorong peningkatan harga pasar saham atau nilai perusahaan. Hasil ini mendukung teori sinyal yang menyatakan bahwa perusahaan akan termotivasi untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal sebagai salah satu upaya meningkatkan nilai perusahaannya (Tearny, 2000), selain itu hasil penelitian ini sejalan

dengan temuan Utomo (2000) yang menemukan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk meningkatkan nilai perusahaan.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari ekuitas yakni merupakan hasil perkalian antara harga pasar saham saat penutupan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi dapat diartikan bahwa semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula harga saham dan jumlah lembar saham yang terjual. Tingginya profitabilitas menunjukkan kinerja manajemen yang bagus, sehingga mendorong minat investor untuk menginvestasikan dananya.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya jumlah assets yang dimiliki perusahaan. Jumlah assets yang besar menunjukkan kemudahan manajemen dalam mengendalikan perusahaan sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan (Gray, 2005)

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa luas pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan berhasil didukung oleh data yang artinya bahwa semakin luas pengungkapan CSR

yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan berhasil didukung oleh data, ini berarti bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka semakin tinggi juga nilai perusahaannya.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, juga didukung oleh data. Artinya semakin besar ukuran perusahaan atau semakin tinggi nilai assets perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian bahwa luas pengungkapan CSR, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, maka disarankan kepada perusahaan manufaktur untuk memberikan perhatian kepada ketiga hal tersebut, agar nilai perusahaan meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fahrizqi, A., 2010, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Laporan Tahunan Perusahaan, *Tesis Pascasarjana FE Undip*, Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Gray, R. 2005. Taking a long view on what we now know about social and environmental accountability and reporting", *Electronic Journal of Radical Organisation Theory*, 9, 1-31
- Husnan, Suad. 2004. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPF.

- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Solo.
- Sunarto. 2001. *Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Leverage terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur Di BEJ*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi
- Zahra, S. A., Priem, R. L. and Rasheed, A. A. (2005) The antecedents and consequences of top management fraud, *Journal of Management*, 31: 803-28.

# KAJIAN TENTANG FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN USAHA PRODUK UNGGULAN LOKAL SULAM DAN BORDIR KABUPATEN MALANG

Tin Agustina Karnawati<sup>1</sup>, Fathorrahman<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen STIE ASIA Malang  
Email : tien.agustin\_k@yahoo.com

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to know the influence of internal and external factors in the development of local featured products-based SMEs, especially on the group of embroidery artisans (PERSADIR) in Malang. The research method is by survey approach, quantitative analysis, qualitative descriptive and the collection of data is done through questionnaires, open-ended interviews and also completed with a Focus Group Discussion (FGD). The research found that internal factors which include enterprise capital, business networks, quality of human resources, technology and equipment, promotion of products, marketing online, access to information, financial management, product innovation, brand and packaging as well as raw materials have significant effect to the business development of embroidery artisans in Malang. The external factors which include licensing procedures, licensing fees, the policy of empowerment, founding of government, strategic location support, facility and business equipment support and loan submission procedures have significant effect to the business development of embroidery artisans in Malang. FGD's result found that the common problems in the development of the embroidery artisans enterprise are the lack of capital, human resources quality, lack of access to information and markets, as well as the lack of managerial knowledge in business management.*

**Keywords :** local featured products, internal factors, external factors, enterprise development

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pengembangan usaha UMKM berbasis produk unggulan lokal khususnya pada kelompok perajin sulam dan bordir (PERSADIR) di Kabupaten Malang. Metode penelitian dengan pendekatan survei, analisis kuantitatif, deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara terbuka serta dilengkapi Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menemukan bahwa faktor internal yang meliputi modal usaha, jaringan usaha, kualitas SDM, teknologi dan peralatan, promosi produk, marketing online, akses informasi, pengelolaan keuangan, inovasi produk, merek dan kemasan serta bahan baku ditemukan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha perajin sulam dan border di Kabupaten Malang. Faktor eksternal yang meliputi prosedur perijinan, biaya perijinan, kebijakan pemberdayaan, pembinaan dari pemerintah, dukungan sarana lokasi strategis, bantuan fasilitas dan peralatan usaha, serta prosedur pengajuan pinjaman berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha perajin sulam dan bordir di Kabupaten Malang. Dari hasil FGD diketahui permasalahan umum dalam pengembangan usaha diantaranya adalah kurangnya modal usaha, kualitas SDM, kurangnya akses informasi dan pemasaran, serta rendahnya pengetahuan manajerial dalam pengelolaan usaha.

**Kata Kunci :** produk unggulan lokal, faktor internal, faktor eksternal, pengembangan usaha.

## PENDAHULUAN

Potensi sumber daya alam bagi masing-masing daerah dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Potensi sumber daya lokal pada umumnya dikembangkan oleh para pelaku usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM) yang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta menumbuhkan aktivitas perekonomian di daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang yang mempunyai beberapa produk unggulan lokal

dan diperlukan suatu strategi pengembangan usaha yang mencakup keseluruhan aspek baik faktor internal maupun eksternal, yang menjadi penentu keberhasilan ataupun sebaliknya menjadi kendala usaha.

Beberapa penelitian dan studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dijadikan acuan atau rujukan untuk dikembangkan dalam penelitian ini. Hidayati (2008) menyatakan bahwa survey dari BPS mengidentifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan prioritasnya, yaitu meliputi (a) kurangnya permodalan (b) kesulitan dalam pemasaran (c) persaingan usaha yang ketat

kesulitan bahan baku (e) kurangnya teknis produksi dan keahlian (f) kurang keterampilan manajerial (SDM) dan (g) kurang pengetahuan dalam masalah manajemen khususnya bidang keuangan dan akuntansi (Hidayati, 2009 : 184).

Purwaningsih dan Kusuma (2015: 12) menemukan bahwa faktor eksternal yang meliputi aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi, aspek peranan lembaga terkait dan faktor internal yang meliputi aspek SDM, aspek keuangan, aspek teknis produksi dan operasi, aspek pasar dan pemasaran dapat memberi pengaruh yang cukup besar pada peningkatan kinerja yang diukur dengan volume penjualan, pertumbuhan tenaga kerja dan pemasaran pada UKM. Faktor eksternal dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan UKM melalui program-program pelatihan maupun akses informasi yang lebih memberi kemudahan pengelolaan terutama dalam mendapatkan permodalan. Dan pada faktor internal kualitas SDM yang terampil serta proses produksi yang berfokus pada target akan meningkatkan kinerja UKM berbasis industri kreatif kota Semarang.

Taufik dan Hartono (2011:12) menemukan bahwa Model sentra klastering dengan pola pembinaan yang tepat dan komprehensif bagi UKM adalah dengan pembinaan terpadu atau kolaboratif antara UKM, pemerintah, pasar tradisional dan pasar modern yang mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas UKM untuk menjadi *leading sector* pengentasan kemiskinan di Lumajang.

Munizu (2010:40) menemukan bahwa faktor-faktor eksternal yang terdiri atas aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial

budaya dan ekonomi, dan aspek peranan lembaga terkait mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja usaha mikro dan kecil (UMK). Faktor-faktor internal yang terdiri atas aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek teknik produksi/operasional, dan aspek pasar dan pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja usaha mikro dan kecil (UMK).

Penelitian Sumatri dkk. (2013 : 252) menemukan bahwa pendidikan, pelatihan, usia, asal etnis, dan latar belakang keluarga berhubungan dengan pendapatan; sedangkan pengalaman bisnis berhubungan dengan volume penjualan; dan pendidikan, pelatihan, usia, dan pengalaman bisnis berhubungan dengan perluasan wilayah pemasaran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kinerja usaha dipengaruhi oleh karakteristik personal, kewirausahaan, lingkungan internal, dan lingkungan eksternal, di mana karakteristik personal wirausaha wanita pada industri pangan rumahan di Bogor adalah variabel yang paling penting yang mempengaruhi kinerja usaha wirausaha wanita.

Rukmantara (2011:6) menemukan bahwa lingkungan internal usaha kecil yang terdiri dari modal, pemasaran, SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil. Lingkungan eksternal usaha kecil yang terdiri dari akses modal dan kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil di kota Medan.

Purwidianti dan Rahayu (2015: 156-157) menemukan bahwa faktor internal yang meliputi nilai kewirausahaan dan aspek teknis dan operasi tidak berpengaruh, sedangkan strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja usaha IKM di kecamatan Purwokerto Utara. Faktor eksternal yang meliputi aspek perekonomian, aspek kebijakan pemerintah dan aspek peranan lembaga terkait tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha IKM di kecamatan Purwokerto Utara.

Menurut Haeruman (dalam Taufik Mukhamad dan Hartono, 2011:5) tantangan bagi dunia usaha, terutama pengembangan UKM mencakup aspek yang luas antara lain

Peningkatan kualitas SDM dalam hal manajemen, (b) organisasi dan teknologi, (c) kompetensi kewirausahaan, (d) Akses yang

lebih luas terhadap permodalan, (e) Informasi pasar yang transparan, (f) Faktor input produksi lainnya, dan (g) Iklim usaha yang sehat yang mendukung inovasi, kewirausahaan dan praktek bisnis serta persaingan yang sehat.

Berbagai hasil penelitian yang terdahulu dapat menjadi dasar perbandingan dalam penelitian ini yang bertujuan : (1) bagaimana karakteristik dan profil usaha perajin sulam dan bordir anggota Persadir di Kabupaten Malang (2) mengetahui bagaimana pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pengembangan usaha produk unggulan lokal sulam dan bordir di Kabupaten Malang. (3) Permasalahan apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha para perajin sulam dan bordir Kabupaten Malang.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan desain riset kausal mengarah pada terjadinya hubungan sebab akibat antara faktor internal dan faktor eksternal terhadap pengembangan usaha para pengrajin sulam dan bordir (Persadir) di Kabupaten Malang. Jenis data kuantitatif diperoleh dengan menganalisis hasil penyebaran kuesioner kepada 30 orang responden pengrajin sulam dan bordir anggota Persadir pada batasan waktu penelitian dilakukan. Pengukuran variable penelitian berdasarkan pada persepsi atau tanggapan responden terhadap seluruh indikator variable yang telah dikonstruksi pada model (Sugiyono,2003). Jawaban responden terhadap setiap pernyataan diberi skoring menurut Skala Likert, yakni dengan skor 1 untuk nilai paling rendah dan skor 5 untuk nilai paling tinggi. Skala yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala likert dengan sebuah pernyataan yang diberikan jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Variabel dalam penelitian ini meliputi faktor internal yang terdiri dari 11 indikator yaitu modal usaha, jaringan usaha, kualitas SDM, teknologi dan peralatan, promosi produk, marketing online, akses informasi, pengelolaan keuangan, inovasi produk, merek dan kemasan serta bahan baku. Faktor eksternal diukur dengan 7

indikator yaitu prosedur perijinan, biaya perijinan, kebijakan pemberdayaan, pembinaan dari pemerintah, dukungan sarana lokasi strategis, bantuan fasilitas dan peralatan usaha serta prosedur pengajuan pinjaman. Sedangkan pengembangan usaha dapat diukur dengan 4 indikator yaitu peningkatan pendapatan usaha, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan kualitas produk dan peningkatan kualitas SDM.

Pengujian validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kehandalan dan kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid dan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2012:255).

Hasil pengujian validitas dapat dibandingkan dengan nilai r table nya yaitu 0,3610. Nilai r table diperoleh dari table r statistic dengan acuan nilai  $n = 30$  ,  $df = n-2$

28 dengan nilai  $\alpha = 0,05$ . Uji validitas dapat disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas Faktor Eksternal**

| No. Indikator | r hitung | Keterangan |
|---------------|----------|------------|
| 1. X1.1       | 0,846    | Valid      |
| 2. X1.2       | 0,563    | Valid      |
| 3. X1.3       | 0,383    | Valid      |
| 4. X1.4       | 0,475    | Valid      |
| 5. X1.5       | 0,393    | Valid      |
| 6. X1.6       | 0,816    | Valid      |
| 7. X1.7       | 0,545    | Valid      |

Sumber : data primer diolah, 2016

Dari paparan table 1 menunjukkan bahwa semua item atau indikator dalam faktor eksternal memiliki nilai  $> 0,3610$  sehingga dapat dinyatakan semua instrumen pengukur faktor eksternal adalah valid.

**Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas Faktor Internal**

| No. Indikator | r hitung | Keterangan |
|---------------|----------|------------|
| 1. X2.1       | 0,434    | Valid      |
| 2. X2.2       | 0,485    | Valid      |
| 3. X2.3       | 0,515    | Valid      |
| 4. X2.4       | 0,671    | Valid      |
| 5. X2.5       | 0,390    | Valid      |
| 6. X2.6       | 0,471    | Valid      |
| 7. X2.7       | 0,629    | Valid      |
| 8. X2.8       | 0,636    | Valid      |
| 9. X2.9       | 0,629    | Valid      |
| 10.X2.10      | 0,602    | Valid      |

11.X2.11            0,671            Valid

Sumber : data primer diolah, 2016

Dari paparan table 2 menunjukkan bahwa semua item atau indikator dalam faktor internal memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{table}$ , dimana,  $r_{table} = 0,3610$  sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen pengukur faktor internal adalah valid.

**Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas Pengembangan usaha**

| No. Indikator | r hitung | Keterangan |
|---------------|----------|------------|
| 1. Y1.1       | 0,845    | Valid      |
| 2. Y1.2       | 0,757    | Valid      |
| 3. Y1.3       | 0,461    | Valid      |
| 4. Y1.4       | 0,814    | Valid      |

Sumber : data primer diolah, 2016

Dari paparan table 3 menunjukkan bahwa semua item atau indikator dalam variable pengembangan usaha memiliki nilai  $> 0,3610$  sehingga dapat dinyatakan semua instrumen pengukurnya adalah valid.

Pengujian reliabilitas menggunakan menggunakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan dapat dilakukan dengan acuan model  $alpha\ cronbach \geq 0,6$  (Arikunto, 2006:109).

**Tabel 4. Hasil Pengujian Reliabilitas**

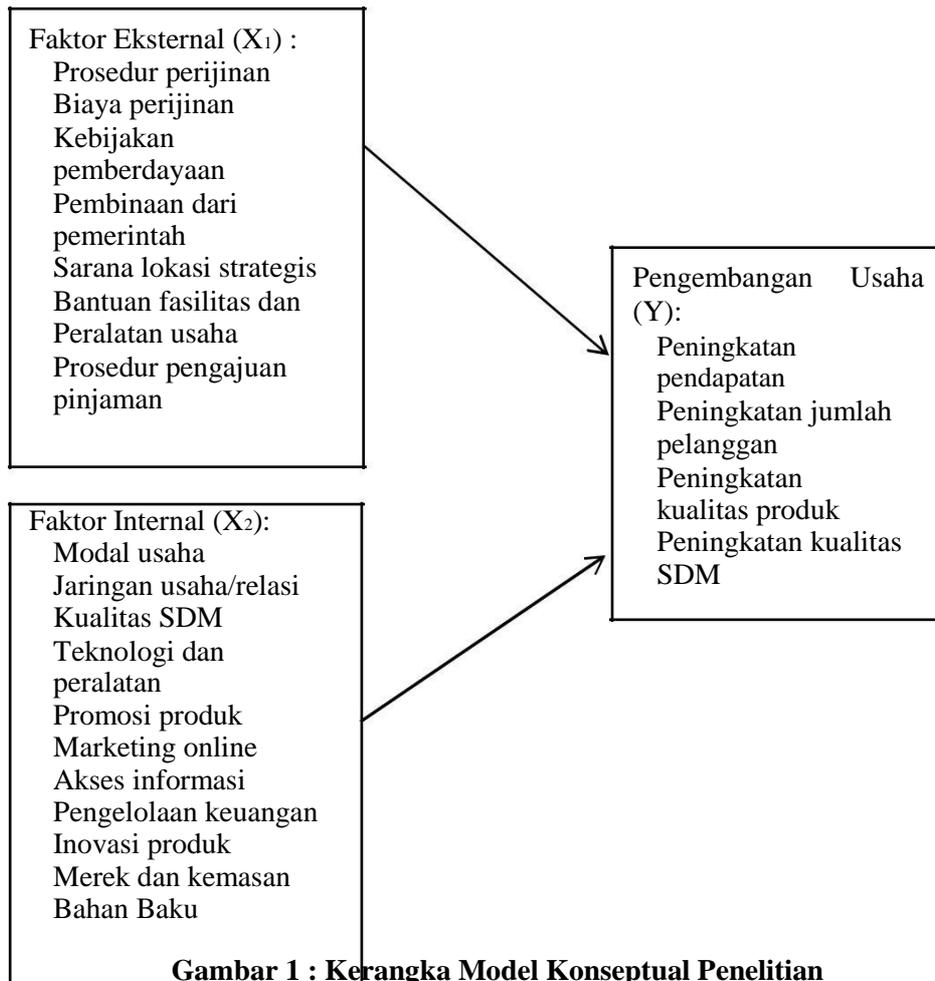
**Instrumen Penelitian**

| No. Instrumen         | Alpha Cronbach | Ket.     |
|-----------------------|----------------|----------|
| 1. Faktor Eksternal   | 0,676          | Reliabel |
| 2. Faktor Internal    | 0,775          | Reliabel |
| 3. Pengembangan Usaha | 0,696          | Reliabel |

Sumber : data primer diolah, 2016

Berdasarkan table 4 dapat diketahui bahwa dari instrument-instrumen penelitian didapatkan nilai *cronbach alpha* pada semua variable lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian variable faktor eksternal, faktor internal dan pengembangan usaha dapat dikatakan handal (*reliable*) untuk digunakan sebagai alat ukur.

Pada gambar 1 berikut dapat diperjelas mengenai kerangka konseptual model penelitian, dengan menggunakan 2 (dua) variable independen yaitu Faktor Eksternal (X1) dan Faktor Internal (X2) serta 1 (satu) variable Y Pengembangan Usaha.



**Gambar 1 : Kerangka Model Konseptual Penelitian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa responden sejumlah 30 orang semuanya berjenis kelamin perempuan, hal ini dapat dipahami karena sebagian besar responden juga berstatus sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan usaha ini sebagai usaha pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya namun ada juga yang hanya sebagai hobi dan pengisi waktu luangnya. Tingkat pendidikan responden dominan berada pada tingkat SMP yakni sebanyak 10 orang (33%), sisanya berada pada tingkat SMA sebanyak 8 orang (27%), Diploma sebanyak 6 orang (20%), Sarjana/S1 sebanyak 5 orang (17%) dan SD sebanyak 1 orang (3%).

Kemudian dilihat dari segi usia, responden penelitian ini dominan berada dalam kategori usia produktif, yaitu >30-40 tahun (40%) dan >40-50 tahun (33%), sisanya berada pada usia >50-60 tahun (17%), ≤ 20 tahun (7%) dan >20-30 tahun

(3%). Selanjutnya diketahui pula bahwa umumnya responden belum cukup lama menggeluti usaha yang sekarang dikelolanya dengan kisaran pengalaman usaha > 2-4 tahun sebanyak 15 orang (50%) dan 1-2 tahun sebanyak 8 orang (27%). Sedangkan sisanya adalah responden yang menggeluti usahanya lebih dari 4-6 tahun sebanyak 4 orang (13%) dan kurang dari 1 tahun sebanyak 3 orang (10%).

Deskripsi profil usaha responden dapat ditunjukkan bahwa responden penelitian yakni para perajin sulam dan bordir yang tergabung dalam Persadir ini terdapat 19 orang (63,3%) menjalankan jenis usaha bordir dan sisanya 11 orang (36,7%) melakukan usaha pada produk sulam. Namun pada kenyataannya produk sulam dan bordir ini seringkali dimodifikasi antara keduanya bahkan juga dikombinasi dengan sentuhan rajut di bagian tepinya, misal pada produk jilbab yang dikombinasi antara sulam dan rajut, atau bordir dan rajut, mukena, souvenir dan lain-lain. Dari perijinan usaha

mayoritas perajin dalam penelitian ini belum memiliki ijin formal mengingat usaha ini masih berskala mikro, namun beberapa responden sudah memiliki surat ijin usaha seperti SKU (Surat keterangan usaha) atau SKDU (Surat keterangan domisili usaha) dari tingkat desa atau kelurahan, dengan mengurus melalui RT dan RW setempat dan kelurahan yang dirasa lebih mudah, karena di satu sisi mereka juga masih belum memiliki pendapatan usaha yang stabil atau cukup banyak karena produknya lebih cenderung memenuhi pesanan atau hanya mengandalkan pemasaran melalui beberapa event dan pameran produk karya unggulan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, metode ini mensyaratkan untuk dilakukannya uji asumsi klasik. Dengan pengujian ini diharapkan agar model regresi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bias disebut BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*). Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal yakni ditunjukkan pada uji normalitas dengan *Kosmologorof Smirnof* nilai sign. 0,200 lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Begitu juga hasil uji asumsi klasik menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinieritas karena nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. VIF = 0,516 dan *Tolerance* = 0,660. Pada grafik *scatter plots* menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar tidak beraturan maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis dengan regresi berganda yang dapat ditunjukkan pada Tabel 5 berikut :

**Tabel 5. Hasil Pengujian Regresi Berganda**

| No. Variabel        | $\beta$ | t     | Sign. |
|---------------------|---------|-------|-------|
| Constant            |         | 0,051 |       |
| 1. Faktor Eksternal | 0,542   | 2,898 | 0,007 |
| 2. Faktor Internal  | 0,453   | 2,441 | 0,021 |

Sumber: data primer diolah, 2016

Dari hasil pengolahan data ditemukan koefisien regresi pada tabel 5 yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Koefisien regresi variable bebas faktor eksternal 0,542 dengan nilai t hitung 2,898 (sign. 0,007) menunjukkan bahwa faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap pengembangan usaha. Hal ini dijelaskan dengan nilai t hitung > t tabel dan sign. > 0,05. Dari tabel t dapat diketahui bahwa nilai t tabel = 2,05183 ( pada  $df = n - k, 30 - 3 = 27$ ). Sedangkan pada koefisien regresi faktor internal 0,453 dengan nilai t hitung = 2,441 (sign. 0,021) menunjukkan bahwa faktor internal berpengaruh terhadap pengembangan usaha, yang dapat dijelaskan dengan nilai t hitung > t tabel.

Faktor eksternal dalam penelitian ini meliputi prosedur perijinan, biaya perijinan, kebijakan pemberdayaan, pembinaan dari pemerintah, dukungan sarana lokasi strategis, bantuan fasilitas dan peralatan, serta prosedur pengajuan pinjaman. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan usaha bagi pengusaha skala mikro kecil dan menengah tentunya sangat diperlukan adanya kemudahan-kemudahan dalam menjalankan bisnisnya bagi pelaku UMKM tersebut. Salah satu peraturan dalam persyaratan pengajuan pinjaman atau kredit di Perbankan adalah adanya surat keterangan usaha. Perlu adanya prosedur yang mudah dan biaya yang murah dalam pengurusan perijinan ini, sehingga para pelaku usaha khususnya perajin sulam dan bordir tidak terkendala dalam kelengkapan syarat pinjaman. Saat penelitian dilakukan mayoritas responden menyatakan belum mempunyai ijin usaha (70%) namun sebagian kecil sudah (30%). Surat ijin usaha yang dimaksud adalah SKU (Surat Keterangan Usaha) dan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha) yang sangat mudah didaftarkan ke tingkat desa. Prosesnya juga mudah melalui RT dan RW setempat dilanjutkan ke kantor kelurahan untuk mendapatkan surat tersebut. Perijinan yang mudah dan biaya yang murah ini sangat mempengaruhi pengembangan usaha perajin karena dengan adanya perijinan maka mereka dapat melakukan pinjaman untuk menambah modal usaha. Para perajin yang belum mengurus ijinnya kemungkinan masih belum mengetahui mengenai perijinan tersebut. Menurut Peraturan Presiden RI No.98 Tahun 2014 mengenai Perizinan untuk Usaha Mikro

dan Kecil dinyatakan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku UMK secara sederhana. IUMK (Izin usaha mikro dan kecil adalah tanda legalitas bagi pelaku usaha yang pada bulan Februari 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah pengurusan IUMK melalui lurah atau camat. Proses pengurusan yang mudah dengan melampirkan dokumen seperti surat pengantar RT dan RW, KTP, KK, pas foto, informasi jenis dan lokasi usaha serta mengisi kelengkapan formulir. Pengurusan ini dalam waktu cepat dan gratis tanpa biaya.

Kebijakan pemberdayaan juga merupakan penentu keberhasilan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Berbagai bentuk pemberdayaan dan dukungan pemerintah pada berbagai program pemberdayaan memang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM terutama program-program yang dapat memberi *value added* dalam pengembangan bisnis sehingga menjadi lebih *established*. Berbagai program pemberdayaan telah banyak dilakukan di Kabupaten Malang seperti PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat) mandiri pedesaan, Posdaya, P2MPP (program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai) maupun program lintas sector oleh pemerintah, swasta maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Program pemberdayaan ini dapat mengedukasi masyarakat agar dapat berperan membangun ekonomi desa dengan potensi masing-masing. Kebijakan pemberdayaan di Kabupaten Malang dalam bentuk pelatihan-pelatihan telah banyak diberikan kesempatannya pada perajin, seperti hasil penelusuran wawancara yang dilakukan peneliti menemukan bahwa para perajin sebanyak 17 orang (57%) pernah mengikuti pelatihan bordir dalam Bimbingan Teknis dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan pasar (Disperindag) terutama pada trend desain, bordir, teknik pembuatan pola, cara membordir, teknik pemilihan dan padu warna benang yang lebih berorientasi pada produksi. Sebanyak 12 orang (40%) pernah mengikuti pelatihan menjahit, 4 orang (13%) dan selain itu ada pelatihan membuat, painting, rajut dan hantaran pernah diikuti

oleh 7 orang perajin (23%) dan pelatihan marketing dan kemasan diikuti oleh 3 orang (1%) namun ada juga 5 orang (17%) yang belum pernah sama sekali ikut pelatihan.

Dalam menjalankan kegiatan pemasarannya para perajin ini sangat memerlukan suatu tempat yang dapat dengan mudah mengenalkan ke masyarakat agar dapat meningkatkan jaringan usahanya serta rasional lebih luas. Strategi pemasaran yang saat ini dilakukan hanyalah melalui pameran atau event. Salah satu usaha yang saat ini sedang diupayakan untuk menempati satu lokasi di Galery Pusat Kerajinan Kendedes Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Singosari. Bantuan dan dukungan untuk sarana tempat memajang produk hasil para perajin ini diberikan oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindag) Kabupaten Malang. Bantuan Fasilitas dan Peralatan usaha juga sangat mempengaruhi pengembangan usaha para perajin, beberapa perajin pernah mendapat bantuan peralatan seperti mesin jahit, alat-alat produksi seperti soldir untuk pelubang saat *finishing*, pemidangan (ram), jarum, dan gunting bordir. Prosedur pengajuan pinjaman atau kredit yang mudah dan tidak berbelit juga merupakan salah satu faktor yang membantu pengembangan usaha. Dari hasil diskusi pada saat FGD juga ditemukan bahwa mayoritas responden belum mamahami bagaimana prosedur dalam mengajukan pinjaman untuk tambahan modal, terutama mereka belum mengetahui persyaratan dokumen untuk kelengkapannya serta bagaimana proposal yang harus dibuat agar proses pengajuan kredit di Bank seperti untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Bank BRI atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dapat terlaksana dengan lancar.

Faktor Internal dalam penelitian ini terdiri dari modal usaha, jaringan usaha, kualitas SDM, teknologi dan peralatan, promosi produk, marketing online, akses informasi, pengelolaan keuangan, inovasi produk, merk dan kemasan serta bahan baku.

Masalah permodalan seringkali menjadi kendala dalam pengembangan usaha bagi pelaku UMKM. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha perorangan yang lebih mengandalkan pada modal pribadi yang terbatas. Pada penelitian ini ditemukan bahwa perajin anggota Persadir memperoleh modal

usaha dari modal pribadi sebanyak 16 orang (53%) sisanya 8 orang (27%) menggunakan dana pinjaman, dan 6 orang (20%) memperoleh modal dari gabungan antara modal pribadi dan pinjaman. Modal yang berasal dari dana pinjaman ini ada yang dari kredit bank dan juga lembaga keuangan lain. Modal dan pendanaan ini dapat mempengaruhi usaha perajin terutama dalam peningkatan kapasitas usahanya, bahkan untuk mengembangkan produknya agar lebih mampu bersaing. Sebagian responden yang belum tersentuh pelayanan lembaga keuangan formal seperti bank, dan mereka lebih banyak memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional dengan beban dan resiko yang cukup berat demi mempertahankan usahanya.

Jaringan usaha pada UMKM biasanya sangat terbatas karena usaha seringkali merupakan usaha keluarga dengan produk hasil yang terbatas dan terkadang kualitas masih belum terstandar. Kualitas SDM juga merupakan salah satu faktor internal yang mendukung pengembangan usaha UMKM. Kualitas SDM dapat ditentukan oleh pendidikan dan pengetahuan serta keterampilannya yang sangat mempengaruhi kemampuan kerja dari SDM tersebut. Produk sulam dan bordir adalah produk kerajinan yang memerlukan ketelatenan dan daya kreasi yang tinggi untuk menghasilkan produk yang inovatif menyesuaikan perkembangan *design up to date*. Teknologi dan peralatan dalam memproduksi sulam dan bordir juga menjadi penentu hasil produk perajin. Promosi dan pengenalan produk kepada masyarakat konsumen dengan menggunakan metode online saat ini bukan merupakan hal yang sulit dilakukan. Media social seperti facebook dan instagram yang dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Untuk melakukan akses informasi diperlukan kemampuan dalam teknologi informasi terutama dalam mempromosikan produknya. Saat ini perajin lebih banyak menggunakan event-event atau pameran-pameran yang diikuti sesuai informasi dari disperindag atau dinkop UMKM dalam rangka pameran produk unggulan. Pengelolaan keuangan usaha juga merupakan salah satu permasalahan UMKM seringkali masih terjadi pencampuran antara keuangan pribadi dengan usaha. Sehingga masih diperlukan pengetahuan

manajerial untuk berwirausaha. Serta pemberian aplikasi yang “user friendly” dalam membantu perajin untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangannya. Perlunya merek, kemasan dan juga tersedianya bahan baku yang mudah serta terjangkau untuk menjalankan usaha dengan lancar dan terus menerus.

Hasil pengujian dengan koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) yang menunjukkan kemampuan faktor eksternal dan internal secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari variable pengembangan usaha sebesar 55,9% sedangkan 44,1 % dapat dijelaskan oleh variable lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini semua berjenis kelamin perempuan, dengan tingkat pendidikan SMP dan SMA sebanyak 60% , dengan usia yang masuk kategori usia produktif antara 30 sampai 50 tahun sebesar 73%, dan telah menjalankan usahanya selama kurang lebih 2-4 tahun sebanyak 50%.

Faktor Eksternal yang meliputi prosedur perijinan, biaya perijinan, kebijakan pemberdayaan, pembinaan dari pemerintah, dukungan sarana lokasi strategis, bantuan fasilitas dan peralatan, serta prosedur pengajuan pinjaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha.

Faktor Internal yang terdiri dari modal usaha, jaringan usaha, kualitas SDM, teknologi dan peralatan, promosi produk, marketing online, akses informasi, pengelolaan keuangan, inovasi produk, merk dan kemasan serta bahan baku mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha.

Hasil penggalian informasi dengan diskusi melalui FGD ditemukan bahwa permasalahan umum yang banyak ditemui oleh para perajin sulam dan bordir (Persadir) di Kabupaten Malang adalah kurangnya modal usaha, kualitas SDM, kurangnya akses informasi dan pemasaran, serta rendahnya pengetahuan manajerial dalam pengelolaan usaha.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Hidayati, Ernani, 2009, Kajian Pendekatan Pemasaran Kewirausahaan dan Kinerja Penjualan Usaha Kecil, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.11 No. 2 September 2009 : 183-192, [jurnalmanajemen.petra.ac.id](http://jurnalmanajemen.petra.ac.id) Diakses tanggal 10 Oktober 2016.
- Munizu, Musran, 2010, *Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.12 No. 1 Maret 2010: 33-41, [jurnalmanajemen.petra.ac.id](http://jurnalmanajemen.petra.ac.id). Diakses tanggal 10 Oktober 2016.
- Purwaningsih, Ratna dan Kusuma, Pajar Damar, 2015, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan metode Structural Equation Modeling (Studi Kasus UKM Berbasis Industri Kreatif Kota Semarang)*, Prosiding SNST ke-6 Tahun 2015, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang, [www.unwahas.ac.id](http://www.unwahas.ac.id). Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.
- Purwidiyanti, Wida, Tri Septin M Rahayu, 2015, Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja usaha industri kecil dan menengah di Purwokerto Utara, *KINERJA*, Vol.19 No.1.Tahun 2015 (149-159). <https://ojs.uajy.ac.id> Diakses tanggal 5 Oktober 2016.
- Rukmantara, Bagus, 2011, *Analisis Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal Terhadap Kinerja Usaha Kecil Di Kota Medan (Studi Kasus Pada Debitur PT Sarana Sumut Ventura Dengan Pinjaman Diatas 100 Juta Rupiah)*, [repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id) Diakses tanggal 7 Oktober 2016.
- Sugiyono, 2003, *Statistik untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung, Alfabeta.
- Sumantri, Bayu, Anna Fariyanti, Ratna Winandi, 2013, *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kinerja Usaha Wirausaha Wanita: Suatu Studi pada Industri Pangan Rumahan di Bogor*, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol.12 No.3, [journal.sbm.itb.ac.id](http://journal.sbm.itb.ac.id). Diakses tanggal 10 Oktober 2016.
- Taufik Mokhammad, Hartono, 2011, *Model Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Potensi Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal WIGA*. Vol.1 No.1 Maret 2011 ISSN No. 2088-0944 (1-12) Sekolah Tinggi Widya Gama Lumajang.

## **TAT TWAM ASI: ADAPTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN KULTURAL**

**Made Kerta Adhi**

IKIP Saraswati  
Email: kadhi358@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Poverty is a national issue that still remains actual. Especially if the problem occurred in tourist areas of the world, such as in the mountainous tourist area Kintamani, Bangli, Bali. Residents as "owner" of the region should not be poor, in reality the number of poor people is relatively large (6.80%) above the provincial poverty of Bali (3.95%). This study aims to determine the factors leading causes of cultural poverty, and to develop cultural model of poverty alleviation by adapting the values of local wisdom, Tat Tvam Asi. This study uses Prototypical type of development research paradigm Studies combined with Reflective Analysis. Data were collected by using participant observation, interviews, questionnaires, document studies in which the researcher as the main instrument. It was found that the main factors causing poverty were the cultural values which led them difficult to reduce the poverty, such as the cultural habit of begging, lack of motivation, resigned to fate, family situation which has been poor hereditary, and low education level. Poverty alleviation models were done by adapting the values of Tat Tvam Asi through functionalization of local socio-cultural traditional institutions in synergy.*

**Keywords:** *alleviation, cultural poverty, and tat tvam asi*

### **ABSTRAK**

*Kemiskinan merupakan isu nasional yang masih tetap aktual. Apalagi kalau masalah tersebut terjadi di kawasan wisata dunia, seperti di kawasan wisata pegunungan Kintamani, Bangli, Bali. Penduduk sebagai "pemilik" kawasan semestinya tidak miskin, realitanya jumlah penduduk yang miskin relatif banyak (6,80%) di atas kemiskinan provinsi Bali (3,95%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab utama timbulnya kemiskinan kultural, serta mengembangkan model pengentasan kemiskinan kultural dengan mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal, Tat twam asi. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian pengembangan tipe Prototypical Studies yang dipadukan dengan Analisis Reflektif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara, penyebaran kuesioner, studi dokumen dimana peneliti sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor penyebab utama kemiskinan adalah adanya nilai-nilai kultural yang menyebabkan mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, seperti perilaku meminta-minta, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, keadaan keluarga yang memang dari mulanya sudah miskin secara turun menurun dan tingkat pendidikan rendah. Model pengentasan kemiskinan dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai Tat Twam Asi melalui fungsionalisasi lembaga-lembaga sosial budaya (adat) lokal secara sinergi.*

**Kata kunci:** kemiskinan kultural, pengentasan, dan tat twam asi

### **PENDAHULUAN**

Kawasan wisata pegunungan Kintamani merupakan salah satu tujuan wisata provinsi Bali, dan objek wisata dunia yang sangat terkenal dengan panorama alam dan budayanya, yakni keindahan kaldera dan Gunung Batur, serta budaya penguburan mayat, dimana mayatnya diletakkan tanpa dikubur di bawah

pohon Taru Menyan. Sebagai kawasan wisata biasanya ditandai dengan "gemerincing dolar", namun realitanya masih ada sekelompok masyarakat di kawasan wisata Kintamani hidup dalam zona kemiskinan, yakni sebesar 6.80% atau 6.293 jiwa (Bappeda Kabupaten Bangli, 2011; Data Pendataan Program Perlindungan Sosial/PPLS Provinsi Bali, 2011).

Kawasan wisata pegunungan Kintamani yang “dinikmati kawasannya”, namun mereka relatif tidak menikmati hasil dari keindahan panorama alamnya yang terjual dalam paket industri wisata. Terdapat 27 desa adat yang mendiami kawasan wisata pegunungan Kintamani, namun yang menikmati imbas dan dampak dari pengembangan industri pariwisata tersebut hanya 5 desa, sementara 22 desa hanya sebatas pendukung dan daerah lintasan pariwisata yang relatif belum merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di kawasannya.

Masyarakat di kawasan wisata Kintamani, Bangli sebagai sebuah fenomena sosial, ternyata mewakili sebagian besar fenomena pengembangan kawasan dan tujuan wisata yang saat ini terjadi di Indonesia. Pengembangan industri pariwisata dengan berbagai zona dan infrastruktur pendukungnya, ternyata belum mampu menyentuh aras dasar persoalan kemiskinan masyarakat, seperti yang terjadi di kawasan Tengger dan Lereng Merapi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Remi, 2002 ; Sudjarwo, 2009; Hastuti, 2013).

Desa-desa yang terkategori kedalam destinasi wisata Kintamani merupakan desa agraris dengan tipologi lahan kering dan merupakan perbukitan dengan sebagiannya adalah lembah-lembah yang sangat cocok untuk pengembangan pertanian sayur mayur dan palawija serta perkebunan, yang tampak seperti gambar berikut.



Gambar 1 Petani Sayur di Lereng G. Batur

(kertaadhi,doc)

Berbagai kebijakan secara struktur telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, dan pemerintah provinsi Bali. Namun, realitanya masyarakat miskin sulit terentaskan, karena ada faktor-faktor budaya tertentu yang turut bermain. Karakter masyarakat setempat dengan kebiasaan dan budaya yang telah dianutnya, perlu diperhatikan dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di kawasan wisata Kintamani dengan mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai penganut Hindu yang loyal dan budaya yang telah terwariskan secara turun temurun, menyebabkan kebijakan pemerintah daerah setempat “mentok” dan kontra produktif dengan persoalan kemiskinan yang membelit masyarakat setempat. Menurut Lasmawan (2009b), terdapat beberapa faktor penyebab, tidak produktifnya sebuah kebijakan formal di era otonomi, yaitu (1) bertentangan dengan kebiasaan masyarakat setempat, (2) bertolak belakang dengan budaya yang dianut, (3) tidak berdampak ekonomis langsung, dan (4) arogansi kewilayahan dan/atau kedirian masyarakat.

Masyarakat kawasan pegunungan Kintamani, adalah penganut agama Hindu yang taat. Oleh sebab itu, tampaknya ada nilai dasar yang bisa diadaptasi dan dielaborasi kedalam program atau model pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di kawasan wisata pegunungan Kintamani, nilai *Tat twam asi*.

Tat Twam Asi adalah ajaran moral dari Agama Hindu, yang identik dengan

perikemanusiaan dalam Pancasila. Tat Twam Asi mempunyai arti engkau adalah aku dan aku adalah engkau, yang mengandung asas: suka duka, *paras paros, salunglung sabayantaka*, saling asih, saling asah, dan saling asuh. Filosofi yang termuat dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa berempati, merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang miskin yang ada di dekat kita. Pentingnya solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera (Hendra, 2013). Ajaran *Tat twam asi* yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat secara menyeluruh dan sungguh-sungguh, dalam sifat dan perilaku hidup bermasyarakat, maka kehidupan ini akan menjadi sangat harmonis, saling isi dan melindungi, yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan hidup dalam kebersamaan. *Tatwamasi* mengajarkan agar manusia senantiasa mengasihi orang lain atau menyayangi makhluk lainnya. Bila diri kita sendiri tidak merasa senang disakiti apa bedanya dengan orang lain. Maka dari itu janganlah sekali-kali menyakiti hati orang lain, kalau kita tidak ingin disakiti atau tersakiti oleh manusia lainnya. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran *Tat Twam Asi*, manusia akan dapat merasakan berat dan ringan hidup dan kehidupan di kawasan tempat tinggalnya. Semua diantara kita ini tahu bahwa berat dan ringan (*rwabhineda*) itu ada dan selalu berdampingan adanya, serta sulit dipisahkan keberadaannya dalam konteks kehidupan di masyarakat.

Pokok-pokok ajaran *Tat Twam Asi* terdiri atas: (1) saling ketergantungan antar sesama, penghormatan terhadap perbedaan, (3) perasaan kepemilikan komunal, (4) kau adalah aku, dan aku adalah kamu, dan (5) tanggungjawab sosial bersama. Dalam aplikasinya, ajaran *Tat Twam Asi* lebih dimaknai sebagai sebuah pola berkehidupan yang mengedepankan pada kebersamaan atas dasar keterikatan nasib dan tanggungjawab kemanusiaan, sehingga benar-benar terbangun

sebuah moralitas sosial antar sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Pada konteks peletakan tanggungjawab moral sosial ajaran *Tat Twam Asi*, muncul hegemoni komunalitas setiap komponen masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan atau konflik yang disandarkan pada kepentingan masyarakat secara bersama, yaitu hidup yang mapan secara sosial dan ekonomi. Konsep *Tat Twam Asi* pada tataran kehidupan masyarakat lebih dimaknai sebagai sebuah pola berkehidupan yang bersinergi melalui integrasi potensi antar anggota masyarakat untuk keluar dari sebuah persoalan kemiskinan. Konsep *Tat Twam Asi*, antara lain menjadi acuan dari setiap gerakan masyarakat desa adat untuk menjaga dan mempertahankan integritas dan keagungan desa adat sebagai simbolisme masyarakat Hindu Bali. Apabila konsep *Tat Twam Asi* ini diletakkan pada program pengentasan masyarakat miskin, maka akan menjadi motor dan sekaligus inti dari program tersebut, sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap keberlanjutan dan keberhasilan program itu sendiri (Lasmawan, 2009a).

World Bank (2008) membedakan kemiskinan menjadi tiga, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, baik pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Sementara kemiskinan relatif (relative poverty) adalah suatu tingkat kemiskinan dalam hubungannya dengan suatu rasio garis kemiskinan absolut atau proporsi distribusi pendapatan (kesejahteraan) yang timpang atau tidak merata. Lewis (1966) menyatakan, kemiskinan kultural muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, yakni malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan

sebagainya. Kemiskinan kultural merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat terlalu lama, atau secara tidak langsung menunjukkan adanya keterkaitan antara kemiskinan struktural dengan kemiskinan kultural sehingga membuat masyarakat apatis, pasrah, dan berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir (Rahmatullah, 2013),

Berangkat dari katagori kemiskinan tersebut, tampaknya kemiskinan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di kawasan wisata Kintamani termasuk kemiskinan kultural. Hal ini disebabkan secara politis dan ekonomis, bahwa pemerintah Kabupaten Bangli telah melakukan beberapa kebijakan, namun realitanya terjadi penolakan keluar dari kemiskinan oleh sekelompok masyarakat dengan alasan budaya atau kebiasaan. Kehidupan yang papa, merupakan representasi masyarakat di kawasan wisata pegunungan Kintamani (gunung Batur) yang tampak seperti gambar berikut.



Gambar 2 Penduduk miskin di lereng G.Batur

(kertaadhi,doc)

Fenomena kemiskinan kultural yang terjadi di kawasan wisata Kintamani, perlu dikaji secara mendalam, meliputi faktor-faktor

penyebab utama masyarakat kawasan wisata Kintamani, Bangli menjadi miskin, dan mengembangkan model pengentasan kemiskinan dengan mengadaptasi nilai-nilai *Tat Twam Asi*, penguatan lembaga-lembaga sosial dan budaya masyarakat dengan bersandar pada keluhuran nilai-nilai agama dan budaya setempat. Pengembangan model ini dipandang sebagai sebuah pendekatan baru bagi masyarakat yang dapat membangun karakter (*character building*), karena selama ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih dominan berbentuk bantuan yang bersifat materi dan sporadis atau insidental, sehingga relatif kurang efektif membawa masyarakat setempat keluar dari zona kemiskinan. Penelitian-penelitian mutakhir yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu tentang agrowisata dan pengentasan kemiskinan di kawasan wisata pegunungan Kintamani, antara lain studi yang dilakukan oleh Suardika (2009); Arganta (2009); Erawan (2010); Inten (2010); serta Lasmawan (2008; 2009a; dan 2009b).

## METODE

Lokasi penelitian ini adalah di kecamatan Kintamani, Bangli, Bali. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian pengembangan tipe *Prototypical Studies* yang dipadukan dengan metode *Analisis Reflektif; rapid rural appraisal dan participatory rural appraisal* (Akker, 1999; Nieveen, 1999; Plomp, 2007). Analisis dilakukan selama pengumpulan data dengan teknik deskriptif kualitatif. Peneliti sebagai instrumen utama, sehingga diperoleh sebuah inovasi terstruktur terkait dengan model pengentasan masyarakat dari kemiskinan dengan mengadaptasi nilai-nilai *Tat Twam Asi* melalui fungsionalisasi lembaga-lembaga sosial dan budaya lokal. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara, penyebaran kuesioner, studi dokumen, dan *focus groups discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan mengundang unsur-unsur dari institusi pemerintah dan lembaga sosial budaya yang berada di lingkungan kecamatan Kintamani dan kabupaten Bangli.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perda Provinsi Bali No.16/2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali pasal 82, bahwa Kintamani merupakan objek daya tarik wisata khusus (ODTWK) yang terletak di Kabupaten Bangli. Kintamani merupakan salah satu tujuan wisata di provinsi Bali, yang mengandalkan keindahan kaldera gunung Batur, danau Batur, air panas dan budaya masyarakat setempat. Salah satu objek wisata yang selama ini “terjual” dan menikmati imbas dari pengelolaan industri pariwisata pegunungan Kintamani adalah objek wisata Toya Bungkah, seperti gambar berikut.



Gambar 3 Objek Wisata Toya Bungkah  
(kertaadhi.doc)

Kintamani sebagai ODTWK ramai dikunjungi oleh wisatawan yang jumlah kunjungan wisatawan relatif mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini tampak pada jumlah kunjungan wisatawan ke Kintamani lima tahun terakhir (tahun 2010-2014) rata-rata 11% ( Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2015 ).

Pengembangan industri pariwisata di kawasan wisata Kintamani, hanya dinikmati oleh beberapa desa, yakni lima desa yang terkenal dengan istilah “bintang danu”, yaitu Desa Kedisan, Desa Buahon, Desa Songan, Desa Trunyan, dan Desa Batur. Sementara desa lainnya hanya sebatas “pendukung” dan

“daerah lintasan pariwisata” yang relatif belum merasakan dampak dari pengembangan pariwisata di kawasannya, seperti Desa Abang Songan. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1.251 jiwa dengan luas wilayah 4.250 km<sup>2</sup>, dan jumlah rumah tangga 351 RT. Desa Abang Songan merupakan salah satu desa pendukung kawasan wisata Kintamani, tetapi belum menikmati kontribusi yang layak dari produktivitas pariwisata Kintamani, sehingga jumlah penduduk miskin di desa tersebut relatif tinggi yang mencapai angka 105 RTS-PM (Data Kantor Kesra Camat Kintamani, 2016 ).

Lembaga sosial-budaya yang terdapat di kawasan pariwisata Kintamani, pada umumnya adalah *sekehe* teruna teruni, kelompok tani, gabungan kelompok tani, *sekehe joged*, *sekehe santi*, *sekehe tabuh*, *sekehe payus*, *sekehe rejang*, *sekehe manyi*, *sekehe baris*, *sekehe pruguh*, *sekehe gong*, *sekehe gambuh*, lembaga perkreditan desa, desa adat, prajuru desa adat, koperasi unit desa, kelompok penyakap, dan kelompok peternak. Semua lembaga sosial budaya tersebut memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang struktur organisasinya pada umumnya mengacu pada pola manajemen sederhana, yaitu ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan anggota.

Untuk kelompok tani, keberadaannya hampir menyerupai organisasi subak. Mengingat wilayah Kintamani merupakan daerah kering dan jarang ada sungai yang berair, maka sebutan subak bagi organisasi petani tersebut jarang digunakan, dan mereka lebih senang menggunakan istilah kelompok tani. Di satu desa, biasanya terdapat lebih dari satu kelompok tani yang anggotanya terdiri atas 20 orang, sehingga kesatuan organisasi ini untuk satuan wilayah desa lebih sering menggunakan istilah gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa kawasan agrowisata pada umumnya dan petani pada khususnya, dapat dilihat dari berbagai aspek khusus, seperti aturan desa dan pengelolaan lembaga sosial dan budaya desa, luas dan kepemilikan lahan, sistem permodalan, pemanfaatan sumber daya, dan sistem penjualan. Sistem penjualan hasil

panen dilakukan dengan sistem *pajegang*/borong (sistem ijon) dan petik berkala, sehingga lebih menguntungkan para tengkulak. Hal ini tidak lepas karena ketidakberdayaan petani atau masyarakat dalam melakukan negosiasi harga.

Persoalan yang sangat besar adalah masyarakat setempat kurang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang pariwisata, seperti kemampuan berbahasa asing, inovasi produk lokal dan kemampuan menjual (*marketing*) yang disebabkan oleh tingkat pendidikannya yang masih rendah (pendidikan dasar). Perhatian pemerintah dan dinas terkait saat ini juga masih sangat minim, dalam melibatkan pedagang acung mengelola dan mengembangkan objek wisata. Ratusan masyarakat lokal berprofesi sebagai pedagang acung, mereka menjual atau menjajakan barang dagangannya, seperti pernak-pernik, patung, baju dan buah-buahan seadanya, seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 4 Pedagang acung menjajakan pernak- pernik (kertaadhi,doc)

Kintamani merupakan suatu kawasan yang dihuni oleh masyarakat yang secara historis memiliki persamaan nasib dan latar belakang kebudayaan. Mereka terikat dalam suatu tatanan sosial kemasyarakatan yang disebut dengan desa adat. Desa adat dipimpin oleh prajuru desa adat. Kepengurusan desa adat yang dilaksanakan masyarakat Kintamani secara fundamental tidak jauh berbeda dengan desa-desa adat di daerah lain di Bali. Hal ini disebabkan pengaruh dari kemajuan masyarakat itu sendiri maupun pengaruh dari dunia luar (pariwisata).

Tipe pemerintahan desa adat yang berlaku pada masyarakat Kintamani mengikuti pola "lulu apad" (struktur desa adat) yang didasarkan dari waktu pelaksanaan upacara parebuan (perkawinan). Sistem kepemimpinan desa adat bersifat kembar, dimana pimpinan desa adat dipegang oleh dua orang *jero kubayan*, yaitu *jero kubayan mucuk* dan *jero kubayan nyoman*. Kedua orang pemimpin desa adat ini dibantu oleh *saih nembelas* dalam menjalankan tata kehidupan adat (Lasmawan, 2009b).

Secara umum terdapat beberapa faktor yang menstimuli munculnya kemiskinan pada masyarakat yang tinggal di kawasan wisata pegunungan Kintamani, seperti faktor-faktor kondisi alam dan geografis, ketidakadilan ekonomi, sosial ataupun politik yang mereka alami baik pada tatanan pemerintahan formal, maupun pada konstelasi kemasyarakatan lokal. Pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi Bali, telah berupaya melakukan berbagai program dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, seperti program Gerbangdesigot (gerakan pembangunan desa dengan sistem gotong royong), program GGS (Gerbang Gita Santi), bedah rumah, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan modal melalui gerbangsadu (gerakan pembangunan desa terpadu). Namun, realitanya masyarakat miskin di kawasan wisata kecamatan Kintamani belum mampu secara optimal melepaskan diri dari balutan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari data kantor Kesra Camat Kintamani (2016), bahwa data rumah tangga sasaran menerima Raskin masih relatif tinggi yang mencapai angka 4.754 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran-Penduduk Miskin).

Hal ini, karena terjadi kontradiktif dengan budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. Kondisi ini semakin diperkuat dengan tidak meratanya pembagian "kue industri wisata" sehingga semakin memperparah daya beli dan tingkat pendapatan masyarakatnya. Ketimpangan pembagian kue industri pariwisata ini, sebagai dampak dari lemahnya posisi tawar dan akses politik ke pemerintah daerah (Lasmawan, 2009a).

Berdasarkan analisis data, ternyata faktor-faktor utama yang menyebabkan kemiskinan kultural pada masyarakat di kawasan wisata

pegunungan Kintamani adalah nilai-nilai kultural yang menyebabkan mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, seperti perilaku atau mengemis yang disebabkan oleh sifat malas, pesimis, mudah menyerah, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, keadaan keluarga yang memang dari mulanya sudah miskin secara turun menurun. Budaya *idih-idih* ini, disebabkan oleh faktor-faktor alam dan ekonomi, seperti keterbatasan sandang, pangan dan papan sebagai akibat dari minimnya tingkat pendapatan masyarakat; faktor sosial, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, judi sabungan ayam dan lingkungan sosial; serta faktor politik, seperti adanya perbedaan gender, keterbatasan akses, serta keterbatasan kontribusi investor dan orang kaya kepada masyarakat miskin.

Budaya *idih-idih*, menurut mitos *I Ratu Ayu Mas Membah*, terjadi karena adanya kutukan dari *Bhatari Batur* yang bergelar *I Ratu Ayu Mas Membah*. Disebutkan, bahwa beliau menyamar sebagai orang tua yang menjual air ke daerah pegunungan Bali Utara sampai di daerah Munti Gunung Karangasem. Ketika beliau tiba di daerah tersebut, beliau diejek, dan ejekan itu sangat menyinggung perasaannya. Kemudian orang tua itu berkata, “wahai orang Munti Gunung, engkau menghina aku, tidak tahu engkau kalau aku adalah Bhatari Batur, mulai saat ini semoga engkau menjadi peminta-minta dan menjadi cemohan orang lain, serta kehidupanmu serba kekurangan”. Demikian kutukan Bhatari Batur yang merasa tersinggung. Logika mitos ini, bahwa daerah Munti Gunung tidak dikaruniai anugrah Tuhan berupa air yang menjadi titik tolak subur-tidaknya suatu daerah. Kekeringan adalah salah satu faktor pembentuk karakter orang menjadi “keras dan sedikit pemalas”, karena apapun yang dilakukan selalu dihantui oleh kegagalan hasil yang diperolehnya. Dengan demikian, lebih baik mereka menjadi pengemis daripada berusaha tanpa hasil apa-apa. Mereka mengemis sampai ke perbatasan desa, yakni ke desa Trunyan dan Desa Soongan. Kemalasan cara berpikir dan berbuat ini telah laten dan terus membudaya dari generasi ke generasi sampai sekarang ini.

Mitos ini menunjukkan adanya “penguasa air” yang memberikan *anugrah* maupun kutukan pada daerah-daerah tertentu menjadi berair atau kering/tandus. Di sinilah sosio-kultural secara stereotype terbentuk bahkan seakan mendapat legitimasi kosmis (Duija, 2006; Hardiman, 2003).

Untuk menanggulangi kemiskinan kultural di daerah kawasan wisata Kintamani, diupayakan pengembangan model pengentasan kemiskinan kultural dengan mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal, yakni *Tat twam asi*. Sasaran model program adalah masyarakat miskin kawasan wisata Kintamani dengan memberdayakan atau penguatan lembaga-lembaga sosial-budaya yang dijiwai nilai-nilai *Tat Twam Asi*, seperti desa Adat dan Dinas dengan jajarannya, Bappeda Kabupaten, lembaga karang taruna, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial dan budaya lokal lainnya. Keterlibatan mereka dalam pelaksanaan model disesuaikan dengan tugas, wewenang dan fungsi dari masing-masing institusi/pranata tersebut.

Pelibatan masyarakat sekitar dan dukungan lembaga-lembaga sosial-budaya masyarakat setempat adalah sesuatu yang harus dan bersifat mendesak untuk dilakukan, sehingga terbentuk karakter (*character building*) baik secara individu dari masyarakat miskin, maupun institusi atau pranata sosial budaya untuk mengentaskan kemiskinan. Selama ini, berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan, lebih bersifat sporadis dan lebih terfokus pada program yang langsung mengarah pada sasaran (masyarakat miskin), namun mengabaikan potensi dan modalitas sosial masyarakat sekitar, sehingga program tersebut lebih sering gagal dan tidak bertahan lama (berkelanjutan). Bersandar pada fakta ini, maka diupayakan pengembangan sebuah model pengentasan kemiskinan yang mengedepankan pada integrasi dan akomodasi modalitas sosial dan budaya masyarakat setempat dengan mengadaptasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Hindu Bali, yakni ajaran *Tat Twam Asi*.

Di dalam kitab Candayoga Upanisad, dan filsafat Hindu dijelaskan bahwa *Tat Twam Asi* adalah ajaran kesusilaan tanpa batas, yang identik dengan perikemanusiaan dalam Pancasila. Konsepsi sila perikemanusiaan dalam Pancasila, bila kita cermati secara sungguh-sungguh merupakan realisasi dari ajaran *Tat Twam Asi* yang terdapat dalam kitab suci weda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran *Tat Twam Asi* merupakan sebuah konsep berkehidupan dengan dasar nilai-nilai pokok kemanusiaan, sehingga akan memicu munculnya daya rekat sosial dan ketergantungan personal di masyarakat. Maksud yang terkandung didalam ajaran *Tat Twam Asi* adalah “ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama” sehingga bila kita menolong orang lain berarti juga menolong diri kita sendiri.

*Tat twam asi* adalah ajaran moral yang bernafaskan ajaran agama Hindu. Wujud nyata/riil dari ajaran ini dapat dicermati dalam kehidupan dan perilaku keseharian dari umat manusia yang bersangkutan. Manusia dalam hidupnya memiliki berbagai macam kebutuhan hidup yang dimotivasi oleh keinginan (kama) manusia itu sendiri. Dengan predikat yang dilekatkan pada kedirian manusia, baik dari sisi sifat, dan ragamnya, yakni sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk spiritual, makhluk ekonomis, makhluk budaya, dan lainnya, maka manusia harus mampu membawa diri dan orang lain disekitarnya menuju arah yang sama, yaitu alam kebebasan dari kemiskinan lahirian dan bathiniah. Pada konteks inilah, manusia perlu mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan, sehingga seberapa berat masalah yang dihadapinya akan terasa ringan (*selulunglung sebayantaka*), apapun yang terjadi, kebersamaan adalah segalanya.

Dengan demikian jika konsep *Tat Twam Asi* diterapkan dalam program pengentasan kemiskinan, niscaya berbagai tahapan program yang dirancang akan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan harapan. Hal ini disebabkan karena diantara mereka (penduduk

miskin) akan terpola sebuah rasa ketergantungan alamiah dan moral, untuk secara bersama-sama keluar dari zona kemiskinan. Dengan memahami dan mengamalkan *Tat Twam Asi* yang direpresentasikan dalam aktivitas *menyamebraye*, manusia akan dapat merasakan berat dan ringan hidup dan kehidupan di kawasan tempat tinggalnya. Semua diantara kita ini tahu bahwa berat dan ringan (*rwabhineda*) itu ada dan selalu berdampingan adanya, serta sulit dipisahkan keberadaanya dalam konteks kehidupan beragama dan beradat istiadat/berbudaya, bermasyarakat, dan berbangsa.

Model pengentasannya diformulasikan ke dalam bentuk program-program yang dijiwai oleh nilai-nilai *Tat Twam Asi*. Melalui pemberdayaan atau penguatan lembaga sosial budaya agar lebih berempati untuk membantu masyarakat miskin sebagai milik bersama, sehingga kemiskinan budaya (malas, pesimis, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, lemahnya akses serta budaya mengemis dan pendidikan rendah) dapat tereliminasi. Model pengentasan kemiskinan dengan mengadaptasi nilai-nilai *Tat Twam Asi* bertujuan, antara lain (1) merevitalisasi nilai-nilai moral masyarakat lokal menjadi *common values*; (2) membantu pemerintah dalam percepatan pengentasan masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani, Bangli, Bali; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar sebagai “pemilik wilayah” dalam mengentaskan kemiskin kawasan wisata pegunungan Kintamani, Bangli, Bali; (4) percepatan program pengentasan kemiskinan kawasan wisata pegunungan Kintamani dengan mengadaptasi nilai-nilai *Tat twam asi* yang terrepresentasi dalam aktivitas *menyamebraye*;

meningkatkan produktivitas program-program pengentasan kemiskinan kawasan wisata pegunungan Kintamani, bangli, Bali yang bersumber dari pendanaan pemerintah maupun swadaya masyarakat; (6) membentuk dana solidaritas masyarakat untuk penghapusan kemiskinan kawasan wisata pegunungan Kintamani, Bangli, Bali; (7) mengembangkan

program bagi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat daerah lokal dalam lingkup strategi pengurangan kemiskinan kawasan wisata pegunungan Kintamani, Bangli, Bali, serta meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani serta organisasi kelompok masyarakat desa adat; (8) memajukan akses yang sama dan partisipasi penuh kaum perempuan, berdasarkan prinsip kesetaraan dengan pria, dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan, mengarus-utamakan perspektif gender dalam semua kebijakan dan strategi pembangunan, serta penghapusan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi; (9) mengembangkan kebijakan, cara-cara dan sarana untuk meningkatkan akses masyarakat adat/penduduk asli dan komunitas mereka terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan memperhatikan hakekat ketergantungan mereka selama ini pada ekosistem alami; (10) menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk semua kelompok masyarakat dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan yang berasal dari lingkungan; (11) membangun prasarana dasar kawasan wisata pegunungan Kintamani, diversifikasi ekonomi dan perbaikan transportasi, serta akses pada pasar, kemudahan informasi pasar dan kredit bagi masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani, untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan; (12) melaksanakan alih pengetahuan dan teknik dasar pertanian berkelanjutan, pariwisata, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara lestari, untuk petani dan nelayan skala kecil dan menengah, serta masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani, Bali, melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait; (13) meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, dengan memajukan pola kemitraan produksi pangan berbasis *Tat twam asi (menyamebraya)* (14) meningkatkan akses pada sanitasi untuk memperbaiki kesehatan masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam bingkai kearifan nilai-nilai lokal.

Target dan sasaran model program adalah (a) masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani; (b) masyarakat desa

adat di wilayah kawasan wisata pegunungan kintamani; serta (3) lembaga-lembaga sosial dan adat di daerah kawasan wisata pegunungan Kintamani. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan model pengentasan kemiskinan dengan mengadaptasi nilai-nilai *Tat Twam Asi* adalah Desa Adat, Bappeda Kabupaten, lembaga karang taruna, lembaga perkreditan desa (LPD), Parisada Hindu Dharma Indonesia kabupaten, kantor pemberdayaan masyarakat desa, tokoh masyarakat desa adat, kelompok pemerhati masyarakat miskin.

Peran, tugas dan fungsi pokok mereka disesuaikan dengan eksistensi dari masing-masing institusi, sebagai berikut

#### Desa Adat

Membina dan mengidentifikasi masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani atau di wilayahnya

Mengawasi pelaksanaan program

Membangun komunikasi antar warga secara berkelanjutan

Menyediakan lokasi pembinaan dan pelatihan keterampilan

Memberikan hukuman atau sanksi adat kepada warga pelanggar

#### Kantor Bappeda Kabupaten

Mengalokasikan dana kegiatan

Mengkoordinasikan program ke SKPD terkait

Melakukan pembinaan secara periodik dan berkelanjutan

Memfasilitasi koordinasi antar instansi dan lembaga

#### Lembaga Karang Taruna

Melaksanakan program pembinaan dan pendampingan

Mengidentifikasi masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani atau di wilayahnya

Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan

- d. Menggali dana dari warga masyarakat bagi terlaksananya program
- e. Mendampingi SKPD dalam pembinaan kepada warga binaan

Lembaga perkreditan desa (LPD)

Menyediakan dana pinjaman bagi warga binaan yang telah lulus pelatihan  
Mengawasi penggunaan dana bantuan dan dana partisipasi  
Membuat laporan penggunaan dana binaan warga miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani

Parisada Hindu Dharma Indonesia  
Kabupaten

Melaksanakan pembinaan kerohanian kepada warga  
Mengawasi pelaksanaan program  
Mendampingi penggalian dana partisipasi

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mengembangkan program pelatihan, pendampingan, dan pembinaan  
Mengkoordinasikan kegiatan dengan Bappeda  
Melakukan evaluasi kegiatan/program  
Memberdayakan masyarakat yang telah menjalani pelatihan dan pembinaan

Tokoh masyarakat desa adat

Melakukan pembinaan kepada warga desa adat  
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program  
Mendampingi pelaksanaan program  
Mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga pemerintah dan desa adat

8. Kelompok pemerhati masyarakat miskin kawasan wisata pegunungan Kintamani

Melakukan pendampingan dan pengawasan pelaksanaan program  
Ikut serta membantu penggalian dana partisipasi  
Mengkoordinasikan kegiatan antarsama lembaga (pemerhati)

Model pengentasan kemiskinan kultural dapat dilakukan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan program kegiatan, seperti tabel berikut.

Tabel 1 Sasaran dan Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

| No. | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|-----|--|--|
| 1   | Memenuhi kebutuhan ketahanan pangan keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani | a. Memberikan bantuan langsung pangan kepada keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani    |
|     |  | b. Menjamin kecukupan pangan bagi keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani               |
|     |  | c. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin   |
| 2   | Memenuhi layanan kesehatan keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani          | a. Memberikan layanan kesehatan bagi penduduk miskin kawasan wisata Kintamani di kelas III Rumah Sakit |
|     |  | b. Memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin di kawasan wisata pegunungan                      |

|   |   |    |  |  |  |  |
|---|---|----|--|--|--|--|
|   |   |    | Kintamani  |  |  | untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi |
|   |   | c. | Memberikan pelayanan kesehatan penduduk miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani di Puskesmas dan jaringannya                                       |  |  |  |
|   |   | d. | Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin kawasan wisata Kintamani tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, gizi dan perilaku hidup sehat |  |  |  |
| 3 | Memenuhi layanan pendidikan bagi keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani           | a. | Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam jenjang wajib belajar sembilan tahun                             |  |  |  |
|   |   | b. | Menurunkan angka buta aksara pada masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani   |  |  |  |
|   |   | c. | Memberikan pelayanan pendidikan non formal bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani   |  |  |  |
|   |   | d. | Memberikan kesempatan bagi anak-anak kurang mampu  |  |  |  |
| 4 | Memenuhi upaya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi keluarga miskin kawasan wisata Kintamani | a. | Mengembangkan kelembagaan bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.             |  |  |  |
|   |   | b. | Meningkatkan kemampuan masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam berusaha dan bekerja   |  |  |  |
| 5 | Meningkatkan kualitas perumahan keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani            | a. | Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat             |  |  |  |
|   |   | b. | Mengembangkan partisipasi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam penyediaan perumahan  |  |  |  |
| 6 | Memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin di kawasan wisata                            | a. | Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang berpihak pada masyarakat miskin   |  |  |  |

|    |   |    |  |  |  |  |  |
|----|---|----|--|--|--|--|--|
|    | pegunungan Kintamani  | b. | Meningkatkan akses keluarga miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani  |  |  |  | Kintamani dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup |
|    |   | c. | Meningkatkan pengetahuan masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani tentang pentingnya air minum yang bersih, aman dan sarana sanitasi dasar |  |  |  |  |
| 7  | Memenuhi kebutuhan akan pertanahan bagi penduduk miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani  | a. | Memberikan perlindungan bidang pertanahan bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani  |  |  |  |  |
| 8  | Meningkatkan akses masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup | a. | Memasyarakatkan informasi dan pengetahuan pengelolaan lingkungan yang berpihak pada masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani               |  |  |  |  |
|    |   | b. | Mengelola lingkungan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan   |  |  |  |  |
| 9  | Memenuhi rasa aman bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani  | a. | Mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani   |  |  |  |  |
|    |   | b. | Meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat dalam mewujudkan rasa aman, dan menanggulangi persoalan situasi konflik serta judi sabungan ayam              |  |  |  |  |
| 10 | Memperluas kesempatan kepada masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani untuk berpartisipasi dalam pembangunan                        | a. | Meningkatkan kesempatan masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan                      |  |  |  |  |
|    |   | b. | Menyediakan informasi pembangunan bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani  |  |  |  |  |
| 11 | Menjamin kesetaraan gender bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani  | a. | Mengembangkan sistem pendataan yang mampu menangkap ketimpangan gender pada masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan                                 |  |  |  |  |

|    |  |                |  |
|----|--|----------------|--|
|    |  |                | Kintamani  |
|    |  | b.             | Mengembangkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan   |
| 12 | Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani dalam pembangunan kawasan wisata Kintamani. Pengembangan kawasan pesisir untuk kemakmuran masyarakat miskin di kawasan wisata Batur pesisir | a.<br>b.<br>c. | Meningkatkan akses terhadap tempat dan ruang usaha bagi masyarakat miskin di kawasan wisata pegunungan Kintamani Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan pembudidaya ikan kecil Meningkatkan keamanan berusaha bagi nelayan dan petani |

## SIMPULAN

Kawasan wisata pegunungan Kintamani sebagai destinasi wisata provinsi Bali dan dunia, sangat menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakatnya sebagai “pemilik” kawasan. Apalagi setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat rerata 11% pada lima tahun terakhir, yang semestinya berdampak pada peningkatan pendapatan sebagai efek ikutannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya bahwa masyarakat di kawasan wisata Kintamani tetap miskin, mencapai angka 6,80% di atas angka kemiskinan provinsi Bali atau 4.754 RTS-PM. Pemerintah daerah baik tingkat kabupaten dan pemerintah provinsi secara struktural sudah

berusaha mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program, seperti gerbang gita shanti, gerbangdesigot, bedah rumah, BLT, raskin dan gerbangsadu. Namun, realitanya masyarakat tersebut belum mampu melepaskan diri dari balutan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena adanya nilai-nilai kultural yang menyebabkan mereka sulit terentaskan dari kemiskinan, seperti perilaku meminta-minta atau mengemis, perilaku malas, kurang memiliki motivasi, dan pasrah menerima takdir, keadaan keluarga yang memang dari mulanya sudah miskin secara turun menurun.

Oleh karena itu, perlu dibangun pengentasan kemiskinan di kawasan wisata tersebut dengan mengadaptasi dan mengelaborasi nilai-nilai *Tat twam asi* melalui memfungsionalisasi lembaga-lembaga sosial budaya (adat), pemerintah dan pelaku wisata. Mereka dilibatkan secara bersama-sama atau kolaboratif untuk mengentaskan kemiskinan sebagai suatu kesatuan entitas. Kemiskinan kultural bisa diminimalisir jika semua menyadari, berempati, memiliki solidaritas, merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang lain (masyarakat miskin), dan mengakui sebagai suatu kesatuan, bahwa kau adalah aku dan aku adalah engkau sehingga terbangun karakter kebersamaan untuk keluar dari kemiskinan.

Kebersamaan mereka diwujudkannyatakan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan program kegiatan yang realistis dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin sesuai nilai-nilai *Tat twam asi*. Mulai dari keterlibatan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) sampai pada kebutuhan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan akses sosial, ekonomi dan politik secara bertahap, adil, merata dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akker, J. Van den. 1999. *Principles and Method of Development Research*. London. Dalam. Van Den Akker, J., Branch, R.M., Gustafson, K., Nieveen, N., & Plomp, T. (penyunting.). *Design Approaches And*

- Tools In Educational And Training. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
- Arganta, Komang. 2009. "Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Petani di Kabupaten Bangli". *Laporan Penelitian*. Denpasar: Lembaga Penelitian UNUD.
- Bappeda Kabupaten Bangli. 2011. *Peta Permasalahan Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Bangli*. Bangli: Bappeda Kabupaten Bangli.
- Erawan, Wayan. 2010. "Menakar Kesulitan Ekonomi dan Keterikatan Budaya Masyarakat Pegunungan Batur Kintamani, Bangli". Laporan Penelitian. Denpasar: Lembaga Penelitian UNUD.
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali. 2015. "Data Kunjungan Wisatawan ke Pulau Bali". Denpasar.
- Duija, I Nengah. 2006. "Tradisi Lisan dalam konteks masa kini: karakteristik sosio kultural dibalik mitos I Ratu Ayu Mas Membah. Makalah. Denpasar: Program Pascasarjana IHDN.
- Hastuti, dkk. 2013 "Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Lereng Merapi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: FIS UNY.
- Hardiman, 2003. "Tradisi Lisan Dalam Konteks Masa Kini: Karakteristik Sosial- Kultural Dibalik Mitos I Ratu Ayu Mas Membah " dalam <http://www.scribd.com/doc/36745557/Tradi-si-Lisan-Dalam-Konteks-Masa-Kini-Karakteristik-Sosial-Kultural-Dibalik-Mitos#Scribd>. Diakses 15 Februari 2016.
- Hendra, Novayana. 2013. "My World Tat Twam Asi" dalam <http://worlddehendra.blogspot.co.id/2013/11/tat-twam-asi.html>. Diunduh tanggal 10 Februari 2015.
- Inten, Gede. 2010. Pergeseran Nilai Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Di Kawasan Wisata Gunung Batur Kintamani (Studi Etnografi Terhadap Masyarakat Penunjang Pariwisata Di Kawasan Kintamani – Bali). Laporan Penelitian. Singaraja: Lembaga Penelitian Undiksha.
- Lasmawan, Wayan. 2008. Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Kawasan Penunjang Wisata Alam Gunung Batur – Kintamani (*laporan penelitian*). Singaraja: Lembaga Penelitian Undiksha.
- Lasmawan, Wayan. 2009a. Studi Analisis Faktor-Faktor Penyebab Utama Kemiskinan Pada Masyarakat Pedesaan. *Laporan penelitian*. Bappeda Kabupaten Bangli.
- Lasmawan, Wayan. 2009b. Program Pengentasan Masyarakat Miskin Dan Penguatan Kelembagaan Lokal Di Kabupaten Bangli – Bali. *Laporan Sibermas*. Singaraja: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Undiksha.
- Lewis, Oscar. 1966. *The Culture of Poverty*. California: WH Freeman & Co.
- Nieveen, N. 1999. "Prototype To Reserach Product Quality. Dalam. Van Den Akker, J., Branch, R.M., Gustafson, K., Nieveen, N., & Plomp, T. (Penyunting.). "Design Approaches And Tools In Educational And Training". Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.
- Pemerintah Provinsi Bali. "Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029."
- Plomp. 2007. "Educational Design Research: An Introduction" dalam *An Introduction to Educational Design Research*. Enschede, Netherland: National Institute for Curriculum Development.
- Rahmatullah. 2013. "Budaya Kemiskinan dan Kemiskinan Struktural " 24 Agustus <http://www.rahmatullah.net/2013/08/kebudayaan-kemiskin-dan-kemiskinan.html>. Diakses 10 Februari 2016.
- Remi, Subyatie Soemitro dan Priyono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Kemerataan di Indonesia*, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.
- Suardika, Made. 2009. "Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan di Desa-desa Penyangga Industri Pariwisata Kintamani.

*Laporan Penelitian*. Singaraja: Universitas  
Panji Sakti.  
Sudjarwo dan Basrowi. 2009. *Manajemen  
Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.  
World Bank, World Development Report  
2008: Making Service Work for Poor

People, IBRD/ The World Bank,  
Washington DC.

# PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL KERAJINAN TANGAN MELALUI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN GIANYAR BALI

Ni Luh W. Sayang Telagawathi<sup>1</sup>, Ni Nyoman Yulianthini<sup>2</sup>, Ni Luh Sili Antari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIKSHA <sup>2</sup>Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIKSHA; <sup>3</sup>Jurusan Manajemen STIE Triatma Mulya Badung  
Email: [gemilangsuryawan@gmail.com](mailto:gemilangsuryawan@gmail.com)

## ABSTRACT

*Handicrafts in Bali a contributor to regional income and absorbing large labor force in addition of course tourism. This study uses the perspective of empowerment-based small industries to explore the potential of entrepreneurship and the entrepreneurial spirit of the craftsmen in Gianyar district to compete in their business development. This study uses qualitative research methods that involve the researchers in the subjects of the study, to then jointly participatory identifying issues and designing models of empowerment in the form of a program of work that could be done. This study found the role of private secondary institutions named Mitra Bali that facilitate empowerment crafts industry based on the spirit of entrepreneurship. The entrepreneurial spirit is trying developed by the craftsmen under the guidance Mitra Bali is the development of new designs offered by craftsmen to Mitra Bali to be marketed to consumers. Besides, Mitra Bali also provides assistance to the craftsmen to develop their business in the form of funds for the construction of a place of business and event-event promotion of crafts.*

**Keywords:** *empowerment, entrepreneurship, Mitra Bali, small industries, handicrafts*

## ABSTRAK

Usaha kerajinan tangan di Bali menjadi penyumbang pendapatan daerah dan penyerap tenaga kerja yang besar selain tentu saja pariwisata. Penelitian ini menggunakan perspektif pemberdayaan industri kecil berbasis kewirausahaan dengan menggali potensi dan semangat wirausaha dari para pengerajin di Kabupaten Gianyar untuk bersaing dalam pengembangan usahanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan si peneliti dalam subyek penelitiannya, untuk kemudian bersama-sama secara partisipatoris mengidentifikasi persoalan dan merancang model-model pemberdayaan dalam bentuk program kerja yang bisa dilakukan. Penelitian ini menemukan peran dari lembaga menengah swasta bernama Mitra Bali yang memfasilitasi pemberdayaan industri kerajinan tangan berdasarkan semangat kewirausahaan. Semangat kewirausahaan yang coba dikembangkan oleh para pengerajin di bawah binaan Mitra Bali adalah pengembangan desain-desain baru yang ditawarkan oleh pengerajin kepada Mitra Bali untuk dipasarkan kepada para konsumen. Disamping itu Mitra Bali juga memberikan bantuan kepada para pengerajin untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk bantuan dana untuk pembangunan tempat usaha dan ajang-ajang promosi kerajinan.

**Kata kunci:** pemberdayaan, kewirausahaan, Mitra Bali, industri kecil, kerajinan tangan

## PENDAHULUAN

Dalam usaha pemberdayaan perekonomian desa, salah satu industri yang mempunyai pengaruh signifikan untuk dikembangkan adalah industri kerajinan. Secara lebih spesifik, jika dikembangkan di Bali adalah industri kerajinan tangan (*handycraf*). Potensi industri kecil ini sangat besar untuk menggerakkan denyut nadi perekonomian pedesaan dengan melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Di

samping itu melalui industri kerajinan ini sekaligus berusaha melestarikan hasil kesenian budaya bangsa. Dipilihnya industri kecil sebagai industri yang cocok dikembangkan menurut Irsan (1991) adalah industri kecil yang memberi akses untuk bergerak pada dimensi pengembangan usaha yang ditopang sumber-sumber dari lingkungan masyarakat sekitar.

Industri kecil mempunyai target pemasaran yang umumnya berada dalam lingkup domestik yang terbatas. Atas dasar ini

modal yang diperlukan relatif tidak seberapa, sehingga akan memberi peluang kepada para pengusaha kecil untuk mendirikan unit-unit usaha dengan kadar kecanggihan teknik produksi yang mudah dijangkau. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Tobing (1983) bahwa tumbuhnya industri kerajinan rumah tangga mula-mula hanya merupakan suatu pekerjaan sambilan dan kemudian berkelanjutan karena adanya permintaan yang tetap dan menambah penghasilan.

Keberadaan industri kecil kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar berada dalam situasi keterbatasan produksi yang masih menggunakan *hand made* (ketrampilan tangan) dengan permintaan produksi massal untuk ekspor nasional dan internasional. Dengan berbagai kompleksitas persoalan tersebut, industri kecil kerajinan tangan di Bali yang terkenal dengan sentuhan seninya, memerlukan inovasi-inovasi pemberdayaan yang melibatkan secara penuh para pengerajin sebagai subyek program pemberdayaan. Kata kunci semangat kewirausahaan adalah para pengerajin mempunyai inisiatif untuk mengembangkan diri dan usahanya agar terus maju. Dengan demikian, para pengerajin benar-benar akan menjadi sentral pengembangan usahanya dengan kesadaran akan semangat kewirausahaannya.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimana kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh industri kecil kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar Bali? Dan bagaimana upaya meningkatkan pemberdayaan industri kecil kerajinan tangan melalui pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Gianyar Bali?

Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana para pengerajin industri kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar mengembangkan usaha-usaha pemberdayaan ekonomi melalui usaha-usaha kreatif, pengembangan usaha kerajinan berbasis semangat kewirausahaan. Inisiatif kewirausahaan dipercaya menjadi sumber kemajuan usaha dengan mencari peluang-peluang untuk mengembangkan usaha menjadi lebih maju. Dengan memfokuskan kepada semangat kewirausahaan, penelitian ini meletakkan pusat kajian kepada bagaimana aktor-aktor pelaku industri kecil kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar Bali mengenali persoalan yang mereka hadapi untuk kemudian

menyusun program-program pemberdayaan usahanya.

Pentingnya penelitian ini adalah melalui pengembangan kewirausahaan yang menjadi kunci penting untuk mengurangi jumlah penganggur, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomis. Lebih jauh lagi secara politik, meningkatkan harkat sebagai bangsa yang mandiri dan bermartabat. Melalui penelitian ini, para pengerajin industri kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar diajak untuk mengembangkan semangat, sikap, perilaku dan kemampuannya dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Kewirausahaan juga menekankan perspektif bahwa masyarakat, dalam hal ini adalah pengerajin industri kecil, bukanlah obyek yang terus dijadikan sasaran program *top down* dari program-program kerja pemberdayaan ekonomi dari pemerintah dan swasta. Urgensi penelitian ini sejalan dengan perspektif pemberdayaan dan kewirausahaan yang menekankan masyarakat sebagai subyek program dan pusat inisiatif untuk mengembangkan semangat dan usaha-usaha kewirausahaan untuk kemajuan usahanya. Pendekatan ini juga sejalan dengan perspektif ekonomi kerakyatan yang *bottom up* dimana masyarakat memang benar-benar berdaya, bersemangat dan berpikir untuk kemajuan usahanya. Masyarakat dengan demikian akan menjadi subyek langsung yang mengetahui persoalan yang dihadapinya, dan yang lebih penting secara sadar mempunyai semangat dan praktik kewirausahaan untuk mencari peluang-peluang pemberdayaan dan inisiatif untuk kemajuan usahanya.

## **METODE**

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif riset aksi Partisipatif (RAP). RAP adalah kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas/lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya

aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian, RAP tidak berhenti pada kegiatan riset semata, namun berlanjut pada pemberdayaan anggota komunitas secara partisipatif untuk melakukan sejumlah aksi demi perbaikan kondisi hidup mereka sendiri. Selain itu, RAP tidak berhenti pada publikasi hasil riset (laporan) dan rekomendasi pengembangan atau usulan riset berikutnya, melainkan berorientasi pada perubahan situasi, peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat warga untuk memahami dan mengubah situasi mereka menjadi lebih baik.

Singkatnya, RAP sungguh-sungguh mengambil bagian dalam proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian dalam RAP, kegiatan perencanaan adalah sangatlah penting yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan publik atau masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang perencana seharusnya memiliki kemampuan untuk memperhatikan berbagai kepentingan publik, termasuk menguasai berbagai pendekatan pemberdayaan masyarakat (Soetomo, 2003).

Partisipasi observasi dilakukan untuk membangun argumentasi dan teori dari data-data lapangan yang diperoleh si peneliti bersama dengan subjek penelitiannya. Si peneliti menggunakan metode reflektif dengan bersama-sama subjek penelitian membangun pola relasi untuk bersama-sama merumuskan persoalan yang terjadi dan memberikan argumentasinya. Metode penelitian ini tergolong penelitian alternatif (transformatif) partisipatoris yang percaya bahwa kenyataan itu bersifat partisipatif yang diciptakan oleh (hubungan) pikiran dan lingkungan yang ada. Inilah yang disebut dengan “subyektifitas kritis” yang terjadi melalui transaksi partisipatoris kita dengan lingkungan kita (Laksono, 2009). Untuk itu dibutuhkan perubahan sebagai berikut a). Perubahan Obyek Menjadi

Subjek Penelitian, b).Topik penelitian, harus berawal dari isu aktual yang ditemukan di lapangan (grounded research), c).Alur Penelitian dari Bawah ke Atas, d) Penelitian kualitatif, akomodatif antara peneliti dan responden yang diteliti, untuk bekerja sama, saling menghormati, saling bergantung dan saling membantu. Metode yang banyak dikembangkan adalah observasi partisipasi, e). Penempatan pengalaman pribadi sebagai suatu material.

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2012 yang dilakukan di Desa Tegalalang, Desa Sukawati, dan Desa Batuyang Kabupaten Gianyar sebagai sentra industri kecil kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar. Tahap awal penelitian adalah studi pengenalan wilayah yang akan diteliti. Pengenalan wilayah ini kemudian diikuti dengan pemilihan yang lebih tegas dari subjek yang diteliti. Setelah mengenal wilayah yang akan dikaji, kemudian mulai dirancang hal-hal yang diteliti.

Dipilihnya beberapa tempat tersebut adalah representasi dari pemetaan wilayah-wilayah dari tumbuh suburnya industri kerajinan tangan yang menjadi sentral denyut nadi ekonomi masyarakat. Desa Tegalalang menjadi sentra untuk kerajinan tangan dari anyaman bambu dan layang-layang. Sementara Desa Blahbatuh maju dengan kerajinan tangan dari perak, kayu, batok kelapa (tempurung kelapa), bambu, uang kepeng, logam, dan juga patung berbahan kayu. Desa Sukawati yang terkenal dengan Pasar Seni Sukawati-nya memproduksi berbagai jenis kerajinan tangan dari kain prada, baju *barong*, kerajinan dari bambu, logam, uang kepeng serta patung dari kayu.

Setelah pengenalan wilayah riset, tahap selanjutnya adalah penyusunan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan dirumuskan berdasarkan fokus penelitian yaitu mengenai pemberdayaan industri kecil kerajinan tangan melalui pengembangan kewirausahaan. Setelah mendapat informasi yang memadai tentang

data informan, penelitian pun secara langsung dilakukan di lapangan. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (penarikan sampel secara sengaja), dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan.

Pengambilan data tersebut berdasarkan dua bentuk, yaitu data tertulis berupa dokumentasi yang menyangkut subyek penelitian. Data kedua adalah data lisan berdasarkan metode kualitatif. Dalam data lisan, rumusan pertanyaan menjadi penting untuk dapat menghasilkan data yang objektif. Data primer diambil dengan metode FGD (*Focus Grup Discussion*) yang menghadirkan para pelaku industri kecil kerajinan tangan di tiga desa di Kabupaten Gianyar yaitu Desa Sukawati, Blahbatuh, dan Tegalalang secara partisipatoris bersama dengan peneliti mengidentifikasi potensi-potensi kewirausahaan untuk pengembangan industri kecil kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar. Disamping itu juga dilakukan metode wawancara mendalam kepada beberapa pengerajin dan pengamatan terlibat (*partisipan observation*) untuk secara mendalam mengkaji industri kecil kerajinan tangan di

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ni Nyoman Meteri (45) memulai usahanya di bidang kerajinan tangan dengan berjualan di Pasar Seni Sukawati di Kabupaten Gianyar. Metri yang asal Tegalalang membuka art shop kecil-kecilan bermodal usaha sebelumnya dan sedikit bantuan dari orang tuanya. Ia menekuni usaha ini karena saat itu bisnis kerajinan tangan di Bali sedang dalam situasi terbaik di tahun 1980-an. Sejak masih bujang Metri berjualan laris manis dimana para konsumennya adalah tamu-tamu asing. Berbagai jenis kerajinan yang dijualnya di pasar seni yakni yang dominan berupa patung-patung abstrak. Patung-patung inilah yang diminati para tamu

asing yang ia kenal saat berjualan di pasar seni yang kemudian menjadi pelanggannya.

Meteri sendiri mengakui bahwa patung-patung abstrak yang dijualnya adalah buah dari karyanya sendiri dibantu oleh suaminya. Bahan-bahan biasanya ia dapatkan dari tukang-tukang kayu langganannya yang biasanya mengantar langsung ke rumahnya. Jika tidak dapat mengerjakan sendiri pada saat pesanan banyak, ia akan meminta bantuan para pengerajin yang juga tetangganya sendiri untuk membantunya. Ia memang mengkhususkan diri pada kerajinan tangan patung-patung abstrak sesuai dengan keahliannya. Karena kemampuannya dalam mengerjakan patung-patung abstrak dengan terampil itulah membawa Metri kepada Mitra Bali yang memberinya pesanan-pesanan hingga ribuan buah.

Kisah lainnya dituturkan oleh I Ketut Ardita (43) seorang pengerajin kayu di Desa Batubulan Gianyar. Ardita adalah salah satu pengerajin ukiran yang cukup terpendang di desanya. Ia bersama teman-temannya adalah salah satu generasi yang memperkenalkan bahwa menjadi pengerajin kayu sangat menjanjikan untuk sandaran hidup. Ia hidup memang di lingkungan pengerajin ukiran kayu namun situasinya belum seperti semaju sekarang di desanya. Saat ia memulai belajar ukiran bersama 5 orang temannya, di desanya pada awal tahun 1980-an, di desanya hanya terdapat 3 kelompok usaha ukiran rumah tangga. Itupun masih terbilang sangat kecil dengan pengerjaan ukiran-ukiran yang sederhana. Bertekad untuk mengembangkan kemampuannya, sejak kecil Ardita memulai belajar ukiran-ukiran kayu di rumahnya dan mencari kemungkinan untuk belajar ukiran di tempat lainnya.

Sejak kelas 2 SD bersama teman-temannya yang lain dia sudah memegang *paet* (alat untuk mengukir). Sehabis pulang sekolah ia belajar mengukir di salah seorang seniman senior di Desa Guwang,

di desa tetangga. Ia belajar hampir 1 tahun di tempat tersebut dengan belajar membuat patung garuda wisnu dan ukiran-ukirannya. Setelah belajar di Desa Guwang itulah ia memutuskan untuk belajar membantu pesanan-pesanan ukiran kayu. Kebetulan saat itu terdapat kelompok pengerajin yang baru berkembang di dusun tetangga rumahnya yaitu Dusun Dlodrung yang membutuhkan banyak tenaga karyawan untuk menyelesaikan pesanan-pesanan patung garuda. Inilah kesempatan awal Ardita untuk mencari tambahan uang saku. Pulang sekolah ia langsung menghabiskan waktunya untuk mengerjakan patung-patung garuda untuk diselesaikan. Biasanya ia akan mengerjakan ukiran-ukiran garuda seperti yang ia pelajari di Desa Guwang. Dari mengukir inilah ia mendapatkan upah Rp. 500 per patung.

Pekerjaan sebagai tukang ukir garuda tidak selamanya ia lakukan. Saat pesanan sepi karena krisis di pertengahan tahun 1980-an, ia memutuskan untuk menjadi buruh-buruh panen padi di sawah-sawah yang ia lakoni selama 1 tahun. Namun bakat dan keinginannya untuk mengembangkan kemampuannya di bidang ukiran tidak pernah luntur. Ardita berniat untuk meningkatkan kemampuannya dengan belajar ukiran untuk menghias patung garuda dan yang lainnya yang berbahan kayu cendana. Ukiran jenis ini tentu lebih rumit daripada ukiran patung garuda berbahan kayu biasa. Disamping itu kayu cendana juga harganya lebih mahal dibandingkan dengan kayu biasa. Ardita mulai belajar ukiran dari cendana saat kelas 4 hingga 5 Sekolah Dasar. Baru belajar 2 bulan hasil ukirannya sudah dianggap bagus dan bisa untuk mengerjakan ukiran cendana sendiri. Maka sejak saat itulah ia mulai memberanikan diri mengerjakan ukiran cendana.

Bertepatan dengan itu pula kayu cendana sedang naik ke permukaan. Ukiran jenis kayu ini menjadi primadona karena disamping baunya yang harum juga kualitas ukiran-ukirannya bisa bersaing

dengan ukiran yang lain. Ongkos pengerjaan ukiran cendana juga jauh lebih mahal daripada patung kayu biasa. Pada kesempatan yang tepat, pada saat itu ada seorang pengusaha ukiran dari Desa Batuyang yang sedang berkembang menggunakan bahan baku kayu cendana untuk bisnis ukiran patungnya. Saat itu bahan kayu cendana masih didapat dengan muda di desa tetangga Desa Baubulan Kangin. Saat itu sama sekali tidak ada kendala untuk persoalan bahan baku. Kayu cendana datang dan langsung pesanan-pesanan ukiran dikerjakan. Ardita sempat lama menekuni ukiran sebagai buruh pengukir.

Keinginan untuk lebih maju mendorong Ardita untuk mengembangkan usahanya secara mandiri. Ini berarti ia harus membangun proses produksi dari awal dan berani mengerjakan barang secara mandiri tidak dengan bekerja dengan orang lain. Maka sejak menginjak bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ardita memutuskan untuk belajar dari awal dalam pengerjaan kayu cendana yaitu dari *bakalan* (kayu cendana batangan) sebagai bahan awal ukiran. Dengan memulai bekerja mandiri dan mengerjakan dari awal pembuatan patung, Ardita bisa lebih banyak mendapatkan keuntungan.

Permasalahan mulai muncul kondisi kesehatan Ardita tiba-tiba menurun saat mengerjakan ukiran cendana. Itu ia alami sejak menginjak bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Belakangan baru kemudian ia mengetahui bahwa cendana memiliki daya serap yang kuat terhadap tubuh sehingga kondisi tubuh menjadi kalah. Kondisi temannya juga mengalami hal yang sama. Maka Ardita pun memutuskan untuk berhenti menekuni ukiran cendana sejak menginjak bangku SMA.

Bakatnya di bidang seni kemudian mengantarkannya ke pekerjaan sebagai penghias bangunan-bangunan berarsitektur Bali. Ia bersama teman-temannya memiliki kelompok yang mengerjakan ukiran

bangunan Bali secara borongan. Pekerjaan inilah yang menyelamatkan Ardita hingga bisa menyelesaikan sekolah SMA hingga 5 tahun kemudian masih bergelut di bangunan. Namun diakui jujur olehnya bahwa pekerjaan bangunan memang hanya memperoleh keuntungan tipis dipotong biaya hidup sehari-hari.

Ardita kembali memalingkan perhatiannya ke ukiran kayu cendana. Ini diakuinya selain karena keuntungannya lebih besar meski resiko sakit, tetapi juga keyakinannya akan minatnya yang memang lebih besar di kerajinan kayu. Ia kemudian membuat ukiran kayu cendana bakalan dan bisa dijual dengan harga yang mahal. Sampai menikah pada tahun 1999, Ardita tetap menggantungkan hidupnya dari ukiran kayu cendana. Baru kemudian saat umur anaknya menginjak 1,5 tahun, Ardita berpikir untuk mencari alternatif lain dalam mencari pesanan-pesanan yang bisa mendatangkan keuntungan maksimal. Selama ini ia hanya mendapatkan pesanan yang kecil dalam pengerjaan patung-patung garuda dan lainnya dari khusus untuk bahan cendana. Terbersit dalam pikiran Ardita untuk meluaskan bahan pengerjaannya tidak hanya kayu cendana tetapi kayu yang lainnya.

Salah satu faktor yang menghambat pemberdayaan industri kerajinan kecil di Bali dan Indonesia pada umumnya adalah belum terdapatnya manajemen terpadu yang modern untuk mendukung produktifitas dan inovasi produksi. Industri kerajinan kecil pada umumnya belum tertangani secara serius terutama dalam manajemen produksi yang menyeluruh agar menjadi industry kerajinan kreatif yang menopang perekonomian masyarakat. Situasi yang terjadi hingga kini adalah belum tertatanya secara menyeluruh berbagai macam komponen yang menggerakkan industry kecil. Hal yang paling mendasar daripada itu adalah belum tertanamnya manajemen berbasis kewirausahaan yang sebenarnya adalah pondasi dasar penggerak industri kecil dan

menengah. Manajemen berbasis kewirausahaan adalah kesadaran dan praktik pengelolaan usaha berbasis kemandirian dan mengoptimalkan potensi diri serta lingkungan sekitarnya. Kewirausahaan merujuk kepada kemandirian untuk mengembangkan diri dan usaha untuk menghasilkan langkah-langkah inovatif.

Industri kerajinan dan industri kreatif secara keseluruhan sangat membutuhkan pengelolaan manajemen kewirausahaan. Industri kerajinan tangan yang menjamur di Kabupaten Gianyar menghadapi beragam persoalan serius terkait dengan permodalan, pemasaran, dan inovasi-inovasi produksi kain tenun cepuk sendiri. Sebagai usaha kerajinan tangan, daya serap tenaga kerja sebenarnya sangatlah besar. Banyak penduduk pedesaan yang masih menyandarkan hidupnya kepada industri kerajinan ini. Namun persoalan pemasaran kerajinan tangan ini tetap saja menjadi persoalan yang tidak dikembangkan secara maksimal. Beragam persoalan yang dihadapi industri kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar ini menunjukkan situasi yang membutuhkan terobosan terutama menyangkut cara berpikir yang holistik untuk menanganinya. Berbagai persoalan terkait dengan permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, inovasi produk membutuhkan penanganan manajemen yang berspektif kewirausahaan.



Salah satu karya patung-patung abstrak dari Ni Nyoman Metri. (foto: Luh Sayang Telagawathi)

Pengerajin industri kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar belum bisa mempraktikkan semangat kewirausahaan tersebut dengan dari awal. Mereka masih terkendal permasalahan dana sebagai modal awal usahanya. Hal lainnya tentu saja terkait di dalamnya yaitu pemasaran dan juga bahan baku yang terangkai menjadi rangkaian persoalan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Padahal di sisi lain semangat dari para pengerajin untuk mengembangkan usahanya secara mandiri sangatlah besar.

Penuturan dari Ni Wayan Sudi mencerminkan itu semuanya. Sudi hingga kini hanya bisa mengerjakan pesanan-pesanan yang datang kepadanya tanpa berpikir untuk mengembangkan usahanya. Keuntungan yang didapatnya hanya cukup untuk memutar usahanya sementara modal yang ia dan suaminya miliki tidak mencukupi untuk mengembangkan usaha kerajinan perak ini lebih jauh. Sudi secara terus terang mengatakan tidak tahu langkah apa yang akan dilakukannya untuk mengembangkan usahanya. Yang ada dalam pikirannya kini adalah mendapatkan pesanan dan memperoleh uang untuk membayar karyawannya dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Sudi yang menyebut usahanya sebagai usaha rumahan ini mengaku tidak mempunyai modal untuk membeli perak dan membuat barang-barang yang bisa dijual sendiri secara mandiri. Sebenarnya banyak sekali desain-desain yang telah ia pikirkan untuk kemudian dia seskali di waktu senggang membuat desain-desain produk perak. Semua telah terpikirkan olehnya. Namun lagi-lagi kendala yang dihadapi adalah sangat kurangnya modal untuk mendukungnya. Modal yang dimaksud adalah untuk pembelian bahan baku berupa perak. Sudi membayangkan lebih jauh adalah mengadakan pameran-pameran produk kerajinan peraknya di tingkat nasional maupun internasional.

Namun, itu semua seperti mimpi baginya. Terang saja karena untuk semua itu memerlukan modal yang besar dan juga jaringan pemasaran yang luas.

Kendala lainnya dalam mengembangkan kemandirian dengan semangat kewirausahaan diungkapkan oleh I Ketut Ardita dengan gamblang. Ardita menuturkan bahwa kendala paling besar yang dihadapi para pengerajin industri kecil khususnya pengerajin kayu adalah modal. Permasalahan ini bagi Ardita bagaikan benang kusut yang sulit dicarikan jalan pemecahannya. Pernah suatu ketika Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar membuat program merangsang para perajin untuk membuat desain-desain patung. Namun arah dan maksudnya tidak terarah. Para petugas dari Dinas Perindustrian memberin untuk membuat desain-desain patung namun sama sekali tidak ada bantuan berupa modal atau tempat pemasaran yang akan disasar. Inilah yang menjadi kekecewaan bagi para pengerajin ketika sama sekali tidak adanya jalan pemecahan bagi permasalahan yang dihadapinya. Pemerintah dalam konteks pemberdayaan industri kecil ini hanya bisa membuat program-program jangka pendek tanpa adanya solusi jangka panjang.

Penanganan permasalahan industri kerajinan tangan menurut Ardita harus secara menyeluruh. Salah satu harapan tersebut ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Selama ini program-program yang dilakukan tidak menyeluruh dan menyelesaikan permasalahan sampai ke akar-akarnya. Misalkan saja persoalan permodalan ditangani dengan memberikan modal jadi tanpa mengajak seniman untuk mempunyai mempunyai semangat untuk mencari sendiri modal tersebut. Kondisi ini mengakibatkan seniman menjadi tergantung kepada uluran modal dari pemerintah dan menjadikan modal sebagai topeng untuk mematikan semangat kemandirian dan kewirausahaannya.

Modal awal untuk pembuatan patung yang disarankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut mencapai Rp. 25 juta dari mulai pembelian bahan hingga penyelesaian akhir. Untuk membuat patung sendiri yang bisa dijual sendiri tentu mustahil bagi Ardita. Walaupun pemerintah terkendala dengan jumlahnya modal yang dibutuhkan oleh masing-masing pengerajin, hal lain yang bisa dilakukan adalah menyiapkan jaringan pemasaran dan program bantuan lainnya untuk membina pengerajin agar mandiri dan mengembangkan usahanya. Hal itupun sangat sulit didapatkan oleh para pengerajin. Maka situasi kompleks penanganan industri kerajinan tangan inipun tidak pernah selesai hingga kini, termasuk juga yang dialami oleh Ardita.

Saat ini selain jaringan pemasaran alternatif yang dikembangkan oleh industri menengah yang menjadi perantara antara pengerajin dan konsumen, pasar-pasar seni juga telah jenuh dan penuh sesak. Ardita mengungkapkan bahwa kondisi pasar seni sekarang sangat tidak kondusif khususnya bagi pengerajin karena koleksi barang-barang yang ditawarkan itu-itu saja dan tidak ada perubahan. Walaupun ada penambahan biasanya terjadi secara massal. Disamping itu peluang untuk memasarkan hasil produksi sangat sedikit di tengah persaingan di antara pedagang yang semakin ketat.

Pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebenarnya telah membangun kontak dan melakukan langkah-langkah dalam membantu pengerajin dengan berbagai cara. Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar sebenarnya telah memberikan bantuan berupa peralatan-peralatan kerajinan kayu kepada kelompok-kelompok pengerajin yang ada di Gianyar. Ardita misalnya merasakan bantuan mesin *pengamplasan* dan alat open bagi kelompoknya di Desa Batuyang. Namun tetap saja bantuan yang diberikan

pemerintah hanya dapat menysasar sebagian kecil dari para pengerajin dan kelompok-kelompok yang ada. Dasar bantuan juga sangat tidak mendidik para pengerajin karena hanya memberikan bantuan setelah itu pergi tanpa pendampingan dan pembinaan bagaimana jalan yang bisa ditempuh secara mandiri oleh para pengerajin.

Ardita mengisahkan, pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sama sekali tidak memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan permodalan dan pembinaan kelompok secara berkelanjutan. Pemerintah sebenarnya bisa dengan maksimal untuk melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan dengan mencari jalan-jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi para pengerajin. Namun yang terjadi sampai saat ini dalam situasi industri kecil di Bali adalah sangat lemahnya kelompok-kelompok pengerajin. Memang banyak sekali terdapat kelompok-kelompok pengerajin industri kerajinan tangan, namun dalam praktiknya kelompok-kelompok pengerajin ini tidaklah berjalan secara solid. Anggota dalam kelompok-kelompok berjalan sendiri-sendiri. Biasanya siapa yang mendapatkan order akan mengerjakan sendiri dengan alasan keuntungan. Ini kenyataan yang terjadi di lapangan.

## SIMPULAN

Kondisi usaha kecil dan menengah di Bali, khususnya industri kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar, sangatlah tergantung kepada usaha pemecahan permasalahan permodalan dan pemasaran. Kedua permasalahan ini adalah permasalahan mendasar dalam penanganan industri kecil dan menengah. Permasalahan ini tidak akan pernah terselesaikan jika tidak ada sinergi antara pemerintah, swasta, pelaku pariwisata, dan

sudah tentu pengerajin dan kelompok pengerajin itu sendiri.

Inisiatif dan kreatifitas dari para pengerajin sendiri yang akan merubah nasibnya adalah semangat dari jiwa kewirausahaan dan kemandirian yang seharusnya dimiliki oleh para pengerajin. Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa kreatifitas pengerajin dalam pembuatan-pembuatan desain baru serta usaha mereka untuk mencari bahan hingga memasarkan sendiri produk mereka adalah hal yang sangat menjanjikan untuk mengembangkan kemandirian industry kerajinan tangan. Dalam usaha mengembangkan kemandirian, para pengerajin memerlukan bantuan lembaga menengah swasta yang memiliki komitmen dalam pemberdayaan industry kecil kerajinan tangan sembari terus melakukan usaha-usaha menanamkan semangat kewirausahaan di dalamnya.

Penelitian ini menemukan bahwa lembaga Mitra Bali memainkan peranan strategis itu sebagai fasilitator dalam memberdayakan para pengerajin dan mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Pengerajin dimotivasi untuk terus menghasilkan desain-desain produk kerajinan tangan, memasarkan produk mereka ke manca negara, dan secara terus-menerus mencarikan jalan kegiatan promosi-promosi di dalam dan di luar negeri untuk produk kerajinan-kerajinan mereka. Mereka dibebaskan untuk menerima pesanan dari pihak lain asalkan tidak menggunakan desain yang telah digunakan di Mitra Bali. Pengerajin juga dimotivasi untuk menghasilkan produk-produk kerajinan yang berkualitas agar bias bersaing dengan pasar produk kerajinan tangan di dunia. Kondisi ini tentu sangat kondusif dirasakan oleh pengerajin untuk terus mengembangkan usaha mereka. Namun untuk langkah kedepan sinergi berbagai pihak (pemerintah, swasta, pelaku pariwisata, dan pengerajin sendiri) dalam memberdayakan industry kerajinan tangan sangatlah penting dikembangkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ditha, Asthariani. 2011 . *Fair Trade Jalan bagi Produsen Termarginalkan*, balebengong.net, 22 Mei 2011
- Failyani, Farida Hydro dkk, 2009. Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Pembangunan (Studi Kasus Perempuan di Desa Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara), *Jurnal Wacana* Vol. 12 No. 3 Juli 2009.
- Hariyati, Dr. Ratih, Penerapan Model Strategi Pemasaran Usaha Kecil Berbasis Web 2.0 sebagai Upaya dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil, *Jurnal UPI*, Tahun 11 No. 11 2011.
- Irsan A.,S.1991. *Industri Kecil, Sebuah Tinjauan Perbandingan*, Edisi II, LP3ES, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat". Bahan Kuliah SP 605 Program Pascasarjana ITB 1 Desember 2003.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. "Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan" Makalah yang disajikan dalam Studium Generale dengan topik "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia", di STIE Kerja Sama, Yogyakarta, 18 Nopember 2000.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, Kebijakan)*, Yogyakarta:

- Akademi Manajemen YKPN  
Yogyakarta.
- Laksono, P.M. 2009. "Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi Kapital". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Marijan, Kacung, 2005. Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Kluster, *Jurnal INSAN* Volume 7 No. 3 Desember 2005.
- Mubyarto. 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Medya, Yogyakarta.
- Munizu, Musran, 2010. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 12 No. 1, Maret 2010 hlm. 33-41.
- Ningsih, Tri Wahyu Rejeki, 2004. Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil dalam Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol. 1 No. 2 Desember 2004, hlm. 125-136
- Pahlezi SE.M.Si, Dr. Reza. 2006. "Strategi Penumbuhan Wirausaha Baru" dalam *Jurnal Infokop* No. 29 Tahun XXII.
- Saefullah, Asep Ahmad. 2007. "Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Provinsi Bali dan Sulawesi Utara" Makalah ini merupakan ringkasan dari laporan penelitian tentang "Pengembangan UKM di Indonesia" yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2007.
- Sumidi. 2004. Pemberdayaan Industri Bordir di Kabupaten Kudus dalam *Jurnal Dialogue JIAKP* Vol. 1, No. 2, Mei 2004. Hlm. 335-350.
- Sumodiningrat, Gunawang. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soetomo, Sugiono, 2003. Riset Aksi Partisipatif sebagai Pemberdayaan dalam Pengembangan Pendidikan Perencanaan, *Jurnal Tata Kelola*, Jurusan Planologi Universitas Diponegoro Semarang Vol. 5 No. 2 Agustus 2003.
- Tambunan, Tulus, 1994. Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil dan Rumah Tangga di dalam Perekonomian Regional: Beberapa Indikator, *Jurnal Agro Ekonomika* No. 1 Thn. XXIV, Yayasan Agro Ekonomika, Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 1989. "Mengapa Industri Kecil Penting bagi Indonesia". *Harian Suara Pembaharuan*, 12 Desember.
- Telagawathi, Ni Luh W. Sayang, 2011. "Model Pemberdayaan Kain Tenun Cepuk di Nusa Penida, Klungkung Bali", Laporan Penelitian Hibah Bersaing DIKTI 2011.

Tjokrowinoto, M. 1993. *Politik Kabupaten Gianyar dalam Jurnal Pembangunan: Sebuah Analisi, Konsep, Arah dan Strategi*. PT Tiara Wacana, Yogyakarta.

Yaumidin, Umi Karomah. 2003. *Strategi Perencanaan Pembangunan Ekonomi*

## **KELUARGA-KELUARGA DI PEDESAAN PINGGIRAN SELATAN JAKARTA 1904-1960**

**Arief Hidayat, Januar Barkah, Huddy Husin**

Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan ariefhidayat1610@gmail.com, Januar\_link@yahoo.com, hudi0212@gmail.com  
Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI

### ***ABSTRACT***

*This paper attempts to give a description of the history of social history in Jakarta by emphasizing the focus on the study of family history (prosopography). The study of family history in general it can be said they have not received significant attention from historians and observers of history (amateur historian). As expressed by Kuntowijoyo (2003), that in order to understand the social history in units are quite concrete, this emphasis on micro-society institutions that families need to be given special attention. Jakarta is a region located on the seashore of the northern coast of Java, which has a population that is high enough (if translated in general) have quite a lot of families who settled the center, nor the outskirts of Jakarta in the early 20th century, until the 1960s. The existence and dynamics of families that are the focus of this paper, regarding the response, adaptation and direction of development. By borrowing the concept of center and periphery in the postmodernist studies, this paper attempts to analyze the course of social history in Jakarta, especially the region of the southern outskirts of Jakarta.*

**Keywords :** *Families, southern Jakarta.*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini mencoba memberikan deskripsi sejarah mengenai sejarah sosial di Jakarta dengan menekankan fokus terhadap kajian sejarah keluarga (prosopografi). Kajian mengenai sejarah keluarga secara umum dapat dikatakan masih belum mendapat perhatian yang cukup besar dari sejarawan maupun pemerhati kajian sejarah (sejarawan amatir). Seperti yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2003), bahwa untuk memahami sejarah sosial dalam satuan yang cukup konkret, penekanan terhadap pranata mikro masyarakat yakni keluarga perlu diberikan perhatian khusus. Jakarta adalah wilayah yang berada dipesisir pantai utara Jawa, yang memiliki populasi yang cukup tinggi (jika diterjemahkan secara umum) memiliki cukup banyak keluarga-keluarga yang bermukim dipusat, maupun dipinggiran kota Jakarta di awal abad 20, hingga tahun 1960-an. Keberadaan dan dinamika keluarga-keluarga inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini, mengenai respon, adaptasi dan arah perkembangannya. Dengan meminjam konsep pusat dan pinggiran dalam kajian postmodernis, tulisan ini mencoba menganalisis jalannya sejarah sosial di Jakarta, khususnya di wilayah pinggiran selatan Jakarta.

**Kata kunci :** Keluarga-Keluarga, Selatan Jakarta.

## PENDAHULUAN

Perluasan aspek geografis kota Batavia diawal abad ke-20, tepatnya setelah kota Batavia ditetapkan menjadi *Gemeente* oleh pemerintah kolonial<sup>46</sup>, tidak hanya memberikan pengaruh dalam aspek politik dan ekonomi saja, akan tetapi juga turut memberikan pengaruh kepada segi-segi lainnya seperti dinamika sosial dan budaya. Peningkatan aktivitas ekonomi yang disertai dengan semakin menguatnya keberadaan Batavia sebagai pusat politik-pemerintahan di Hindia-Belanda, menjadi kota Batavia sebagai daerah tujuan utama para pendatang yang berasal dari dalam dan luar Nusantara. Kedatangan para pendatang urban ini tidak hanya berlaku temporal dan juga tidak hanya dilandasi oleh motif ekonomis semata, akan tetapi juga memiliki motif-motif sosial-budaya seperti : pendidikan, perpindahan tugas dipemerintahan kolonial, motif keagamaan dan lain sebagainya.

Keberadaan kedatangan para penduduk urban, mau tidak mau memberikan konsekuensi berupa penataan kebijakan tata ruang kota. Wilayah utara Batavia yang ditetapkan sebagai pusat niaga dan administrasi pemerintahan, kemudian mendorong pembukaan lahan diwilayah selatan Batavia sebagai wilayah pemukiman penduduk<sup>47</sup>. Kedatangan para penduduk urban disekitar wilayah timur Batavia dan selatan Batavia, tidak hanya memberikan pengaruh berupa pertambahan demografi dikedua wilayah tersebut, akan tetapi juga memberikan

---

Otonomi Daerah Hindia-Belanda 1903-1940, 1998. ANRI

Wilayah utara tempat niaga dan adminitrasi pemerintahan, wilayah timur cornelis sebagai daerah perkebunan, wilayah selatan sebagai daerah pemukiman penduduk orang-orang eropa. Terbentuknya locus-locus baru sebagai kantung -kantung penduduk disekitar daerah -daerah terluar Batavia, menunjukkan kepada kita tidak hanya kemampuan pemerintah kolonial dalam mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan, akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah kolonial karena wilayah Batavia dikelilingi oleh daerah -daerah yang belum memiliki kepadatan penduduk yang tinggi (masih jarang penduduk).

saling-silang budaya dan pengaruh-mempengaruhi dalam system nilai serta falsafah hidup. Hal ini dapat dilihat dari perubahan aspek mentalitas masyarakat asli setempat dan perubahan prilaku para pendatang diwilayah tersebut<sup>48</sup>.

Perubahan pola penguasaan pemerintah kolonial dari kebijakan perdagangan menuju penguasaan dan produksi tanaman komoditi perdagangan, memberikan pengaruh berupa penataan baru masyarakat kolonial, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya terampil dalam kehidupan agraria, tetapi juga dipersiapkan menjadi aparatur pemerintahan kolonial. Semangat tersebut yang kemudian melahirkan kebijakan politik Etis, dimana implikasi kebijakan tersebut sangat luas, masyarakat memiliki kesempatan masuk ke dunia pendidikan, bekerja, berorganisasi dan berparlemen (Amini dalam Kota-kota di Jawa: identitas, gaya hidup dan permasalahan sosial, 2010: 109).

Kesempatan untuk mengecap dunia baru (modernisasi) tidaklah disia-siakan oleh para anak-anak pribumi (meskipun akses tersebut masih dalam jumlah yang sangat terbatas), hal ini dilakukan karena memang pada awal abad ke-20 terjadi perubahan besar-besaran di Hindia-Belanda dalam konteks sistem sosial dan mata pencaharian masyarakat kota dan wilayah pinggiran kota (profesi)<sup>49</sup>. Menurut

---

<sup>48</sup> Kebangunan agama menjadi semakin bertambah kuat menjelang awal abad ke -20, hal tersebut dapat dilihat dengan keberadaan warga Arab (timur tengah) disekitar wilayah *mister cornelis*, hingga menuju wilayah Condet. Selain itu keberadaan pos -pos pemerintahan kolonial seperti pos pengamanan polisi KNIL di daerah tanjung timur, jalan raya *postweg* disekitar tanjung barat, sekolahsekolah seperti sekolah Desa Putra disekitar wilayah Lenteng Agung, memberikan implikasi

berupa masuknya pendidikan dan pengajaran yang bergaya barat, dimana hal ini sedikit demi sedikit menggusur pola pendidikan tradisional masyarakat pribumi sekitar daerah tersebut. Dalam dinamika tersebut lahirlah kelompok intelektual, yang pada masa itu populis disebut kelompok *priyayi*.

<sup>49</sup> Penjelasan mengenai perubahan sistem sosial dan profesi (mata pencaharian) di Hindia - Belanda, awal abad ke -20, dapat

Widya Fitraningsih (dalam kota-kota di Jawa: identitas, gaya hidup dan permasalahan sosial, 2010: 88) Perubahan orientasi hidup masyarakat perkotaan yang mulai meninggalkan keterikatannya dengan tanah (sebagai alat produksi dan bertahan hidup) rupa-rupanya sudah menjadi paradigma baru, dan melibatkan diri kedalam sektor industry serta jasa menjadi semacam trend hidup hingga menjelang berakhirnya penguasaan pemerintahan kolonial Belanda<sup>50</sup>.

Berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda, yang kemudian digantikan oleh pemerintahan imperium Jepang pada pertengahan tahun 1942 menjadi babak baru perubahan sistem sosial, ekonomi dan politik di Indonesia, khususnya dikota-kota besar seperti Batavia<sup>51</sup>. Setelah pemerintahan militer Jepang berkuasa, banyak para pemuda pribumi, khususnya yang berasal dari pinggiran kota dan pedesaan banyak yang diwajibkan oleh militer Jepang untuk menjadi prajurit militer, hingga pasukan semi militer. Pada titik inilah kita dapat melihat transisi atau gradasi dalam sejarah perkembangan kehidupan sosial masyarakat kota dan pinggiran kota, khususnya pada konteks pola asuh anak. Perubahan paradigma, pola hidup dan falsafah berfikir masyarakatnya, menurut tim peneliti dapat dilihat dari jenis-jenis lembaga pendidikan yang menjadi rujukan bagi orang tua untuk memberikan pendidikan

---

semakin dimengerti melalui penjelasan Heather Sutherland dalam disertasinya "Terbentuknya sebuah Elite Birokrasi". Beberapa jenis profesi sebagai pegawai pemerintahan (*beemstaa d*), pegawai swasta, wartawan/ jurnalis, buruh industry berat, mantri (juru suntik), guru, pekerja entertainment, dan lain sebagainya.

<sup>50</sup> Mengenai hal ini dapat dipahami lebih lanjut melalui penjelasan Prof. Djoko Soekiman dalam bukunya "Kebudayaan Indis".

Prof. H.J. Benda dalam bukunya "Bulan Sabit dan Matahari Terbit", menjelaskan bahwa setelah gerakan 3A di Batavia, banyak elite ulama diundang oleh pemerintahan militer Jepang ke Hotel *Des Indies* di Batavia selama tiga hari untuk berpartisipasi bersama pemerintah militer

Jepang, menyusun sebuah roda pemerintahan baru pasca berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda.

formal bagi anak-anaknya<sup>52</sup>. Disisi yang lain orientasi harapan orang tua, dan pendidikan formal yang diberikan kepada anak, akan pula memberikan perbedaan penanganan/ pola asuh anak antara anak laki-laki dengan anak perempuan dimasing-masing keluarga.

Setelah Indonesia merdeka perubahan-perubahan mendasar yang terjadi selama masa penjajahan dalam aspek sosial-budaya hingga ekonomi dan politis, memberikan pengaruh yang cukup besar bagi keluarga-keluarga yang hidup di daerah Jakarta dan pedesaan pinggiran Jakarta. Dinamika dan interaksi sosial-budaya yang terjalin antara masyarakat kota Jakarta yang bercirikan masyarakat urban, dengan masyarakat desa-desa dipinggiran Jakarta merupakan fokus tersendiri yang menarik minat tim peneliti untuk mengkajinya. Tema mengenai pola asuh anak dalam periode kolonial dan setelah merdeka menjadi aspek yang akan diberikan penekanan lebih sebagai upaya untuk memahami sejarah sosial pedesaan, dimana keluarga merupakan satuan yang konkret dalam lingkungan desa yang belum banyak mendapat perhatian<sup>53</sup>.

## PEMBAHASAN

### Landscape Geografis dan Situasi Ekonomi Jakarta Awal Abad ke-20

Sebagai sebuah daerah yang berada di pesisir dan berdekatan dengan daerah-daerah pedalaman yang memiliki wilayah yang subur, Jakarta kemudian muncul sebagai semacam daerah pengumpul hasil-hasil bumi yang berasal dari daerah pedalaman. Secara umum letak geografis Jakarta berada antara 106° 22' 42" BT sampai dengan 106 58'18" BT, dan antara 5° 19'12" LS sampai dengan 6° 23'54" LS. Daerah Jakarta diapit oleh daratan disebelah barat, timur dan selatan, dan laut

---

<sup>52</sup>Menurut Paolo Freire, hubungan antara harapan, dan jenis pendidikan pada masyarakat kota menjadi semacam gejala yang inheren dengan perkembangan masyarakat modern. Gejala tersebut dipahami sebagai perubahan paradigma masyarakat, sejalan dengan perubahan nilai - nilai sebagai akibat berjalanya sistem ekonomi yang berciri kapitalistik.

Kuntowijoyo, "Metodologi Sejarah", 2003, hal. 82.

disebelah utara. Disebelah barat daerah Jakarta bersebelahan dengan daerah Banten, sebelah selatan Jakarta berbatasan langsung dengan wilayah Depok, sementara itu di sebelah timur Jakarta berbatasan dengan daerah Bekasi dan di utara berbatasan dengan laut Jawa.

Keadaan morfologis Jakarta secara umum tersusun atas daratan aluvial yang dihasilkan oleh endapan tanah dari sungai Ci Liwung, Kali Bekasi dan Sungai Cisadane. Endapan tanah tersebut kemudian membentuk *aluvial fan* (kipas), semua endapan tanah tersebut berasal dari Gunung Salak dan Gunung Gede, yang kemudian bermuara di daerah dataran rendah Jakarta selama berabad-abad. Tanah dengan jenis aluvial tersebut memiliki unsur hara yang bagus dan, merupakan tanah yang cukup baik untuk membangun mata pencaharian melalui pertanian dan perkebunan. Upaya untuk membangun mata pencaharian pertanian dan perkebunan di wilayah Jakarta juga di dukung oleh keadaan iklim Jakarta yang bersifat hujan hutan tropis, dengan curah hujan rata-rata pertahun mencapai 1.857 mm dibagian utara Jakarta dan 3.167mm di bagian selatan Jakarta. Dengan keadaan demikian maka tidaklah mengherankan jika Jakarta merupakan kota yang diberikan kelimpahan sumber daya air yang cukup besar.

Keberadaannya dipesisir laut Jawa yang notabene sebagai jalur pelayaran nusantara membuat Jakarta (Batavia) saat itu menjadi salah satu wilayah transit perdagangan, kemudian tiga sungai besar yang mengalir di wilayah Jakarta menjadi denyut nadi jalur transportasi air yang menghubungkan Jakarta dengan daerah-daerah pedalaman di Jawa Barat yang banyak menghasilkan produk-produk hasil bumi. Dengan bermodalkan pelabuhan dan hubungan ditopang oleh sarana transportasi air kewilayah pedalaman Jawa Barat, maka sekiranya tepat jika kemudian Jakarta muncul sebagai sebuah wilayah yang cukup mumpuni dalam aspek sosial-ekonomi dan politik. Keadaan lingkungan geografis tersebut yang kemudian membangun kesadaran dari masyarakatnya mengenai posisi kota Jakarta terhadap keberadaan daerah-daerah lainnya yang dapat menjadi penyangga bagi keberlangsungan kota Jakarta dan sebagai fasilitator bagi daerah pedalaman untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Kedatangan bangsa asing kedalam wilayah Jakarta, khususnya setelah VOC menguasai

Batavia secara utuh melalui perjanjian yang dilakukan dengan Mataram 1677, Cirebon 1681 dan Banten 1684, membuat aktivitas ekonomi dan perdagangan semakin menguat di wilayah Jakarta. Penguatan sendi-sendi aktivitas ekonomi tersebut memberikan implikasi berupa kedatangan para urban yang berasal dari Jawa dan migran-migran luar pulau Jawa, dengan beragam motivasi, akan tetapi tetap didukung oleh motif-motif ekonomi. Bondan Kanumuyoso (dalam kata pengantar Castles, 2007: xvii) menjelaskan bahwa Batavia memasuki pertengahan abad ke-17 selain diisi oleh orang-orang Belanda dan kelompok Mestizo, juga mulai didatangi oleh para prajurit pribumi dari berbagai daerah Nusantara yang pernah dan masih bertugas dalam dinas kemiliteran VOC, kemudian para budak dan bekas budak yang didatangkan dari dalam Nusantara seperti Makasar, Bali, Timor, Sumbawa dan luar Nusantara yang berasal dari pantai Coromandel dan Bengal India. Diluar itu para migran lainnya berasal dari China dan Arab yang tertarik dengan kemajuan ekonomi di Batavia, sementara itu orang-orang Jawa juga turut berdatangan dalam jumlah yang besar.

Populasi penduduk di Batavia semakin membesar jumlahnya memasuki tahun 1900 hingga tahun 1930 tercatat bahwa jumlah populasi meningkat hingga tiga kali lipat dan mencapai angka 435.000 penduduk di Batavia termasuk daerah *Weltevreden*, yang dikarenakan tingkat migrasi yang terus membanjiri daerah Batavia (Blackburn, 2011: 124). Pertambahan jumlah penduduk di Batavia memasuki awal abad ke-20 tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan mengenai perluasan kota Batavia dan penggunaan lahan yang berkaitan dengan penataan kota, guna menampung dan mengakomodir dinamika dan perubahan sosial dari masyarakat Batavia.

Berkaitan dengan perluasan kota, setelah Batavia menjadi *Gemeente* ditahun 1905, pada tahun 1926 kota Batavia tercatat memiliki luas sekitar 182 km<sup>2</sup>, dan belum memasukkan wilayah Meester Cornelis kedalam wilayah Batavia. Baru kemudian pada tahun 1935 wilayah Meester Cornelis dimasukkan kedalam wilayah Batavia. Secara berturut dan bertahap terjadi perluasan kota Jakarta setelah Indonesia merdeka, tercatat pada tahun 1950 luas Kota Praja Jakarta Raya mencapai 530 km<sup>2</sup>, tahun

1967 adalah 590,11 km<sup>2</sup>, dan pada tahun 1978 luasnya menjadi 654,90<sup>2</sup> km (Gunawan dalam Abdullah dan Abdurrachman, 2011: 110; Blackburn, 2011: 124; Castles, 2007: 19).

Kebijakan awal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda memasuki awal abad ke-20 ialah dengan memperbaiki fasilitas kota, salah satu diantaranya yang paling utama adalah sistem transportasi, karena sistem transportasi menjadi kunci bagi pengembangan kota. Keberadaan transportasi inilah yang dapat menghubungkan antara daerah Batavia dengan daerah pedalaman. Pembangunan sarana transportasi tidak hanya menjadi sekedar alat penghubung bagi Jakarta dan pemindahan orang dan barang, akan tetapi terdapat makna simbolik didalamnya. Seperti yang dijelaskan oleh Basundoro (2011: 182) bahwa jalan tidak lagi hanya sekedar infrastruktur, namun juga sebagai area untuk mempertontonkan kekuasaan, gaya hidup, kekayaan dan bahkan dalam waktu yang bersamaan juga untuk meminggirkan kelompok-kelompok tertentu yang kalah dalam persaingan.

Pembangunan jalan sebagai penghubung daerah di Batavia dengan daerah-daerah diluar Batavia, tidak terlepas dari upaya liberalisasi ekonomi di Hindia-Belanda yang dimulai sejak tahun 1870 dan mencapai puncaknya pada tahun 1910, dimana terdapat 326 buah korporasi yang beroperasi di seluruh wilayah Hindia-Belanda, perkembangan selanjutnya berkaitan dengan korporasi di Hindia-Belanda cukup meningkat, pada tahun 1913 terdapat 1.809 perusahaan yang bergerak disegala bidang di Hindia-Belanda, dengan komposisi wilayah 1.742 perusahaan beroperasi di pulau Jawa dan 167 korporasi berada diluar Jawa (Campo dalam Lindblad, 2002: 87; Basundoro, 2011: 171).

Kemunculan korporasi-korporasi bisnis yang beroperasi di Pulau Jawa khususnya di wilayah Batavia yang semakin meningkat, maka tidaklah semakin mengherankan jika kemudian kota-kota besar seperti Jakarta, Cirebon, Semarang dan Surabaya yang berada di sepanjang pesisir pantai utara Jawa, merupakan kota-kota yang dibangun oleh kolonial dalam kerangka menunjang kepentingan ekonomi dan bisnis kolonial. Keadaan ini yang semakin menegaskan, khususnya bagi Jakarta dimana sektor perdagangan dan bisnis merupakan kunci bagi

pengembangan kota, maka dari itu pengembangan kota baik infrastruktur dan suprastruktur kota mengikuti perkembangan dan irama dari naik turunnya denyut nadi ekonomi kota.

Pembangunan jalan merupakan mata rantai utama dalam melakukan eksplorasi dan pengembangan kota Jakarta, pembangunan jalan juga menjadi semacam magnet yang diperuntukkan bagi menarik minat investasi bisnis. Pembangunan jalan pula yang kemudian difungsikan untuk memudahkan hilir mudiknya pengangkutan barang-barang komoditi perdagangan dari daerah pedalaman menuju pelabuhan yang terletak di sebelah utara Jakarta.

### **Pola Umum Pengasuhan Anak di Jakarta**

Jakarta atau dahulu pada masa kolonial disebut dengan nama Batavia, adalah sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan dan perputaran ekonomi di wilayah utara pesisir pulau Jawa. Kota Jakarta juga banyak disebut oleh para ilmuwan, khususnya dalam rumpun ilmu sosial-humaniora, sebagai sebuah kota yang menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya multi etnis. Jadi tidaklah terlalu berlebihan jika kita katakan Jakarta sebagai kota di pulau Jawa yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya pluralisme (diluar dari kontradiksi dan konflik-konflik sosial budaya yang inheren dalam perkembangan kesejarahannya).

Kata-kata seperti persilangan, asimilasi, percampuran dan lain sebagainya merupakan sebuah fenomena yang cukup lumrah, atau dapat pula dikatakan sebagai hal yang biasa terjadi di kota Jakarta. Dimana semua itu dapat kita saksikan dalam setiap produk-produk mentalitas, maupun artefak kota Jakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Susan Blackburn dalam bukunya 400 tahun Jakarta, seorang Belanda menggunakan pakaian yang menyerupai penduduk pribumi (pakaian saat dirumah) dengan menggunakan baju tanpa tertutup rapi seperti layaknya orang-orang Belanda, dan menggunakan sarung sebagai penutup bagian bawah tubuhnya.

Sejatinya cukup banyak hal-hal yang menggambarkan terjadinya persilangan sosial dan budaya yang terjadi dikota Batavia, akan tetapi contoh yang telah diberikan sebelumnya

dapat menjadi penegas bahwa kota Batavia atau Jakarta menjadi tempat bertemu dan berkembangnya lebih dari satu kehidupan sosial dan budaya. Keadaan ini tentu saja memberikan pengaruh yang unik bagi tumbuh dan kembang kehidupan masyarakat di kota Jakarta. Pada era kolonial dimana pusat kota Jakarta disatu sisi sebagai *centrum* utama kekuatan ekonomi dan politik kolonial bagi masyarakat pendatang, disisi lain berhadapan dengan kelompok masyarakat pribumi yang hidup diluar pusat kota Jakarta. Keadaan ini akan memberikan perbedaan, bahkan mungkin klak akan terjadi gradasi dari klasifikasi pola hidup antara masyarakat yang hidup di pusat kota Jakarta, dengan masyarakat yang berada di wilayah pinggiran Batavia.

Pada penelitian ini yang akan menyoroti aspek ekonomi sebagai landasan utama bagi kemunculan hubungan-hubungan sosial dan budaya, menemukan bahwa terdapat bentuk atau *stereotype* yang berbeda antara pola asuh anak yang dilakukan di pusat kota dengan anak-anak yang tumbuh dan berkembang di sekitar wilayah pinggiran selatan kota Jakarta. Kehidupan ekonomi di pusat kota Jakarta pada era kolonial, yang menekankan kepada kemampuan keterampilan dan *record* individu dalam dunia pendidikan formal, menjadi semacam syarat utama bagi setiap orang tua yang memiliki tanggung jawab dalam mengasuh anak-anak mereka.

Hampir seluruh atau mungkin setiap orang tua dipusat kota Jakarta, sejak masa kolonial hingga akhir tahun 1960-an, menyekolahkan anaknya disekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, dimana harapannya kelak anak-anak mereka setelah lulus nanti dapat bekerja di lembaga pemerintahan atau lembaga ekonomi milik swasta (perusahaan-perusahaan). Sementara itu masyarakat pribumi yang berada diwilayah pinggiran kota Jakarta, lebih menempatkan pendidikan in-formal kepada anak-anak mereka (pengetahuan tentang bercocok tanam dalam bentuk kebun dan sawah). Hal ini tidak terlepas dari bingkai produksi mereka yang masih menepatkan basis agraria sebagai mata pencaharian utama masyarakat pribumi, sementara itu pendidikan keagamaan (mengaji dan membahas nilai-nilai keagamaan ) melalui lembaga seperti masjid, Langgar dan Musholah menjadi pendidikan lain yang diberikan oleh orang tua di pinggiran Jakarta.

Jika hendak diberikan ciri-ciri mengenai pola asuh anak-anak dipinggiran kota Jakarta sejak era kolonial hingga tahun 1960-an, dapat diberikan karakteristik sebagai berikut<sup>54</sup> :

Proses transfer nilai pengetahuan lebih bersifat in-formal dan non-formal.

Nilai-nilai utama dalam sistem mata pencaharian berdasarkan basis agraris.

Pada aspek lain seperti religi, nilai-nilai keagamaan Islam menjadi landasan utama yang diberikan kepada anak melalui lembaga agama seperti pesantren, pengajian dan lainnya.

Proses pengenalan anak terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial diberikan kesempatan yang cukup luas.

Proses transformasi budaya, tradisi dan adat-istiadat menjadi satu hal yang penting dilakukan oleh orang tua, untuk menjaga identitas anak-anak dan keluarga mereka (khususnya yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan).

Karakteristik tersebut, jika diberikan analogi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari dapat digambarkan sebagai berikut: anak-anak sudah dibangunkan oleh orang tua mereka sebelum matahari terbit, dimana hal ini dilakukan oleh orang tua untuk mengajak atau mewajibkan kepada anak-anak mereka untuk melakukan kewajiban Shalat Subuh<sup>55</sup>. Setelah itu menjelang pagi, anak-anak diberikan tugas untuk melaksanakan kewajiban pekerjaan dirumah, dimana anak perempuan lebih ditugaskan untuk membantu ibu mereka di dapur dan merapihkan rumah. Sementara itu anak laki-laki umumnya membantu melaksanakan pekerjaan orang tua laki-laki mereka dalam bentuk memeriksa dan menjaga kebun atau areal persawahan yang dimiliki, menjaga dan memberikan makan bagi hewan ternak yang mereka miliki, serta menjual hasil-hasil bumi yang berasal dari pekarangan' kebun mereka ke pasar terdekat dari pemukiman mereka<sup>56</sup>.

---

Point-point diolah dan disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yakni dengan Bapak Sjafriz, 12 Juli 2016; wawancara dengan Bapak Daliman, 02 Juli 2016 di Depok; wawancara dengan bapak Hermansyah, 30 Juni 2016

Ibid.  
Ibid.

Pada siang hari tepatnya memasuki waktu shalat Dzuhur para orang tua kembali mewajibkan anak-anak mereka untuk menjalankan kewajiban keagamaan mereka, yang disusul dengan beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang telah disiapkan oleh orang tua perempuan mereka<sup>57</sup>. Setelah menuju waktu shalat Ashar anak-anak baik laki-laki maupun perempuan menuju langgar atau musholah untuk mengikuti kegiatan pengajian yang di ajar oleh seseorang yang bergelar Ustad atau Kyai. Sebelum fajar terbenam kegiatan pengajian tersebut berakhir, anak-anak kembali kerumah dan membantu orang tua untuk merapikan rumah serta kebun dan hewan ternak peliharaan sebelum memasuki waktu malam hari. Kegiatan Shalat Magrib, dan Isya yang diselingi mendengarkan syiar keagamaan di Musholah atau Masjid setempat menjadi kegiatan akhir mereka dipenghujung hari sebelum tidur<sup>58</sup>.

Apa yang dijabarkan oleh penulis melalui hasil wawancara terhadap beberapa orang penduduk di wilayah pinggiran Jakarta tersebut, setidaknya menggambarkan apa yang menjadi aktivitas anak-anak yang diwajibkan oleh para orang tua mereka, hingga saat mereka dewasa dan menyelesaikan masa lajang dengan menikah. Pola yang demikian seakan atau hampir dipastikan akan berulang kembali, dimana pola demikian berakhir setelah pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970-an memberikan kesempatan dan perubahan mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan instruksi Presiden di sekitar wilayah pinggiran Jakarta<sup>59</sup>.

## **Keluarga-Keluarga di Jakarta Pada Masa Kolonial Belanda, Jepang, Revolusi Nasional dan Pasca Kemerdekaan**

### **1. Keluarga Pinggiran Selatan Jakarta Masa Kolonial Belanda**

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan dalam penelitian ini, keluarga

---

Ibid.  
Ibid.

Sekolah Instruksi Presiden (sekolah Inpres) di pinggiran Jakarta Selatan ditemukan di wilayah yang bernama Fatmawati -Cilandak.

sebagai sebuah konsep memiliki fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuannya<sup>60</sup>. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sebagai sebuah pranata, keluarga memiliki 5 (lima) fungsi utama yakni : fungsi biologis, fungsi psikologis, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Lima fungsi yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto tersebut, akan dipilih dua saja dalam menjelaskan dan menarasikan penelitian ini, yakni fungsi secara sosial dan ekonomi.

Secara normatif landasan utama atau motif utama dalam kehidupan manusia adalah basis ekonomi, maka dari itu keluarga sebagai sebuah pranata merupakan alat/ media yang digunakan oleh manusia atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomis. Sebagai syarat utama untuk mempertahankan keberadaannya, faktor ekonomis memegang peran penting dan akan memberikan pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya (sosial, budaya, religi dan politis).

Kehadiran pendatang baru (anak) dalam sebuah keluarga, selain dimaknai sebagai penerus dalam keturunan juga dimaknai sebagai penambahan sumber daya manusia dalam aktivitas produksi dan mata pencaharian sebuah keluarga. Motif atau alasan mengenai penambahan jumlah sumber daya manusia dalam sebuah keluarga, dinyatakan juga oleh Peter Boomgaard dalam karyanya yang berjudul "*Anak-anak Jajahan Belanda : Sejarah Sosial-Ekonomi di Jawa 1795-1880*". Boomgaard juga menjelaskan bahkan sebelum sebuah keluarga terbentuk, pernikahan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam usaha untuk mengolah ladang dan sawah<sup>61</sup>.

Kehidupan pada masa kolonial Belanda yang penuh dengan tekanan sosial-ekonomis, seperti kewajiban kerja

---

<sup>60</sup> Lihat kembali mengenai landasan teori Bab. II, yang menjelaskan mengenai definisi dan konseptual mengenai keluarga yang digunakan sebagai pendekatan penelitian ini.

Peter Boomgaard. *Anak Jajahan Belanda : Sejarah Sosial -Ekonomi Jawa 1795 -1880*. Jakarta : Djambatan. 2004.

wajib (kepada pemerintah kolonial dan pemilik tanah), dan pembayaran pajak kepada pemerintah kolonial (pajak perkepala dalam sebuah rumah tangga, pajak transaksional di pasar, dll) dan pungutan yang dilakukan oleh pemilik/penyewa tanah partikelir<sup>62</sup>. Pajak dan pungutan yang dikenakan kepada para penduduk pribumi telah membuat para penduduk, khususnya kepala keluarga menanggung beban kehidupan yang cukup berat. Salah satu cara untuk dapat sedikit mengurangi beban tersebut ialah menambah jumlah keluarga, baik dengan jalan kelahiran anggota baru maupun dengan jalan pernikahan. Dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga (dalam bentuk anak laki-laki, maupun menantu pria dan wanita), akan mengurangi beban kerja yang ditanggung oleh seorang kepala keluarga. Seorang anak laki-laki dan menantu laki-laki akan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab untuk bekerja di ladang/ sawah yang dimiliki oleh keluarga tersebut, dan tenaga lain akan diposting untuk tugas lainnya seperti kerja wajib kepada pemerintah kolonial ataupun pemilik tanah.

Beban-belan kehidupan yang bersifat sosial-ekonomis tersebut merupakan beban hidup yang umumnya dirasakan oleh para penduduk pribumi yang berstatus sebagai petani penggarap maupun kuli tani. Mereka adalah kelompok dominan yang hidup di wilayah pinggiran kota Batavia (kini Jakarta), untuk itu hal kehadiran anggota keluarga baru (anak dan menantu) akan memberikan pendapatan lain melalui pekerjaan yang akan diemban oleh anggota baru keluarga. Anggota keluarga baru, sejatinya bukanlah orang baru dalam pengertian dari daerah lain, akan tetapi anggota keluarga baru yang sudah mendapatkan pendidikan keluarga (informal) sebelum dinyatakan siap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab untuk keluarga mereka. Pendidikan informal yang dimaksud ialah seperti apa yang telah dijelaskan pada sub-bab

mengenai pola umum pengasuhan anak di Jakarta.

### **Keluarga Pinggiran Selatan Jakarta Masa Jepang**

Situasi kehidupan sosial pada masa penjajahan Jepang yang hanya berlangsung 3,5 (Tiga Setengah) tahun, dipahami dan dirasakan oleh masyarakat di pulau Jawa, khususnya di pinggiran Jakarta sebagai periode yang cukup berat dan sulit. Hampir seluruh kajian-kajian sejarah Indonesia yang mengambil tema mengenai Indonesia pada masa penjajahan Jepang, menjelaskan bagaimana sulitnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia<sup>63</sup>.

Kembali kepada pokok bahasan mengenai kehidupan keluarga-keluarga di Jakarta pada masa Jepang, keadaan mereka sangat bergantung kepada kebijakan pemerintahan imperium Jepang. Orientasi penjajahan yang dilakukan oleh Jepang sangat berbeda dengan penguasaan kolonial Belanda, dimana kedatangan Jepang ke Indonesia dalam masa-masa perang di wilayah pasifik. Hal ini mendorong pemerintahan Jepang mengeluarkan kebijakan yang diasari atas kepentingan perang yang dilakukan oleh Jepang.

Dalam lapangan ekonomi pemerintah Jepang mewajibkan setiap warga pribumi untuk menanam padi dan tanaman umbi-umbian yang diperlukan bagi kebutuhan hidup tentara Jepang. Konsentrasi dalam upaya penanaman dua komoditi tersebut difokuskan pada wilayah pesisir, sementara itu untuk wilayah pedalaman dan bagian selatan pulau Jawa, tidak terlalu diawasi secara ketat (untuk kasus ini Jakarta dan daerah pinggiran selatan Jakarta menjadi daerah yang sangat diawasi secara ketat).

Sementara itu dalam kehidupan sosial pemerintah Jepang mengeluarkan

---

<sup>63</sup> Guna lebih memahami secara lebih mendalam mengenai hal ini dapat diperdalam kembali melalui karya-karya sejarah : Aiko Kurasawa yang berjudul *Mobilisasi dan Kontrol*; Harry J . Benda yang berjudul *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*.

---

ANRI. Memori Serah Jabatan 1931 - 1940 (Jawa Barat I). 1980. hlm. CXXIII.

kebijakan mobilisasi dan kontrol terhadap penduduk. Secara umum Jepang mewajibkan setiap penduduk (khususnya laki-laki) untuk terlibat dalam program kemiliteran dan pembangunan infrastruktur kepentingan militer Jepang. Cukup banyak masyarakat Jakarta yang dilibatkan dalam kerja paksa dan diwajibkan mengikuti pendidikan militer dibawah pengawasan pemerintahan Jepang. Seperti dikisahkan oleh Bapak Daliman seorang veteran perang kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa pada masa penguasaan Jepang orang tua (ayah) dan seorang kakak laki-lakinya diwajibkan untuk mengikuti kerja paksa oleh pemerintah Jepang, untuk membangun tangsi-tangsi militer Jepang di wilayah pesisir utara Jakarta (wawancara dengan Bapak Daliman, 02 Juli 2016 di Depok).

Pada masa penjajahan Jepang ini setiap anggota keluarga khususnya laki-laki yang dianggap cukup umur (mulai dari usia 14 tahun) dan sehat secara fisik serta jasmaniah diwajibkan bekerja bagi pemerintah imperium Jepang. Bapak Safiudin menjelaskan bahwa 2 (dua) orang kakaknya diambil secara paksa dari rumah untuk bergabung dengan badan organisasi perang bentukan Jepang yakni PETA. Kedua orang kakak dari bapak Safiudin (salah satu tokoh masyarakat di Serengseng Sawah, wawancara pada, 11 Juli 2016) selama menjalani pemusatan dan pelatihan di daerah Bayah (selatan Banten) tidak pernah diizinkan pulang, setelah Indonesia merdeka dan Jepang menyerah barulah salah seorang kakak beliau kembali kerumah (salah seorang lagi meninggal dunia saat terjadi peristiwa di Lebak Banten).

Disisi lain untuk anggota keluarga wanita, kisah yang cukup tragis sempat diceritakan oleh bapak Herman (sahabat bapak Daliman) yang menceritakan bahwa adik dari ibunya diambil dari rumah oleh Jepang, untuk dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga dalam kediaman pemimpin militer Jepang di kawasan Salemba Jakarta. Menurut cerita bapak Herman terdapat dua orang wanita pribumi Jakarta lainnya yang juga bekerja dirumah tersebut, mereka memiliki tugas

yang berbeda-beda di dalam rumah (wawancara dengan bapak Hermansyah, 30 Juni 2016).

Keadaan penduduk Jakarta pada masa penjajahan Jepang di pinggiran Jakarta ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana posisi keluarga dalam hal pengasuhan terhadap anak-anak, tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena pada usia tertentu yakni 13 sampai 14 tahun, mereka sudah diambil paksa oleh pemerintahan militer Jepang. Sementara itu pendidikan keluarga dan lingkungan (umumnya berbasis nilai keagamaan Islam sangat ketat diawasi) hanya dapat diterima oleh anak-anak yang berusia 12 tahun.

Usia pemerintahan militer Jepang berkuasa di Indonesia yang cukup singkat, akan tetapi mampu mengganggu proses transformasi dan pola asuh keluarga terhadap anak-anak mereka. Hal ini dilihat melalui kebijakan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pendidikan keagamaan (pesantren, majlis ta'alim, pengajian di surau dan musholah). Selain itu juga Jepang menutup sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda dan China, pada masa penjajahan Belanda. Akan tetapi pada masa penjajahan militer Jepang, terdapat salah satu nilai-nilai pendidikan yang diberikan yakni keterampilan militer. Keluarga-keluarga di Jakarta dan pinggiran Jakarta, yang mengalami pengambilan paksa anak laki-laki mereka, merupakan keluarga-keluarga yang kemudian mendapatkan pendidikan keterampilan militer dari Jepang.

### **Keluarga Pinggiran Selatan Jakarta Pada Masa Revolusi Nasional**

Pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia Sartono Kartodirdjo (Majalah Prisma, 1994: 81) menjelaskan bahwa terjadi suasana euforia yang cukup besar ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Khususnya di Jakarta, sebagian besar warga di Jakarta menyambut dengan sukacita dan ekspektasi yang cukup besar, dimana akan berakhirnya situasi kehidupan zaman kolonial yang cenderung terasa pahit dan menyedihkan.

Meskipun Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan, akan tetapi pasukan Jepang masih berada diseluruh wilayah Indonesia, termasuk di Jakarta. Selain itu suasana yang kurang kondusif juga cukup banyak terjadi disekitar pinggiran Jakarta. Hal ini dapat terjadi karena upaya konsolidasi kekuatan yang dilakukan oleh Republik Indonesia masih cukup banyak menghadapi tantangan dan kesulitan. Fenomena-fenomena seperti kriminalitas (dalam bentuk perampokan, pencurian dan kekerasan lainnya) banyak terjadi di wilayah pinggiran Jakarta.

Seperti yang dikisahkan oleh bapak Daliman, bahwa setelah Indonesia merdeka tantangan terbesar adalah masalah keamanan yang cukup meresahkan masyarakat yang ada dipinggiran Jakarta. Lebih lanjut bapak Daliman menjelaskan bahwa beliau saat itu berusia 16 tahun, terlibat dalam pasukan keamanan BKR (Badan Keamanan Rakyat) di Jakarta, bertugas melakukan pengamanan untuk warga yang berada di daerah Jagakara, Serengseng Sawah dan Kelapa Dua. Warga pribumi ditempat-tempat tersebut mengalami gangguan keamanan dan tidak mampu melakukan pengamanan karena sebagian anggota keluarga mereka (laki-laki) banyak yang tidak kembali karena meninggal dunia saat melaksanakan Romusha dan meninggal dalam peperangan di beberapa wilayah menghadapi tentara Jepang diawal kemerdekaan (wawancara dengan Bapak Daliman, 02 Juli 2016 di Depok).

Pelaksanaan pengasuhan anak yang dilakukan oleh para keluarga di Jakarta dan pinggiran Jakarta mengalami kendala yang cukup besar, karena tidak lama setelah Indonesia memproklamsikan kemerdekaannya, NICA (*Nederlandsh Indie Civil Administration*) datang dengan membonceng kekuatan Sekutu. Pada bulan April 1946, NICA tiba di Jakarta, dan memberikan ultimatum kepada pihak Republik untuk mengsongkan wilayah Jakarta dan sekitarnya dari kekuatan militernya. Melalui kesepakatan para pimpinan sipil dan militer Republik Indonesia melakukan evakuasi terhadap

masyarakat sipil dan arapartur pemerintahan ke wilayah Yogyakarta. Selang tidak beberapa ditahun 1947 pemerintah Belanda melakukan operasi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer I dan II yang dilakukan kemudian ditahun 1948.

Keadaan ini tentu membuat keluarga-keluarga di Jakarta tidak dapat berbuat banyak dalam mengasuh anak pada masa-masa perang, karena sebagian besar melakukan hijrah mengikuti pimpinan sipil ke daerah Yogyakarta. Hal utama yang dilakukan oleh para keluarga di Jakarta ialah mengungsi ke daerah-daerah yang dianggap aman, selain ke wilayah Yogyakarta, juga terdapat wilayah-wilayah yang dianggap aman seperti wilayah Selatan Banten (Bayah, Malipingping, Cilangkalien dan lainnya), wilayah selatan Jawa Barat (Pelabuhan Ratu).

Pada masa perang ini, terdapat satu hal yang menarik karena terdapat satu fenomena yakni masyarakat yang mengungsi ke wilayah-wilayah yang sudah disebutkan sebelumnya mengalami percampuran kebudayaan, salah satunya ialah fenomena persilangan kuliner. Sebagai contoh ialah kuliner Laksa, menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kosasih (2013: 77), kuliner laksa adalah jenis kuliner yang mengalami banyak percampuran kebudayaan, akibat interaksi antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Percampuran tersebut diantaranya melalui semakin variatifnya komposisi bahan-bahan pembuat makanan laksa.

Selama perang dan setelah perang kemerdekaan kuliner laksa semakin berkembang dan menjadi salah satu makanan komersil yang cukup digemari di Jakarta. Pada kasus ini, anak-anak perempuan dari keluarga-keluarga pengungsi menjadi pelaku aktif yang terlibat dalam keterampilan membuat kuliner tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil sumber yang didapatkan oleh Ahmad Kosasih (2013: 67) dalam penelitian sejarah kuliner Laksa (wawancara terhadap Zainudin, 01 Agustus 2013), bahwa seorang pedagang, yang telah berlangsung lama terlibat

dalam usaha kuliner laksa didaerah Fatmawati-Jakarta Selatan, menyatakan bahwa usaha tersebut dilakukan oleh sang ibu (saat mengungsi) sejak mempelajari kuliner laksa yang berada di wilayah Pelabuhan Ratu-Jawa Barat.

### **Perkembangan Keluarga-Keluarga di Selatan Jakarta Pasca Kemerdekaan**

Berakhirnya perjanjian Konfrensi Meja Bundar (kemudian akan disebut dengan KMB saja) menandai berakhirnya pula persengketaan politik dan konfrontatif kekuatan militer antara Republik Indonesia dengan Belanda (meskipun belum berakhir seluruhnya, karena masih ada persoalan mengenai Irian Barat di kemudian hari). Pasca perjanjian KMB para pemimpin nasional dan pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke kota Jakarta, peristiwa kembalinya Jakarta sebagai ibu kota terjadi pada 28 Desember 1945.

Kembalinya Jakarta sebagai ibu kota tidak serta merta memberikan kemudahan bagi pengelolaan pemerintahan yang dikomdani oleh Soekarno-Hatta. Selama kota Jakarta ditinggalkan oleh para pemimpin nasional, keadaan dan situasi kota Jakarta tidak dalam kondisi yang kondusif serta aman, hal ini dikarenakan kekosongan kepemimpinan nasional secara politis, yang direspon/ diambil alih oleh kekuatan-kekuatan milisi "liar".

Gangguan keamanan dan ketertiban juga dirasakan oleh pemerintahan Republik Indonesia ketika kembali ke Jakarta, keadaan tersebut sangat dirasakan disebagian besar terjadi di sebelah selatan wilayah pinggiran Jakarta<sup>64</sup>.

Gangguan kemanan dan ketertiban yang dilakukan oleh para laskar yang merasa sakit hati terhadap kepurusan pemerintahan Soekarno-Hatta ini, secara umum menguasai/ beroperasi di wilayah-wilayah perkebunan yang pernah dikuasai oleh pemerintah kolonial dan

ditlantarkan pada masa pemerintahan imperium Jepang. Keadaan dan tempat beroperasinya para pengganngu kemanan dan ketertiban di pinggiran selatan Jakarta tersebut, tidak hanya mengganggu dan menghalangi upaya pengelolaan pemerintahan yang hendak dijalankan oleh pemerintah, akan tetapi juga memberikan cukup banyak teror secara fisik dan psikis kepada penduduk sekitar.

Salah satu contoh ialah laskar Banteng Merah yang berada dan kerap beroperasi di wilayah Jakagarsa. Laskar ini adalah milisi lokal yang terbentuk pada masa perang kemerdekaan, dan secara umum laskar ini memiliki afilias yang cukup kuta dengan kelompok pergerakan komunis. Laskar ini mengambil *landbouw* sebagai wilayah markas mereka. Akibatnya kriminalitas yang kerap kali mereka lakukan, khususnya melakukan perampokan penduduk Jagakarsa yang memiliki kemampuan ekonomi (kaya) membuat penduduk sangat ketakutan (Wawancara dengan Pak Sjafrri, 12 Juli 2016).

Ketakutan yang cukup besar dirasakan oleh warga atau penduduk selatan Jakarta yang berasal dari etnis Tionghoa, karena etnis Tionghoa kerap kali menjadi sasaran bagi kegiatan kriminal dan kejahatan dalam bentuk perampokan, pencurian dan pembunuhan. Hal ini diungkapkan oleh Tjap Oei (menggunakan nama Indonesia saat ini Zainal Oki), yang menjelaskan bahwa kakeknya merupakan korban perampokan dan pembunuhan di tahun 1950, yang dilakukan oleh para laskar-laskar yang melakukan kegiatan kriminal pada malam hari di wilayah Jalan Joe (Jagakarsa). Lebih lanjut menurut Tjap Oei, peristiwa-peristiwa perampokan yang terkadang juga terjadi peristiwa pembunuhan, sempat menyulut rasa curiga dan sentimen yang kuat antara masyarakat pribumi dengan para penduduk yang memiliki latar belakang etnis Tionghoa di wilayah Jagakarsa (wawancara dengan Tjap Oei, 12 Juli 2016).

Senada dengan para penduduk yang berlatar belakang etnis Tiongha, kejadian mengenai kegiatan kriminalitas juga sempat dialami oleh keluarga-keluarga

---

<sup>64</sup> Asep Suryana dalam Taufik Abdullah dan Sukri Abdurrahman (ed). *Indonesia Across Order : Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930 -1960)*. Jakarta : LIPI. 2011., hlm. 91.

pribumi yang menganut keyakinan nasrani di sekitar wilayah Desa Putra (Setu Babakan-Jagakarsa). Seorang sepuh (yang dituakan dan dihormati) di daerah Setu Babakan bernama Pak Niman menjelaskan bahwa pada masa Laskar Banteng Merah melakukan kegiatan teror dan kriminalitas cukup banyak memberikan gangguan kepada penduduk. Gangguan dan teror khususnya lebih ditujukan kepada orang-orang kaya, golongan etnis Tionghoa dan penduduk pribumi yang berlatar belakang keyakinan Nasrani (Wawancara dengan Pak Niman, 09 Juli 2016).

Salah satu bentuk peninggalan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok pengacau keamanan di wilayah Setu Babakan menurut Pak Niman adalah keberadaan reruntuhan bangunan gudang yang terbakar, bangunan tersebut berada di sudut sebelah timur sekolah Desa Putra. Seorang pimpinan yayasan Desa Putra yang bernama Ibu Veronica (51 tahun), menjelaskan bahwa para Romo dan Pastur yang mengabdikan di sekolah dan panti asuhan Desa Putra, kerap kali bercerita tentang keadaan pada masa setelah berlangsungnya perundingan KMB antara Belanda dan Republik Indonesia, keadaan sosial sangat mengkhawatirkan. Banyak penduduk pribumi yang menganut keyakinan Nasrani menjadi korban aksi teror, dalam bentuk perampokan dan pembunuhan. Hal ini terjadi karena para penduduk pribumi yang menganut ajaran Kristen, dianggap sebagai kaki tangan dari penjajah Belanda (wawancara dengan Ibu Veronica, 09 Juli 2016).

Keadaan sosial dan keamanan yang cukup mengkhawatirkan tersebut pada masa-masa setelah proklamasi telah membuat dan membentuk tingkat kekhawatiran penduduk di wilayah pinggiran Jakarta selatan tersebut menyusun langkah-langkah antisipatif bagi keselamatan keluarganya, khususnya bagi para anak-anak mereka. Pak Niman bercerita bahwa pada tahun 1950-an ia sudah berusia 6 tahun, dimana kedua orang tua Pak Niman melarang anak-anak mereka untuk menunaikan ibadah Sholat Magrib dan Isya berjamaah di Langgar atau Masjid. Hal ini dilakukan karena

kedua orang tua Pak Niman khawatir anak-anak mereka menjadi korban kekerasan ataupun penculikan yang dilakukan oleh laskar Banteng Merah (Wawancara dengan Pak Niman, 09 Juli 2016).

Langkah antisipatif juga dilakukan oleh keluarga pribumi yang menganut keyakinan Kristen dan keluarga dari etnis Tionghoa. Keluarga pribumi yang menganut keyakinan Nasrani tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk mengikuti pendidikan di sekolah Desa Putra, selama situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Setu Babakan-Srengseng Sawah belum pulih. Hal yang menarik justru ditunjukkan oleh keluarga etnis Tionghoa, dimana anak-anak mereka digiatkan untuk mengasah kembali kemampuan bela diri mereka, sebagai langkah untuk membela diri dalam keadaan terdesak, serta menjaga keamanan keluarga mereka (wawancara dengan Ibu Veronica, 09 Juli 2016; wawancara dengan Tjap Oei, 12 Juli 2016).

Memasuki bulan November ditahun 1950 pemerintah Republik Indonesia memberikan respon terhadap daerah-daerah yang mengalami sidtabilitas ketertiban dan keamanan. Salah satu cara yang ditempuh ialah melakukan kegiatan pengamanan dan penumpasan kelompok-kelompok "pengacau", dengan kebijakan militer. Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dikerahkan untuk mengamankan dan membangun situasi yang kondusif di wilayah pinggiran Jakarta (Koran *Sin Po*, 15 November 1950).

Guna mempercepat keadaan menjadi lebih kondusif warga disekitar Jagakarsa, Fatmawi dan Cilandak memberikan sumbangsih dalam bentuk, pemberian izin kepada anak-anak mereka yang dianggap sudah dewasa untuk terlibat dengan kerja-kerja pengamanan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Pak Niman bercerita bahwa sang kakak yang bernama Tholib (saat itu berusia 18 tahun), di izinkan oleh orang tuanya untuk membantu petugas pengamanan di wilayah mereka

(Wawancara dengan Pak Niman, 09 Juli 2016).

Melalui penjabaran mengenai situasi sosial dan respon keluarga-keluarga di pinggiran Jakarta pada masa setelah perang kemerdekaan, kita dapat melihat bagaimana fungsi-fungsi keluarga lebih bersifat internal dan protektif dalam menjaga keberlangsungan anggota keluarga mereka. Khususnya bagi keluarga-keluarga pribumi non-muslim, serta keluarga etnis Tionghoa, mereka hanya dapat menjaga anak-anak mereka melalui penyusunan strategi yang mereka terapkan, dan berharap bantuan pemerintah.

### **Saling-Silang Transformasi Nilai-Nilai Sosial-Budaya Keluarga-Keluarga di Jakarta di Tahun 1960-an**

Memasuki tahun 1960-an masyarakat di Jakarta menghadapi perubahan yang sangat mendasar, perubahan yang berjalan dengan sangat cepat tersebut ditopang oleh keberadaan teknologi yang semakin baik. Kebutuhan untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman dan diharapkan mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, telah memaksa para pemimpin nasional memikirkan bagaimana menyusun bidang pendidikan nasional yang mampu adaptif dengan perkembangan zaman.

Dua hal yang cukup mendasar menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah di Jakarta, dalam menyusun infrastruktur dunia pendidikan di Jakarta. Pertama ialah keberadaan pengajar dan sarana-prasarana penunjang pendidikan. Dunia pendidikan dipahami oleh pemimpin nasional sebagai tiket untuk mampu menghadapi segala perkembangan perikehidupan bangsa, khususnya di Jakarta sebagai pusat ibu kota negara, pendidikan memiliki posisi yang cukup strategis dalam mengembangkan ibu kota.

Pemerintah kota Jakarta melalui instruksi menteri pendidikan dan pengajaran membangun sarana-sarana kependidikan disekitar kota Jakarta, dan semakin meluas hingga kepinggiran kota Jakarta. Akan tetapi sebelum membangun sarana kependidikan tersebut (sekolah), pemerintah pusat memberikan posisi dan peran yang cukup besar kepada Persatuan Guru Republik Indonesia

(kemudian akan disingkat menjadi PGRI), untuk menghasilkan guru-guru dan tenaga pengajar (melalui keberadaan Sekolah Pendidikan Guru) yang kelak akan ditugaskan dalam sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai peran penting sekolah dalam membangun kehidupan bangsa menjadi lebih baik dan bermartabat, hanya mampu menjangkau keluarga-keluarga yang berada di pusat kota- Jakarta ditahun 1960-an. Pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah pada masa tersebut cenderung mengarah kepada pendidikan umum, dan melepaskan tanggung jawab pendidikan dengan ciri keagamaan kepada pranata-pranata keagamaan milik masyarakat (hal ini dibuktikan dengan belum terintegrasinya pendidikan di pesantren dan pendidikan misionaris) kedalam pendidikan formal di bawah Kementrian Pendidikan dan Pengajaran (wawancara dengan Ibu Veronica, 09 Juli 2016).

Perkembangan dunia pendidikan formal di Jakarta, juga didorong oleh perkembangan ekonomi di Jakarta yang mulai dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi perusahaan dan perdagangan modern. Pendidikan formal menjadi satu kesempatan emas yang tidak akan dilepaskan bagi masyarakat di Jakarta, agar mampu terlibat secara aktif dalam putaran roda ekonomi di Jakarta. Sebagai contoh ialah pembukaan kegiatan Pekan Raya Ekonomi Internasional (cikal bakal kegiatan Djakarta Fair as a Ali Sadikin) yang telah diadakan sejak tahun 1953, dimana para pekerja yang terlibat dalam kegiatan pemasaran produk-produk niaga mengharuskan seseorang minimal memiliki ijazah Sekolah Dasar untuk dapat bekerja di unit-unit tertentu (*Madjalah Kotapradja No.4 Th. Ke III*. 30 Oktober 1952. Hal. 18).

Perkembangan dunia industri dan perdagangan di kota Jakarta, dalam bentuk berdirinya korporasi-korporasi bisnis, telah membuka mata para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Hal ini dilakukan agar anak-anak mereka mampu terlibat dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan yang sangat dominan dalam ekonomi Jakarta. Bapak Niman menceritakan bagaimana kemudian beliau memiliki beberapa sepupu yang kemudian disekolahkan oleh para

orang tua mereka dengan harapan memiliki pekerjaan yang layak dan tidak hanya mewarisi usaha ayahnya sebagai petani buah di wilayah Jakarta. Lebih lanjut menurut Bapak Niman, menjadi seorang buruh di pabrik dan seorang karyawan rendahan di perusahaan-perusahaan Jakarta memiliki status sosial yang cukup tinggi (wawancara dengan Bapak Niman, 09 Juli 2016).

Kesadaran mengenai pentingnya dunia pendidikan di tahun 1960-an juga sangat dirasakan oleh para orang tua di wilayah pinggiran kota Jakarta. Hal ini dapat dilihat melalui semakin banyaknya anak-anak dipinggiran kota Jakarta yang mengenyam pendidikan formal, meski dalam bentuk pranata pendidikan yang berbasis religi. Bapak Niman menjelaskan bahwa pada pertengahan tahun 1957, cukup banyak sekolah-sekolah keagamaan dalam bentuk sekolah Madrasah, yang berada dalam payung Departemen Agama Republik Indonesia didirikan di sepanjang wilayah Jagakarsa, Kebayoran dan Depok (wawancara dengan Bapak Niman, 09 Juli 2016).

Tahun 1960 dapat dikatakan sebagai awal dari proses yang cukup kuat bagi pembangunan pondasi pendidikan formal, yang diakses oleh keluarga-keluarga di Jakarta dan pinggiran Jakarta. Anak-anak dari para keluarga di pinggiran Jakarta, sudah mulai diberikan jalan dan mengakses dunia pendidikan formal, sebagai bentuk kesadaran mengenai pentingnya pendidikan formal oleh para orang tua.

## PENUTUP

Pola asuh anak-anak yang dilakukan oleh para keluarga di wilayah pinggiran Jakarta, sejatinya merupakan satu *stereotype* tersendiri dalam gambaran keluarga di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari asal-usul kemunculan kota Jakarta sebagai sebuah kota yang mutirasial dan multi-kebudayaan. Masuknya unsur-unsur budaya dari luar Jawa dan Nusantara, telah membentuk pola pembentukan keluarga yang cukup unik dan khas, sebagai sebuah pantulan dari kota kolonial. Mengasuh dan mendidik anak dengan mengutamakan pendidikan keagamaan, dan pengetahuan-pengetahuan mengenai basis agraria dan perniagaan, hanya terdapat dalam keluarga-keluarga yang berada

di wilayah pesisir, yang dibangun oleh kolonial.

Seperti yang tergambar dalam narasi mengenai pola asuh keluarga pada masa kolonial, dimana anak-anak dan anggota keluarga baru lainnya menjadi tenaga tambahan dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup dalam langan sosial-ekonomis. Berdasarkan keadaan tersebut, maka anak-anak ataupun anggota baru keluarga lainnya disyaratkan untuk memahami dan memiliki wawasan serta pengetahuan dalam membantu kepala keluarga bekerja di ladang atau lahan persawahan yang mereka miliki. Setali itga uang dengan masa penjajahan Jepang, anak-anak dan anggota keluarga yang cukup sehat dan kuat, kembali diposisikan sebagai sumber daya tenaga manusia untuk memenuhi tuntutan pemerintahan Jepang dalam mengeskplotasi kekayaan alam yang ada di Batavia, maupun sebagai tenaga tambahan untuk kepentingan militer.

Pada masa kemerdekaan dan setelah kemerdekaan (hingga tahun 1960-an), pola asuh anak tidak terlalu berbeda dimana anak-anak tetap menjadi sumber daya dalam melindungi dan mengelola alat produksi yang dimiliki (tanah dan perkebunan). Hal ini menjadi satu kesimpulan tersendiri dalam tulisan ini, bahwa poal pengasuhan anak-anak dipinggiran Batavia (kini Jakarta), sangat ditentukan oleh bagaimana dinamika kehidupan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Surat Kabar

*Sin Po*, 15 November 1950

*Madjalah Kotapradja No.4 Th. Ke III*. 30

Oktober 1952

### Buku

Abdullah, Taufik dan Sukri Abdurrachman. 2011. *Indonesia Across Orders : Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960)*. LIPI Press. Jakarta.

Blackburn, Susan. 2011. **Jakarta: Sejarah 400 Tahun**. Masup. Jakarta.

- Basundoro, Purnawan. 2011. **Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya 1900-1960**. Disertasi Program Doktorat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.
- Boomgaard, Peter. 2004. Anak Jajahan Belanda : Sejarah Sosial-Ekonomi Jawa 1795-1880. Djambatan. Jakarta.
- Castles, Lance. 2007. Profil Etnik Jakarta. Masup. Jakarta.
- Kosasih, Ahmad. 2013. *Eksistensi dan Keterpinggiran Masyarakat Betawi dalam Dinamika Urban di Jakarta: Survey terhadap Pedagang Laksa Betawi*. (Laporan Penelitian LPPM Universitas Indraprasta PGRI). Jakarta : LPPM UNINDRA
- Kuntowijoyo. 2003. **Metodologi Sejarah**. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Lindblad, Thomas (editor). 2000. Sejarah Ekonomi Modern Indonesia. LP3ES. Jakarta.
- Memori Serah Jabatan 1931-1940 (Jawa Barat I). 1980. ANRI
- Otonomi Daerah Hindia-Belanda 1903-1940, 1998. ANRI
- Sutherland, Heather. 1983. **Terbentuknya Elite Birokrasi**. Sinar Harapan. Jakarta
- Soekiman, Djoko. 2011. **Kebudayaan Indis dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi**. Depok: Komunitas Bambu
- Bapak Hermansyah, 30 Juni 2016
- Bapak Tjap Oei, 12 Juli 2016
- Bapak Niman, 09 Juli 2016
- Ibu Veronica, 09 Juli 2016
- Wawancara**
- Bapak Sjafriz, 12 Juli 2016;
- Bapak Daliman, 02 Juli 2016 di Depok

# KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN KABUPATEN BULELENG

**Gede Putu Agus Jana Susila**

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja-Bali  
*Janos\_undiksha@yahoo.com*

## ABSTRACT

*This study aimed to obtain findings about the effect of (1) Identify the field of business and strategic commodities which are a potential Buleleng, (2) Identify the business field and potential commodities by district, which is expected to provide information to potential investors, as a first step to inculcate invest in Buleleng, (3) identify the enabling factors and constraints in the development of investment in Buleleng. The analytical tool used in these studies generally consists of three methods: analysis of the pattern of growth in economic sectors (Klassen Typologi), Location Quotient, and schallogram analysis. The data processing of all three methods / tools of analysis used in this study were processed using Microsoft Excel program. The results of the analysis Klassen Typologi sectoral approaches, indicating that the agricultural sector occupied the first quadrant is advanced and rapidly growing sector. LQ value calculation results across sectors of the economy based on indicators of local revenue that GDP at constant 2000 prices, there are three sectors which are the economic base of Buleleng that can be prioritized into leading sectors in 2010-2013, namely agriculture, manufacturing industry sector, and the sector of rendering services. The results of the analysis schallogram District of Buleleng hold first rank in the availability of support facilities leading sectors that is 2,610. This is because the District is the capital of Buleleng regency of Buleleng so that the spread of the facility construction is done in these districts.*

**Keywords:** *Klassen Typologi, Location Quotient, schallogram analysis.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan tentang pengaruh (1) Mengidentifikasi lapangan usaha dan komoditas strategis yang menjadi potensi Kabupaten Buleleng, (2) Mengidentifikasi lapangan usaha dan komoditas yang potensial per kecamatan, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon investor, sebagai langkah awal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng, (3) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan investasi di Kabupaten Buleleng. Alat analisis yang digunakan dalam studi penelitian ini secara umum terdiri atas tiga metode, yaitu: analisis pola pertumbuhan sektor ekonomi (Klassen Typologi), analisis Location Quotient, dan analisis skalogram. Pengolahan data dari ketiga metode/alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel. Hasil dari analisis Klassen Typologi dengan pendekatan sektoral, menunjukkan bahwa sektor pertanian menduduki kuadran I yaitu sektor maju dan tumbuh cepat. Hasil perhitungan nilai LQ diseluruh sektor perekonomian berdasarkan indikator pendapatan daerah yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2000 terdapat tiga sektor yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Buleleng yang dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan pada tahun 2010-2013 yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Hasil analisis skalogram Kecamatan Buleleng memegang peringkat pertama dalam ketersediaan fasilitas pendukung sektor unggulan yaitu 2.610. Ini disebabkan karena Kecamatan Buleleng merupakan ibukota dari Kabupaten Buleleng sehingga penyebaran fasilitas pembangunan dilakukan di kecamatan tersebut.

**Kata Kunci:** *Klassen Typologi, Location Quotient, analisis skalogram.*

## LATAR BELAKANG

Tujuan dari pembangunan ekonomi secara keseluruhan adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut maka prioritas

pembangunan diletakkan pada pembangunan ekonomi, karena diharapkan keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dapat digunakan untuk mendorong pembangunan di bidang lainnya.

Untuk mengolah potensi ekonomi potensial menjadi riil salah satu sarana yang sangat penting

adalah pengembangan investasi. Karena dengan pengembangan investasi akan mendorong pada beberapa efek mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan nasional/daerah maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan suatu daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan tentang pengaruh (1) Mengidentifikasi lapangan usaha dan komoditas strategis yang menjadi potensi Kabupaten Buleleng, (2) Mengidentifikasi lapangan usaha dan komoditas yang potensial per kecamatan, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi kepada calon investor, sebagai langkah awal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buleleng,

Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam pengembangan investasi di Kabupaten Buleleng.

## METODE ANALISIS DATA

Alat analisis yang digunakan dalam studi penelitian ini secara umum terdiri atas tiga metode, yaitu: analisis pola pertumbuhan sektor ekonomi (*Klassen Typologi*), analisis *Location Quotient*, dan analisis skalogram. Pengolahan data dari ketiga metode/alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program *Microsoft Excel*. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel. 1 Alat Analisis yang Digunakan dalam Penelitian**

| No | Alat Analisis   | Tujuan   |
|----|---|--|
| 1. | <i>Klassen Typologi</i>   | Mengidentifikasi klasifikasi pola pertumbuhan sector ekonomi wilayah di Kabupaten Buleleng |
| 2. | <i>Location Quotient (LQ)</i><br>• <i>Multiplier</i> Pendapatan<br>• Surplus Pendapatan | Menemukan sektorunggulan dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Buleleng             |
| 3. | Analisis Skalogram  | Menganalisis pembangunan infrastruktur di Kabupaten Buleleng                               |

### Identifikasi Pola Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Buleleng

**Tabel. 2 Laju Pertumbuhan PDRB dan Kontribusi PDRB Kabupaten Buleleng**

| Lapangan Usaha                           | Laju Pertumbuhan PDRB rata-rata (persen) |             | Kontribusi PDRB rata-rata (persen) |              |
|--|--|-------------|------------------------------------|--------------|
|  | Bali                                     | Buleleng    | Bali                               | Buleleng     |
| Pertanian                                | 2.19                                     | <b>2.40</b> | 18.79                              | <b>23.13</b> |
| Pertambangan dan Penggalian              | 13.60                                    | 6.29        | 0.70                               | 0.66         |
| Industri Pengolahan                      | 5.50                                     | 4.39        | 9.91                               | <b>10.12</b> |
| Listrik, Gas, dan Air Bersih             | 7.97                                     | <b>9.95</b> | 1.56                               | 1.02         |
| Bangunan                                 | 10.03                                    | 7.33        | 4.24                               | 2.78         |
| Perdagangan, Hotel, dan Restoran         | 6.62                                     | <b>9.74</b> | 32.20                              | 29.68        |
| Pengangkutan dan Komunikasi              | 6.32                                     | 5.58        | 11.05                              | 3.57         |
| Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 7.59                                     | 4.02        | 7.16                               | 4.11         |
| Jasa-jasa                                | 9.36                                     | 7.07        | 14.38                              | <b>24.95</b> |

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan *Klassen Typologi* pola pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh cepat adalah sektor pertanian. Sektor inilah yang sebaiknya mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk dikembangkan. Sektor pertanian mempunyai kinerja laju pertumbuhan dan kontribusi ekonomi

yang lebih besar daripada Provinsi Bali yaitu: 2,40 persen rata-rata laju pertumbuhan dan 23,13 persen untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Buleleng.

### Analisis Basis Perekonomian

Untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan basis dan non basis

digunakan metode *Location Quotient* yang merupakan perbandingan relatif antara kemampuan atau peranan sektor yang sama dalam suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih luas. Untuk mengetahui sektor perekonomian yang dapat meningkatkan pendapatan daerah maka pendapatan sebagai dasar ukuran yang tepat. Oleh sebab itu, dalam analisis sektor basis ini menggunakan PDRB dengan indikator pendapatan untuk melihat peranannya dalam perekonomian di Kabupaten Buleleng. Hasil perhitungan nilai LQ diseluruh sektor perekonomian berdasarkan indikator pendapatan daerah yaitu PDRB atas dasar harga

konstan 2000 terdapat tiga sektor yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Buleleng yang dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan pada tahun 2010-2013 yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa, ini ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai LQ sektor tersebut lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian dan pembangunan wilayah di Kabupaten Buleleng. Hasil perhitungan analisis sektor basis perekonomian di Kabupaten Buleleng periode 2010-2013 dapat dilihat pada Tabel 3

**Tabel 3 Nilai LQ Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Harga Konstan 2000 Periode 2010-2013**

| Lapangan Usaha                           | Location Quotient (LQ) |      |      |      |             |
|--|------------------------|------|------|------|-------------|
|  | 2010                   | 2011 | 2012 | 2013 | Rata-rata   |
| Pertanian                                | 1.23                   | 1.24 | 1.23 | 1.23 | <b>1.23</b> |
| Pertambangan dan Penggalian              | 0.99                   | 0.98 | 0.90 | 0.87 | 0.94        |
| Industri Pengolahan                      | 1.04                   | 1.04 | 1.02 | 0.99 | <b>1.02</b> |
| Listrik, Gas, dan Air Bersih             | 0.64                   | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.66        |
| Bangunan                                 | 0.69                   | 0.69 | 0.63 | 0.63 | 0.66        |
| Perdagangan, Hotel, dan Restoran         | 0.88                   | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.92        |
| Pengangkutan dan Komunikasi              | 0.33                   | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32        |
| Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 0.60                   | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.57        |
| Jasa-jasa                                | 1.79                   | 1.75 | 1.74 | 1.67 | <b>1.74</b> |

Sumber: BPS (data diolah)

#### *Efek Pengganda Pendapatan*

Menurut konsep ekonomi basis yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya efek pengganda yang berasal dari sektor basis pada hakikatnya akan meningkatkan pendapatan, sekaligus investasi dan konsumsi kebutuhan

wilayah. Selain itu, dengan efek pengganda tersebut juga menyebabkan adanya peningkatan permintaan sektor non basis sehingga investasi pada sektor non basis tersebut juga harus ditingkatkan agar dapat memenuhi permintaan sektor non basis.

**Tabel 4 Nilai Pengganda Basis Sektor Basis Kabupaten Buleleng Tahun 2010-2013**

| TAHUN | BASE MULTIPLIER |              |                |
|-------|-----------------|--------------|----------------|
|       | Y Total         | Y Basis      | K (Multiplier) |
| 2010  | 3,457,475.66    | 2,061,777.47 | 1.68           |
| 2011  | 3,668,884.04    | 2,153,867.47 | 1.70           |
| 2012  | 3,907,935.78    | 2,255,543.39 | 1.73           |
| 2013  | 4,170,206.98    | 2,363,013.79 | 1.76           |

Sumber: BPS (Data diolah)

Angka pengganda pendapatan dijadikan pertimbangan kriteria penentuan sektor unggulan karena suatu sektor mempunyai angka pengganda pendapatan yang tinggi dan jika sektor tersebut dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, atau dengan kata lain bahwa angka pengganda pendapatan terkait erat dengan peningkatan daya beli masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasil perhitungan nilai efek pengganda dapat dilihat pada Tabel 4.

Pada Tabel 4 nilai koefisien pengganda basis cenderung meningkat selama periode 2010-

2013. Nilai koefisien pengganda basis tahun 2010 sebesar 1,68, hal ini berarti bahwa jika terjadi peningkatan pendapatan sektor basis sebesar Rp.100.000 maka total pendapatan sebesar Rp.168.000 dan pendapatan sektor non basis sebesar Rp.68.000. Nilai koefisien mengalami kecenderungan yang meningkat dari tahun 2010-2013.

#### *Analisis Skalogram*

**Perkembangan Infrastruktur dalam Pembangunan Wilayah**

Unit pusat pengembangan yang di analisis dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Tabel 5 akan menyajikan jumlah jenis dan jumlah unit sarana dan prasarana pembangunan atau fasilitas sosial ekonomi pada setiap kecamatan (pusat

pengembangan) yang disusun secara skalogram. Berdasarkan Tabel 5 diberikan informasi tentang hirarki atau peringkat dari pusat pengembangan dari peringkat teratas sampai peringkat terbawah seperti terlihat pada Tabel 5

**Tabel 5 Hirarki Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Berdasarkan Skalogram (satuan unit)**

| No | Kecamatan    | Jumlah Penduduk | Jumlah Desa | Jumlah Jenis Fasilitas | Jumlah Unit Fasilitas | Peringkat |
|----|--------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 1. | Buleleng     | 132.640         | 29          | 32                     | 3.251                 | 1         |
| 2. | Sawan        | 59.540          | 14          | 24                     | 1.580                 | 2         |
| 3. | Seririt      | 71.040          | 21          | 26                     | 1.562                 | 3         |
| 4. | Gerokgak     | 81.220          | 14          | 23                     | 1.548                 | 4         |
| 5. | Kubutambahan | 54.640          | 13          | 25                     | 1.512                 | 5         |
| 6. | Tejakula     | 53.980          | 10          | 21                     | 1.443                 | 6         |
| 7. | Banjar       | 70.540          | 17          | 24                     | 1.435                 | 7         |
| 8. | Sukasada     | 74.430          | 15          | 24                     | 1.205                 | 8         |
| 9. | Busungbiu    | 40.270          | 15          | 22                     | 801                   | 9         |

Sumber: BPS (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5 bahwa hanya Kecamatan Buleleng yang memiliki fasilitas yang paling lengkap. Kecamatan Buleleng memiliki 32 jenis fasilitas. Kecamatan Buleleng merupakan kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya, sehingga kelengkapan fasilitas sangat diperlukan, sehingga memungkinkan kecamatan ini memiliki fasilitas yang tidak dimiliki kecamatan lainnya. Disusul oleh Kecamatan Seririt dengan 26 jenis fasilitas. Hasil analisis skalogram Kecamatan Buleleng memegang peringkat pertama dalam ketersediaan unit fasilitas pembangunan yaitu sebanyak 3.251, ini disebabkan karena Kecamatan Buleleng merupakan ibukota Kabupaten Buleleng sehingga penyebaran fasilitas

pembangunan dilakukan di kecamatan tersebut. Hirarki terendah dipegang oleh Kecamatan Tejakula yaitu dengan jumlah 21 jenis fasilitas.

#### **Perkembangan Infrastruktur Pendukung Sektor Unggulan**

Dalam analisis skalogram ini, dapat di asumsikan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan sektor unggulan di Kabupaten Buleleng, yaitu; pasar, toko, kios, warung, KUD, industri pengolahan, bank, BPR, pegadaian, bank umum, bank pasar, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Penyebaran sarana dan prasarana (infrastruktur) yang mendukung kegiatan sektor unggulan dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6 Penyebaran Sarana dan Prasarana Pendukung Perkembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 (satuan unit)**

| No | Kecamatan    | Jumlah Penduduk | Jumlah Desa | Jumlah Jenis Fasilitas | Jumlah Unit Fasilitas | Peringkat |
|----|--------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 1. | Buleleng     | 132.640         | 29          | 15                     | 2.610                 | 1         |
| 2. | Sawan        | 59.540          | 14          | 14                     | 1.439                 | 2         |
| 3. | Seririt      | 71.040          | 21          | 11                     | 1.294                 | 3         |
| 4. | Kubutambahan | 54.640          | 13          | 12                     | 1.284                 | 4         |
| 5. | Gerokgak     | 81.220          | 14          | 11                     | 1.274                 | 5         |
| 6. | Tejakula     | 53.980          | 10          | 9                      | 1.243                 | 6         |
| 7. | Banjar       | 70.540          | 17          | 13                     | 1.233                 | 7         |
| 8. | Sukasada     | 74.430          | 15          | 11                     | 941                   | 8         |
| 9. | Busungbiu    | 40.270          | 15          | 12                     | 665                   | 9         |

Sumber: BPS (data diolah)

Hasil analisis skalogram Kecamatan Buleleng memegang peringkat pertama dalam ketersediaan fasilitas pendukung sektor unggulan yaitu 2.610. Ini disebabkan karena Kecamatan

Buleleng merupakan ibukota dari Kabupaten Buleleng sehingga penyebaran fasilitas pembangunan dilakukan di kecamatan tersebut. Walaupun di Kecamatan Buleleng hanya terdapat

tiga industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau tidak sebanyak jika dibandingkan Kecamatan Banjar yang memiliki empat industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau sedangkan Kecamatan Sukasada yang memiliki industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau terbanyak di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak lima industri, tetapi kecamatan Buleleng memiliki jumlah industri pengolahan kertas dan industri pengolahan kayu terbanyak di Kabupaten Buleleng yaitu masing-masing sebanyak lima industri pengolahan. Selain kepemilikan industri pengolahan di setiap kecamatan di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng memiliki jumlah bank pemerintah terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hirarki terendah dipegang oleh Kecamatan Tejakula yaitu dengan jumlah jenis fasilitas sebanyak sembilan. Kecamatan Tejakula sama sekali tidak memiliki industri pengolahan baik itu di sektor makanan, minuman, dan tembakau maupun sektor lainnya seperti industri tekstil, industri kayu, industri kertas, dan industri logam. Walaupun demikian, Kecamatan Tejakula masih berada pada peringkat keenam, hal ini disebabkan karena jumlah unit fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki masih lebih banyak di bandingkan Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Busungbiu seperti jumlah unit fasilitas pasar, toko, kios, dan warung.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN

### *Kebijakan Pembangunan Sektoral*

Kebijakan pembangunan wilayah dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Buleleng diprioritaskan pada dua sektor yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, karena kedua sektor ini sangat berperan penting dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu, kedua sektor tersebut sebagai sektor basis juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan wilayah Kabupaten Buleleng. Beberapa implikasi kebijakan dari setiap sektor adalah sebagai berikut:

Implikasi kebijakan dari sektor industri pengolahan diharapkan dapat membantu masyarakat petani dengan adanya penyebaran perusahaan pengolahan hasil pertanian dan Penyuluh Praktek Lapang untuk dapat membantu masyarakat petani khususnya dalam pengelolaan lahan pertanian di setiap kecamatan. Peran swasta dalam mengelola hasil pertanian khususnya di bidang perkebunan agar dapat memberi bantuan kepada masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

Sektor industri pengolahan dapat menghasilkan nilai tambah dan partisipasi masyarakat yang terus meningkat dan

berkembang dengan dilakukannya usaha pertanian yang berwawasan bisnis, dengan dikembangkannya agribisnis dan agrowisata di Kabupaten Buleleng. Selain itu juga agroindustri sebagai subsistem agribisnis yang mempunyai potensi sebagai pendorong pasar yang lebih luas dan nilai tambah (*value added*) yang besar. Mengembangkan sistem ketahanan pangan dan gizi melalui peningkatan ketersediaan komoditas pangan dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan kualitas yang baik. Selain itu, dengan mengembangkan perekonomian yang berorientasi global yang mampu bersaing dengan daerah lain dengan memprioritaskan produk-produk unggulan pertanian baik dari tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan.

Peningkatan pertumbuhan sektor industri perlu diikuti dengan peningkatan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan. Pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk industri dan penggunaan teknologi proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Instrumen terkait industri hijau (seperti *eco product*, energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya dan beracun) akan semakin berperan dalam regulasi perdagangan global di masa depan yang tentunya perlu diantisipasi oleh sektor industri.

Implikasi Kebijakan dari Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Buleleng yaitu dengan mendorong tumbuh dan kembangnya usaha dibidang Industri Pengolahan. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan di bidang Industri Pengolahan dengan tersedianya data secara akurat dan valid, serta perlu adanya kegiatan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat atau pemerintah daerah sendiri dengan diadakannya diklat/kursus teknis bidang Industri Pengolahan agar potensi sumberdaya yang ada tidak di sia-sia kan dan hanya diberikan kepada investor yang ada atau perusahaan saja yang mengelola. Pengetahuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia juga diperlukan untuk pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan tidak merusak lingkungan serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang ahli dibidang Industri Pengolahan, mengembangkan secara terpadu sektor Industri Pengolahan melalui peningkatan

penguasaan teknologi, peningkatan produksi dan penganekaragaman hasil perdagangan termasuk upaya pengelolaan untuk komoditas perdagangan.

Perkembangan dan pertumbuhan sektor unggulan industri pengolahan dan sektor pertanian di Kabupaten Buleleng perlu didukung oleh sektor lainnya yang merupakan sektor non basis, sehingga selain dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan sektor unggulan tersebut juga dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan sektor lainnya yang merupakan sektor non basis sehingga menunjang keberadaan sektor basis, seperti adanya sektor pertanian akan mendukung sektor industri pengolahan hasil pertanian, begitu juga dengan sektor non basis lainnya.

### **Kebijakan Menurut Penyebaran Fasilitas Pembangunan dan Pendukung Sektor Unggulan**

Berdasarkan hasil analisis dari metode skalogram, penyebaran sarana dan prasarana pembangunan wilayah dan mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng dapat dikatakan belum mengalami pemerataan. Hal ini bisa terlihat di beberapa daerah di Kabupaten Buleleng tingkat pendapatan masyarakatnya masih rendah dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali seperti Kabupaten Badung dan Denpasar. Implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan dalam kebijakan sarana dan prasarana pendukung sektor unggulan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang sebaiknya berwawasan pembangunan wilayah dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan terpadu antar sektor. Dalam bentuk lain dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi yang tergolong basis harus mendapat prioritas utama. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila sarana dan prasarana fasilitas pendukung pembangunan lengkap. Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu memperhatikan wilayah yang sarana dan prasarannya kurang lengkap seperti Kecamatan Tejakula yang memiliki potensi sektor unggulan yang baik, tetapi penyebaran dan ketersediaan sarana dan prasarana nya belum memadai.
2. Kebijakan dalam meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik/masyarakat untuk mendorong pemerataan pembangunan, percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan dengan adanya

perencanaan tata ruang agar terwujudnya tata ruang kota dan desa sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan tata ruang agar tersedianya sarana dan prasarana wilayah yang memadai dan terkendalinya ruang kota dan desa secara optimal.

Pembangunan berkelanjutan juga harus mendapat perhatian serius dalam mengembangkan sektor unggulan.

Keberlanjutan usaha-usaha ekonomi sektor unggulan harus diiringi dengan pengelolaan pembangunan keseluruhan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada paradigma pembangunan berkelanjutan.

Adanya otonomi daerah menuntut daerah untuk dapat memperbesar PAD yang akan digunakan sebagai sumber dana pembangunan daerahnya. Sesuai dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng maka pembangunan dilaksanakan lebih mengutamakan pada pembangunan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Buleleng.

Sektor perekonomian yang dapat dikembangkan dan diprioritaskan menjadi sektor unggulan adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Implikasi kebijakan dalam penyebaran sarana dan prasarana wilayah di setiap kecamatan Kabupaten Buleleng yang belum sepenuhnya mengalami pemerataan, diharapkan kepada pemerintah daerah dapat memperhatikan dan menindaklanjuti keadaan sarana dan prasarana wilayah kecamatan yang kurang merata untuk mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng, terutama bagi daerah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten yang belum ada sarana dan prasarana pendukung dari sektor unggulan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayahnya.

Implikasi kebijakan fasilitas pendidikan untuk mendukung sektor unggulan dapat dilakukan dengan cara mendirikan dan menambah sekolah kejuruan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan, hal ini diperlukan untuk menciptakan sumberdaya manusia dan pengetahuan masyarakat dini tentang industri pengolahan agar tidak tertinggal dengan daerah lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### *Kesimpulan*

Hasil dari analisis *Klassen Typologi* dengan pendekatan sektoral, menunjukkan bahwa sektor pertanian menduduki kuadran I yaitu sektor maju dan tumbuh cepat. Disusul oleh sektor industri pengolahan pada kuadran II yaitu sektor maju tetapi tertekan. Selain dari dua sektor ini, sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran, Listrik, Gas, & Air Bersih berada pada kuadran III yaitu sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Sektor ekonomi di Kabupaten Buleleng masih banyak berada pada kuadran IV yaitu sektor yang relatif tertinggal.

Hasil perhitungan nilai LQ diseluruh sektor perekonomian berdasarkan indikator pendapatan daerah yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2000 terdapat tiga sektor yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Buleleng yang dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan pada tahun 2010-2013 yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa, ini ditunjukkan dari hasil perhitungan nilai LQ sektor tersebut lebih dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian dan pembangunan wilayah di Kabupaten Buleleng.

Hasil analisis skalogram Kecamatan Buleleng memegang peringkat pertama dalam ketersediaan fasilitas pendukung sektor unggulan yaitu 2.610. Ini disebabkan karena Kecamatan Buleleng merupakan ibukota dari Kabupaten Buleleng sehingga penyebaran fasilitas pembangunan dilakukan di kecamatan tersebut. Walaupun di Kecamatan Buleleng hanya terdapat tiga industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau tidak sebanyak jika dibandingkan Kecamatan Banjar yang memiliki empat industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau sedangkan Kecamatan Sukasada yang memiliki industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau terbanyak di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak lima industri, tetapi kecamatan Buleleng memiliki jumlah industri pengolahan kertas dan industri pengolahan kayu terbanyak di Kabupaten Buleleng yaitu masing-masing sebanyak lima industri pengolahan. Selain

kepemilikan industri pengolahan di setiap kecamatan di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng memiliki jumlah bank pemerintah terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hirarki terendah dipegang oleh Kecamatan Tejakula yaitu dengan jumlah jenis fasilitas sebanyak sembilan. Kecamatan Tejakula sama sekali tidak memiliki industri pengolahan baik itu di sektor makanan, minuman, dan tembakau maupun sektor lainnya seperti industri tekstil, industri kayu, industri kertas, dan industri logam. Walaupun demikian, Kecamatan Tejakula masih berada pada peringkat keenam, hal ini disebabkan karena jumlah unit fasilitas pendukung lainnya yang dimiliki masih lebih banyak di bandingkan Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Busungbiu seperti jumlah unit fasilitas pasar, toko, kios, dan warung.

Mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri Nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk pasar dalam negeri dan ekspor.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Lingkup penerapan industri hijau meliputi standardisasi, sertifikasi dan pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH).

Meskipun disadari pentingnya keberadaan industri strategis dalam pembangunan industri nasional, namun dalam kenyataannya industri strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relative besar, resiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relative kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapakan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut diatas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis.

## Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng diharapkan untuk mampu menopang perekonomian masyarakatnya dengan memprioritaskan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor jasa-jasa sebagai sektor unggulan, karena berdasarkan analisis LQ ketiga sektor tersebut merupakan sektor basis perekonomian yang dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah serta dapat mendukung perkembangan sektor perekonomian non basis.

Berdasarkan analisis LQ diharapkan kepada pemerintah daerah juga memperhatikan dan memperbaiki faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan sektor non basis, sehingga dapat menambah dan menjadikan sektor non basis sebagai sektor basis yang dapat diprioritaskan sebagai sektor unggulan Kabupaten Buleleng, seperti sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran. Misalnya dengan peningkatan terhadap penguasaan teknologi pada semua sektor yang ada dan mempermudah persyaratan dalam penanaman investasi, meningkatkan jaringan komunikasi dan infrastruktur yang mendukung.

Sebaiknya pembangunan sarana dan prasarana ditingkatkan di wilayah kecamatan yang terletak jauh dari ibukota kecamatan seperti Kecamatan Tejakula, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Gerokgak dan kecamatan lainnya yang relatif masih tertinggal serta daerah yang banyak memiliki potensi dari sektor unggulan.

Pemberian fasilitas bagi IKM yang dilakukan melalui: (1) Fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; (2) Fasilitasi bantuan dan bimbingan teknis;

Fasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong; (4) Fasilitasi bantuan mesin atau peralatan; (5) Fasilitasi pengembangan produk; (6) Fasilitasi bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau; (7) Fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;

Fasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; (9) Fasilitasi penyediaan Kawasan Industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan; dan/atau (10) Fasilitasi pengembangan dan penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan.

Pemberian fasilitas untuk industri hijau, meliputi: (1) Fasilitas fiskal berupa: fasilitas pembiayaan; bantuan pembelian dan/atau modifikasi mesin peralatan untuk penerapan Industri Hijau; pembebasan bea masuk untuk importasi teknologi ramah lingkungan; pengurangan pajak; dan/atau fasilitas fiskal lainnya. (2) Fasilitas non-fiskal berupa : bantuan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia; pembangunan prasarana bagi Perusahaan Industri skala kecil dan menengah dalam rangka pengembangan industri hijau; bantuan promosi bagi Perusahaan Industri dalam rangka pengembangan industri hijau; bantuan fasilitas non fiskal lainnya.

Program pembangunan industri strategis yang dilakukan meliputi: (1) Penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pada industri strategis tertentu; (2) Pembentukan usaha patungan antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan industri strategis; (3) Pengalihan sebagian modal yang dimiliki pemerintah pada industri strategis kepada pemerintah daerah; (4) Pemberian Fasilitas kepada Industri Strategis yang melakukan: pendalaman struktur; penelitian dan pengembangan teknologi; pengujian dan sertifikasi; restrukturisasi mesin dan peralatan; (5) Renegosiasi kepemilikan industri strategis oleh pemerintah yang dimiliki oleh swasta nasional atau asing; (6) Pengkajian potensi industri strategis yang perlu dikembangkan.

Hendaknya dilakukan penelitian lanjutan mengenai perkembangan perekonomian dan pembangunan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Buleleng baik dari segi ekonomi maupun segi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. P4Wpress.Bogor.
- Alkadri, Muchdie, Suhandjo. 2001. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah (Sumberdaya alam, Sumberdaya manusia, teknologi)*. PPKT Pengembangan Wilayah. Jakarta.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. UGM, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2014. *Provinsi Bali dalam Angka 2012*. BPS Provinsi Bali.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. 2014. *Kabupaten Buleleng dalam Angka 2012*. BPS Buleleng.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng 2010-2013*. BPS Buleleng.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. 2014.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten*. BAPPEDA Buleleng.
- BAPPENAS. 2004. *Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah*.  
[http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&path=ContentExpress/RPJM2004/&view=Bab%2024%20\(Pembangunan%20Daerah\).doc](http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&path=ContentExpress/RPJM2004/&view=Bab%2024%20(Pembangunan%20Daerah).doc).
- Bakri, S. 2002. *Penataan Ruang Sebagai Landasan Pengembangan Wilayah Propinsi Gorontalo*.  
[http://www.pu.go.id/ditjen\\_ruang/Makalah/PRGorontalo.doc](http://www.pu.go.id/ditjen_ruang/Makalah/PRGorontalo.doc).
- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Destrika, Elka. 2006. Skripsi. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD dan Komponen PAD Provinsi Jawa Barat*. Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Manajemen. IPB. Bogor.
- Ghalib, R. 2005. *Ekonomi Regional*. Pustaka Ramadan, Bandung.
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional* (terjemahan Paul Sitohang). LPFEUI, Jakarta.
- Hanafiah, T. 1988. *Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil dalam Rangka Pengembangan Wilayah Pedesaan*. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Faperta IPB. Bogor.
- Jaenudin, D. 2007. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat Tahun 1997-2005*. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Manajemen. IPB. Bogor.
- Jhingan, ML. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumawati, 2005. Tesis. *Keterkaitan Sektor Unggulan dan Karakteristik Tipologi Wilayah dalam Pengembangan Kawasan Strategis*. Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Kristiyanti, L. 2007. *Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Peranannya dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antara Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur*. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.
- Nindyantoro. 2004. *Kebijakan Pembangunan Wilayah: Dari Penataan Ruang Sampai Otonomi Daerah*. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- PERHEPI. 1983. *Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Pembangunan Pertanian*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Pranata, W, F. 2004. *Analisis Sektor Basis Perekonomian dalam Pembangunan Wilayah di Era Otonomi Daerah*. Skripsi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Purliana, Indah. 2003. *Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Peranan Fasilitas Pelayanan Terhadap Pembangunan Wilayah Kota Tegal*. Skripsi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Richardson, H. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sahara. Tanpa Tahun. *Modul Kuliah MK. Ekonomi Regional*. Tidak dipublikasikan.
- Setiawan, I. 2006. *Peranan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah: pendekatan input output multiregional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat*. Disertasi. Program Studi Ekonomi Pertanian. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. LPFE UI. Jakarta.
- Sukatendel, F. 2007. Tesis. *Analisis Keterkaitan Alokasi Anggaran dan Sektor Unggulan dalam Mengoptimalkan Kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Bogor*. Program Studi Ilmu Perencanaan

Wilayah. Sekolah Pascasarjana. IPB.  
Bogor.

Tambunan, T.T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia*.  
Ghalia Indonesia. Jakarta.

Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional Teori  
dan Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta.

Tadjoedin, M.Z, W. I. Suharyo, dan S. Mishra.  
2001. *Aspirasi terhadap ketidakmeraan:  
Disparitas Regional dan Konflik Vertikal  
di Indonesia*. UNSFIR Working Paper-  
Jakarta.

Usya, N. 2006. *Analisis Struktur Ekonomi dan  
Identifikasi Sektor Unggulan di  
Kabupaten Subang*. Fakultas Ekonomi dan  
Manajemen. IPB. Bogor.

Wahyuni, S, E. 2004. *Pedoman Teknis Menulis  
Skripsi*. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.

Zainal, R. 2007. *Pengembangan Kawasan Strategis  
Nasional  
Riau*. Tesis. Program Studi Magister  
Pembangunan Daerah. Sekolah  
Pascasarjana. IPB. Bogor.

dalam *Pembangunan Prov*

## PENERAPAN MOTIF HIAS DENGAN TEKNIK JUMPUTAN DAN TEKNIK *PAINTING* PADA KAIN

**Made Diah Angendari**

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FTK Undiksha  
dekdiahku@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to (1) implement a decorative motif with techniques jumputan and technique of painting on cotton fabric superfine, silk, chiffon, and satin, (2) to test the quality of the results, and (3) find obstacles in the implementation process decorative motifs with jumputan techniques with painting techniques. This study was an experimental study, expert panelists as many as six persons, and analyzed using descriptive analysis. The results of the study (1) the application of decorative motifs with techniques jumputan and technique of painting on fabric uses tools and materials, and the process starts from the technique jumputan continued with the techniques of painting, (2) the quality of the application of decorative motifs with techniques jumputan and technique of painting on cotton fabric and penerapannya silk fabric is very good. While in satin and chiffon penerannya good, and (3) the obstacles in the application of decorative motifs with jumputan technique and technique of painting on the fabric is, the process jumputan, ironing, plagiarism motif, and the process of painting.*

**Keywords:** *decorative motifs, jumputan techniques, printing techniques, fabrics.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menerapkan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada kain katun prima, kain sutra, kain sifon, dan kain satin, (2) melakukan uji kualitas hasil, dan (3) menemukan kendala-kendala dalam proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan dengan teknik painting. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, panelis ahli sebanyak 6 orang, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian (1) proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada kain menggunakan alat dan bahan, dan proses dimulai dari teknik jumputan dilanjutkan dengan teknik painting, (2) kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada kain katun dan kain sutra penerapannya sangat baik. Sedangkan pada kain satin dan kain sifon penerannya baik, dan (3) kendala dalam penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada kain adalah, pada proses jumputan, penyetricaan, penjiplakan motif, dan proses painting.

**Kata kunci:** motif hias, teknik jumputan, teknik painting, kain.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan pesat dalam teknologi produksi dan pengelolaan pada industri tekstil serta pengolaan kain dewasa ini telah menghasilkan tekstil yang memiliki berbagai sifat dan beragam jenisnya. Hal ini berhubungan dengan upaya untuk melayani kebutuhan masyarakat yang menuntut aneka ragam pemenuhan untuk keperluan hidup yang salah satunya adalah dengan memberi hiasan pada tekstil dengan berbagai macam rupa dan warna bersumber dari keinginan manusia untuk menghilangkan kebosanan yang terjadi akibat kepolosan kain.

Busana merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan dan mutlak bagi manusia, karena busana merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk dipergunakan sebagai penutup tubuh. Busana sangat erat kaitannya dengan kebudayaan manusia, oleh karena itu dengan adanya model busana yang beranekaragam, maka semakin tinggi pula nilai estetika pada busana tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan tekstil atau pakaian, desain tidak dapat dipisahkan dari *trend* (suatu mode busana yang sedang laris pada masa itu). Lebih-lebih di Era Globalisasi (masa pasar bebas) ini dimana arus prekonomian semakin berkembang, karena

itu para desainer berkompetisi untuk menciptakan suatu karya seni yang baru, sehingga tercapai mode busana dengan berbagai motif hias yang dapat memperindah busana tersebut dan semacam seni yang bertujuan untuk mendapatkan busana yang harmonis, menarik, dan menyenangkan.

Pada hakekatnya manusia selalu menuntut dua nilai sekaligus yaitu nilai jasmaniah yang berupa kenyamanan pemakaian dan nilai rohaniah yang berupa keindahan. Secara prioritas desain memang ditujukan untuk memenuhi kedua nilai tersebut secara sekaligus dan semaksimal mungkin.

Desain yang baik adalah desain yang berhasil menampilkan desain yang dapat mencapai keserasian atau keterpaduan antara bahan dan motif hias yang dipergunakan didalam memperindah suatu benda, sedangkan motif hias pada tekstil lebih banyak ragamnya dibandingkan dengan penerapan motif hias pada bahan lain. Menurut Suhersono Hery (2005 : 11) motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemen-elemen, yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk alam benda, dengan gaya dan ciri khas sendiri. Motif hias pada tekstil lebih cepat mengalami perkembangan, karena didukung oleh banyaknya jiwa seni dan kreativitas orang yang mulai maju seiring adanya kemajuan teknologi. Adapun motif-motif yang biasa digambarkan pada tekstil di ambil dari alam sekitar yang di rangkum dalam kelompok-kelompok motif hias yaitu, bentuk flora, bentuk fauna, bentuk pemandangan, bentuk geometris dan bentuk abstrak.

Desain motif tampil mempercantik benda-benda fungsional, seperti pada tekstil, permadani, furniture, kramik, dan lukisan. Jadi tidak hanya bernilai seni, desain motifpun membuat benda-benda fungsional itu bernilai ekonomis. Desain motif hias merupakan penentu nilai artistik sebuah karya seni dengan tata letak motif yang serasi. Dalam menghias kain atau tekstil ada beberapa teknik hias seperti teknik *painting*, teknik bordir, teknik sablon, sulaman, lekapan, smok, *fecwook* dan teknik batik,

teknik sulaman, teknik jumputan (ikat celup) dan sebagainya. Dalam menghias tekstil haruslah mengetahui bagaimana sifat dan ciri dari tekstil itu sendiri.

Hasil karya seni akan lebih banyak macamnya lagi apabila dari beberapa motif hias dan teknik hias dapat dipadukan dan dituangkan pada kain. Untuk menghasilkan kain polos (tampa motif) yang tambah lebih indah dan mewah perlu ditambah dengan motif hias yang dapat dikerjakan dengan macam-macam teknik, misalnya sulam pita, sulam benang, jumputan, batik, *painting*, bordir, airbrus, payet, dan smok. Biasanya dalam menghias kain atau busana lebih banyak hanya menerapkan satu macam teknik saja. Begitu juga dengan teknik *painting* dan teknik jumputan merupakan teknik yang biasanya diterapkan tersendiri pada kain atau busana. Dan oleh karena itu, untuk menciptakan suatu karya seni yang lebih kreatif, lebih indah dan memiliki nilai seni yang lebih dari karya seni yang biasanya dalam penelitian ini teknik jumputan dan teknik *painting* dipadukan dalam penerapan motif hias sehingga mendapatkan karya seni yang baru dan lebih menarik.

Kegiatan *painting* hampir sama dengan melukis di atas kanvas, sablon maupun *air brush*, dan masing-masing memiliki teknik tersendiri. Melukis di atas kanvas hampir sama dengan *painting*, yang membuat berbeda media lukis dan cat yang digunakan. Teknik *painting* sekarang bukan saja untuk berbagai lenan rumah tangga, tetapi juga untuk berbagai busana. Teknik *painting* banyak yang dipadukan dengan cara memberikan tambahan hiasan, seperti pemberian payet, maupun pemberian bordiran sehingga memberi kesan mewah dan menarik.



**Gambar 1 Motif Jumputan**



**Gambar 2 Motif *Painting***

Teknik jumputan atau biasa disebut dengan ikat celup (*tie dye*) adalah sebuah teknik untuk membuat motif secara manual yakni dengan cara mengikat, yang berfungsi untuk menghalangi warna agar tidak bisa masuk ke kain yang diikat (Hasyim Hanny, 20002). Penerapan dua teknik *painting* dan jumputan diharapkan dapat membuat kreasi baru di dalam menghias kain. Dalam eksperimen ini akan diuji coba dan diteliti penerapan motif hias dengan memadukan teknik *painting* dan jumputan pada kain. Di mana pada penerapan motif hias bahan tekstil teknik jumputan yang dikerjakan terlebih dahulu dan dipadukan dengan teknik *painting*.

Bahan tekstil dihasilkan dari serat tekstil yang diperoleh dari serat alam dan buatan karena itu penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan *painting* pada tekstil perlu memperhatikan beberapa karakteristik dari bahan tekstil tersebut, seperti: bahan dari serat alami yang mempunyai sifat kuat, mudah menyerap air, tahan pada bahan pembersih, dan tidak tahan pada asam pekat, sedangkan serat buatan (sintetis) yang mempunyai sifat mudah kusut, licin, tahan gesekan, dan tidak mudah lapuk.

Tekstil yang terbuat dari serat alami dan serat buatan (sintetis) yang mempunyai sifat di atas banyak macamnya maka dalam eksperimen ini, peneliti hanya menggunakan kain yang berasal dari serat alam dan serat buatan. Kain serat alam terdiri dari serat tumbuhan dan serat binatang. Sedangkan serat buatan terdiri dari serat poliester dan nilon. Dari serat tumbuhan digunakan kain katun prima sedangkan dari serat hewan kain sutra. Serat poliester digunakan kain sifon dan serat nilon digunakan kain satin. Pemilihan ke empat kain ini mewakili dari asal serat kain yaitu serat alam dan serat

buatan. Dalam penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan *painting* pada kain haruslah diperhatikan karakteristik-karakteristik bahab tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang memuaskan dan menghasilkan suatu karya seni yang mempunyai keindahan pada kain atau busana.

Berdasarkan sifat-sifat dari kain katun, kain sutera, kain sifon dan kain satin yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penyerapan warna, ketajaman warna, bentuk motif hias, dan tekstur dengan teknik jumputan dan teknik *painting*. Berdasarkan latar belakang di atas yang membuat peneliti memiliki pemikiran untuk melakukan eksperimen tentang penerapan motif hias dengan teknik *painting* dan bordir pada tekstil..

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diajukan beberapa masalah pada penelitian ini.

Bagaimana proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain?

Bagaimana kualitas (motif, kombinasi warna, penyerapan warna, tekstur) hasil penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain ditinjau dari penilaian pakar?

Kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain dan bagaimana penanggulangannya?

## **METODE PENELITIAN**

### *Pendekatan Penelitian*

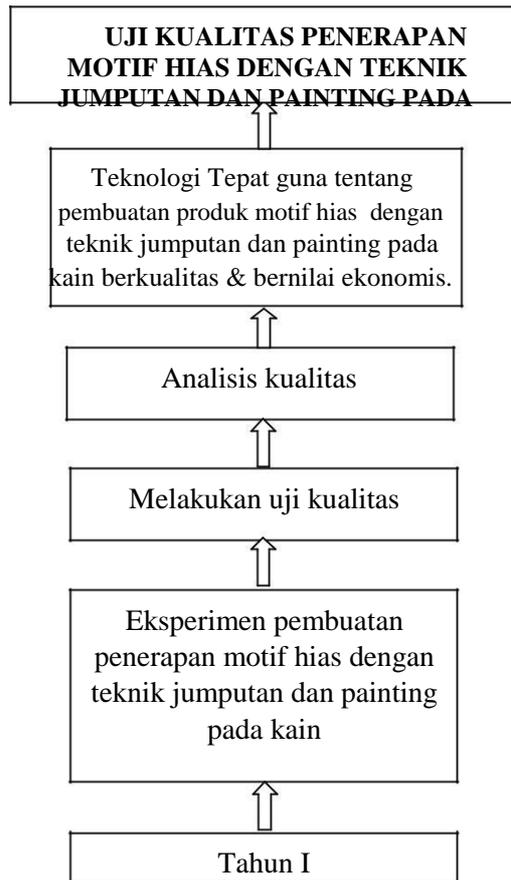
Penelitian ini merupakan penelitian laboratorium (eksperimen), guna memperoleh kualitas penerapan motif hias dengan teknik *jumputan* dan *painting* pada kain katun prima, kain sutra, kain sifon dan kain satin. Tahap penelitian untuk memperoleh formasi dan metode yang tepat dalam langkah-langkah proses penerapan motif hias menggunakan teknik jumputan dan teknik *painting* sehingga mendapatkan hasil kain yang berbeda dalam segi motif,

warna dan tekstur yang digunakan. Kain yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari serat alam yaitu kain katun prima dan kain sutra, sedangkan kain dari serat buatan adalah kain sifon dan kain satin. Sedangkan perwarnanya untuk teknik jumputan digunakan warna naptol dan untuk cat painting. Target khusus yang akan dicapai dengan metode pencapaian tujuan sebagai berikut: (a) eksperimen pembuatan motif hias dengan teknik jumputan yang dikombinasi dengan teknik painting pada empat jenis kain yaitu kain katun prima, kain

sutra, kain sifon, dan kain satin sehingga diperoleh formula dan metode yang tepat, (b) melakukan uji kualitas hasil dari penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan painting, dan (c) menanggulangi kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain.

#### *Rancangan Penelitian*

Rancangan penelitian eksperimen ini disajikan dalam bagan air sebagai berikut:



**Bagan 1 Alur Penelitian**

#### *Variabel Penelitian*

Variabel bebas penelitian sebagai perlakuan penelitian berupa penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik painting pada kain. Sedangkan variabel terikat adalah kualitas dari penerapan teknik jumputan dan teknik painting pada kain berupa motif, perpaduan warna, penyerapan warna dan tekstur.

Subyek dalam penelitian ini adalah penerapan motif hias pada kain katun prima, kain sutra, kain sifon, dan kain satin dengan teknik jumputan dan teknik painting. Sedangkan obyek penelitian adalah berupa kualitas penerapan motif hias dilihat dari kriteria kualitas motif, perpaduan warna, penyerapan warna dan tekstur.

*Uji Kualitas*

Uji kualitas dalam penelitian eksperimen ini dilakukan dengan teknik Secara umum.

pengumpul data menggunakan rubrik penilaian kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting*

**Tabel 1. Rubrik Penilaian Kualitas Penerapan Motif Hias**

| No | Aspek Kualitas   | Gradasi Kualitas   |   |  |
|----|------------------|--|---|--|
|    |                  | Baik   | Sedang  | Kurang   |
| 1  | Motif            | <ul style="list-style-type: none"> <li>desain motif hias sesuai dengan kekhasan masing-masing teknik</li> <li>motif hias terlihat tepat dan seimbang saat dipadukan</li> <li>motif hias dengan kedua teknik terlihat serasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>desain motif hias kurang sesuai dengan kekhasan masing-masing teknik</li> <li>motif hias terlihat kurang tepat dan seimbang saat dipadukan</li> <li>motif hias dengan kedua teknik terlihat kurang serasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>desain motif hias tidak sesuai dengan kekhasan masing-masing teknik</li> <li>motif hias terlihat tidak tepat dan seimbang saat dipadukan</li> <li>motif hias dengan kedua teknik terlihat tidak serasi</li> </ul> |
| 2  | Perpaduan Warna  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perpaduan warna dan <i>painting</i> serasi</li> <li>Warna kelihatan cerah pada masing-masing teknik</li> <li>Perpaduan warna dan <i>painting</i> tampak harmonis</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perpaduan warna dan <i>painting</i> kurang serasi</li> <li>Warna kelihatan kurang cerah pada masing-masing teknik</li> <li>Perpaduan warna dan <i>painting</i> tampak kurang harmonis</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perpaduan warna dan <i>painting</i> tidak serasi</li> <li>Warna kelihatan tidak cerah pada masing-masing teknik</li> <li>Perpaduan warna dan <i>painting</i> tampak tidak harmonis</li> </ul>                     |
| 3  | Penyerapan Warna | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian kain dapat menyerap warna dengan baik</li> <li>Warna merata</li> <li>Tidak ada butiran warna</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian kain kurang dapat menyerap warna dengan baik</li> <li>Warna kurang merata</li> <li>ada butiran warna dalam jumlah sedikit</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bagian kain dapat tidak menyerap warna dengan baik</li> <li>Warna tidak merata</li> <li>Terdapat butiran warna dalam jumlah banyak</li> </ul>   |
| 4  | Testur           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permukaan cat rata</li> <li>Cat tidak berbulir</li> <li>Cat tidak pecah-pecah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permukaan cat kurang rata</li> <li>Ada cat berbulir</li> <li>Cat ada pecah-pecah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permukaan cat tidak rata</li> <li>Cat berbulir</li> <li>Cat pecah-pecah</li> </ul>  |

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data akan dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Data hasil penelitian kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain yang meliputi kualitas motif, perpaduan warna, penyerapan warna, dan tekstur dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Tingkat kualitas penerapan motif berdasarkan dari ke 4 aspek penilaian tersebut. Penilaian uji kualitas ini dilakukan oleh 6 orang panelis yang ahli di bidang busana dan kriya tekstil. Panelisnya terdiri dari 3 orang dosen busana di prodi

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan 3 orang guru kria tekstil di SMK N 1 Sukasada.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Proses Penerapan Motif Hias dengan Teknik Jumputan dan Teknik *Painting* pada Kain.**

Proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain memerlukan beberapa alat dan bahan.

Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Alat-alat yang digunakan dalam proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan pada adalah sebagai berikut: panci, waskom, kompor, setrika, gunting, sendok kayu, timbangan. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan motif hias dengan teknik *painting* adalah sebagai berikut: pensil, pengapus, kertas HVS, penggaris, karbon jahit, kuas, palet, tempat air, styrofoam

Bahan untuk teknik jumputan adalah kain katun prima, kain sutra, kain satin, kain sifon, pewarna dylon, garam dapur, dan tali raffia. Sedangkan bahan yang digunakan untuk teknik *painting* adalah cat tekstil dan gliter.

Proses Pembuatan Teknik Jumputan adalah sebagai berikut:

Kain Katun, kain sutra, kain satin dan kain sifon dipotong ukuran 25 x 30 cm.

Perendaman kain dengan cara panas, bahannya 250 gr soda as, 4 liter air untuk 1 meter kain. Caranya rebus air hingga mendidih, masukan soda as kemudian aduk hingga merata, masukkan kain yang akan direndam dan tekan-tekan sampai air meresap pada kain selama 25 menit. Kemudian angkat dan tiriskan, jemur di tempat yang teduh, hingga air tidak menetes dan lembab.

Menyiapkan motif yang akan diterapkan pada kain

Kain diberi motif untuk membuat jumputan

Kain diikat sesuai dengan pola motif yang diinginkan

Didihkan air sebanyak 2 liter untuk 10 gram warna dylon aduk-aduk agar warnanya merata dan masukkan garam dapur  $\frac{1}{2}$  sendok makan yang berfungsi sebagai penguat warna.

Masukkan kain katun, kain sutra, kain satin dan kain sifon dalam larutan warna, aduk-aduk dan balikkan agar warnanya merata dan menyerap dengan baik. Direbus selama 1 jam.

Angkat kain dan tiriskan, jemur di tempat yang teduh dan tidak boleh terkena sinar matahari agar warna kain tidak pudar.

Setelah kering buka ikatan pada kain.

Kain disetrika supaya menjadi kencang kembali, karena dalam proses menjumput terjadi kerutan-kerutan.

Kain dengan motif jumputan motif garis yang sudah disetrika sudah siap untuk di lukis (*painting*)



**Gambar 3 Motif Hias pada Kain Katun**



**Gambar 4 Motif Hias Pada Kain Sutra**



**Gambar 5 Motif Hias pada Kain Satin**



**Gambar 6 Motif Hias pada Kain Sifon** Proses Pembuatan Teknik *Painting*  
Siapkan Kain yang sudah diberi motif jumputan

Membuat motif hias untuk teknik *painting*

Menjiplak motif pada kain

Memberi warna pada motif yang sudah dijiplak di kain dengan cara memberi warna pada motif yang lebih besar dilanjutkan ke motif yang lebih kecil

Memberi pinggiran atau gliter pada pinggiran motif bunga, daun, tangkai dan putik.

Setrika kain yang sudah dipainting pada bagian buruk agar cat tidak luntur.



Gambar 7 Hasil Penerapan Teknik Jumputan dan *Painting* pada Kain Katun



Gambar 8 Penetapan Teknik Jumputan dan *Painting* pada Kain Sutra



Gambar 9 Hasil Penetapan Teknik Jumputan dan *Painting* pada Kain Satin



Gambar 10 Hasil Penetapan Teknik Jumputan dan *Painting* pada Kain Sifon

### **Kualitas Hasil Perapan Motif Hias dengan Teknik Jumputan dan Teknik *Painting* pada Kain**

Kualitas hasil penelitian penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain, berdasarkan data yang diperoleh dari observasi uji panelis oleh ahli ditemukan bahwa hasil penelitian mendapatkan penilaian pada masing-masing bahan tekstil. Dalam eksperimen ini ada empat kain yang digunakan yaitu kain katun prima, kain sutra, kain satin dan kain sifon. Aspek penilaian berupa motif, perpaduan warna, penyerapan warna dan tekstur. Kualitas hasil penerapan motif hias dengan menggunakan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa kain katun prima mendapat skor 93,3 dengan kategori Sangat Baik. Karena dari 4 faktor yang dinilai dalam uji panelis masing-masing faktor memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu dari segi motif mendapat nilai 9,5. Perpaduan warna mendapat nilai 98,8, penyerapan warna mendapat nilai 94 dan tekstur mendapat nilai 87,3 semua aspek yang dinilai termasuk kategori Sangat Baik.

**Tabel 2 Kualitas Penerapan Motif Hias dengan Teknik Jumputan dan Teknik *Painting***

| No | Nama Kain        | Aspek Yang Dinilai |      |       |       | Skor  | Kriteria    |
|----|------------------|--------------------|------|-------|-------|-------|-------------|
|    |                  | 1                  | 2    | 3     | 4     |       |             |
| 1  | Kain katun prima | 95                 | 96.8 | 94    | 87.3  | 93.3  | Sangat Baik |
| 2  | Kain Sutra       | 94                 | 92.1 | 92.1  | 77.8  | 88.9  | Sangat Baik |
| 3  | Kain Satin       | 71                 | 76.2 | 60.3  | 95.2  | 75.79 | Baik        |
| 4  | Kain Sifon       | 68                 | 73   | 58.73 | 98.41 | 74.60 | Baik        |

Sedangkan hasil kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain sutra mendapat nilai 88,9 termasuk kategori Sangat Baik. Karena dari 4 faktor yang dinilai dalam uji panelis masing-masing faktor memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu dari segi motif mendapat nilai 94, perpaduan warna mendapat nilai 92,1, penyerapan warna mendapat nilai 92,1 dan tekstur mendapat nilai 77,8 semua aspek yang dinilai 3 aspek termasuk kategori Sangat Baik dan satu aspek yaitu tekstur mendapat nilai Baik.

Sedangkan hasil kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain satin mendapat nilai 75,79 termasuk kategori Baik. Karena dari 4 faktor yang dinilai dalam uji panelis masing-masing faktor memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu dari segi motif mendapat nilai 71. Perpaduan warna mendapat nilai 76,2, penyerapan warna mendapat nilai 60,3 dan tekstur mendapat nilai 95,2 semua aspek yang dinilai 3 aspek termasuk kategori Baik dan satu aspek yaitu tekstur mendapat nilai Sangat Baik.

Sedangkan hasil kualitas penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain sifon mendapat nilai 74,6 termasuk kategori Baik. Karena dari 4 faktor yang dinilai dalam uji panelis masing-masing faktor memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu dari segi motif mendapat nilai 68, perpaduan warna mendapat nilai 73, penyerapan warna mendapat nilai 58,73 dan tekstur mendapat nilai 98,41 semua aspek yang dinilai 3 aspek termasuk kategori Baik dan satu aspek yaitu tekstur mendapat nilai Sangat Baik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain katun prima dan kain sutra masuk kategori sangat baik dilihat dari segi motif, penerapan warna, penyerapan warna dan tekstur. Sedangkan penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain satin dan sifon penerapannya baik dilihat dari segi motif, penerapan warna, penyerapan warna dan tekstur.

#### **Kendala-kendala yang Ditemukan dalam Penerapan Motif Hias dengan Teknik Jumputan dan Teknik *Painting* pada Kain dan Penanggulangannya.**

Kendala yang pertama dalam proses pewarnaan jumputan menggunakan pewarna tekstil yang sama sehingga menghasilkan warna yang berbeda pada kain yang digunakan. Karena kain yang digunakan ada yang berasal dari serat alam dan dari serat buatan. Pada proses pewarnaan dengan menggunakan kain serat alam yaitu kain katun prima dan kain sutra warna dapat menyerap dengan baik, sedangkan pewarnaan pada kain serat buatan yaitu kain satin dan kain sifon tidak dapat menyerap dengan baik.

Kendala kedua yaitu pada proses penyetricaan kain yang sudah diberi warna dengan teknik jumputan, pada kain yang berasal dari serat alam yaitu kain katun prima dan kain sutra sangat sulit disetrica dan tidak bisa kencang seperti semula, sedangkan bahan yang berasal dari serat buatan yaitu kain satin dan kain sifon sangat mudah disetrica dan hasilnya kencang. Cara penanggulannya adalah kain katun prima dan

kain sutra disetrika dalam keadaan setengah basah untuk menghasilkan kain yang kencang.

Kendala yang ketiga adalah pada saat memindahkan/menjiplak motif pada kain sifon, karena kain sifon bahannya tipis dan licin sehingga susah pada saat penjiplakan, sehingga untuk dapat hasil yang baik pada saat menjiplak pada bagian motif dan kain diberi jarum pentul pada bagian sisi-sisinya.

Kendala keempat adalah pada saat penerapan teknik *painting*, yaitu karena sifat kain yang berbeda-beda sehingga perlakuannya dalam *painting* juga berbeda. Pada kain katun dan kain sutra pada proses *painting* cukup sulit karena kain yang sudah dijumpit tidak bisa kencang seperti kain sebelumnya, dan kain katun prima dan kain satin sangat higroskopis yaitu dapat menyerap air sehingga pada waktu pewarnaan harus ditambahkan dengan air, sehingga hasil pewarnaan tidak rata dan terdapat beberapa buliran pada kainnya. Sedangkan pada kain satin tidak ada masalah karena kainnya licin dan mudah dalam proses *painting*, sedangkan pada kain sifon teksturnya tipis dan tidak dapat menyerap air sehingga dalam pewarnaan catnya tidak boleh terlalu encer.

## PEMBAHASAN

### Proses Penerapan Motif Hias dengan Teknik Jemputan dan Teknik *Painting* pada Kain.

Pada dasarnya sebelum melaksanakan eksperimen, pertama-tama dimulai dari persiapan alat-alat dan bahan pada proses jemputan dan *painting*. Alat-alat yang digunakan dalam proses jemputan adalah yang terdiri dari alat pemanas seperti kompor, panci, waskom, sutil, timbangan, setrika. Sedangkan bahan yang digunakan dalam proses jemputan adalah kain katun prima, kain sutra, kain satin, kain sifon, dan pewarna tekstil. Alat-alat yang digunakan dalam proses *painting* yaitu kuas, palet, sterofom, tempat air, setrika. Sedangkan bahan yang digunakan adalah pewarna tekstil dan glitter.

### Kualitas Hasil Penerapan Motif Hias dengan Teknik Jemputan dan Teknik *Painting* pada Kain

Dalam penjabaran hasil dalam penerapan motif hias dengan teknik jemputan dan teknik *painting* pada kain dijabarkan seperti berikut: untuk jenis kain katun prima dilihat dari 4 aspek yang dinilai termasuk kategori sangat baik, kain sutra kategori sangat baik. Sedangkan kain satin dan kain sifon dalam penerapan motif hias dengan teknik jemputan dan teknik *painting* penerapannya baik. Hal ini disebabkan karena pada proses pewarnaan jemputan kain yang berasal dari serat alami yaitu kain katun prima dan kain sutra penyerapan warnanya sangat baik sehingga motif hias yang dihasilkan sangat baik, sesuai dengan karakteristik motif hias jemputan. Hal ini disebabkan karena kain katun prima dan kain sutra berasal dari serat alami yang memiliki sifat mudah menyerap warna dan mudah menyerap air. Sedangkan hasil penyerapan warna pada kain satin dan kain sifon kurang baik, motif jemputan tidak terlalu kelihatan karena warna tidak dapat menyerap dengan baik, hal ini disebabkan karena kain satin dan kain sifon berasal dari serat alam yang sudah mengalami penyempurnaan bahan dan kain satin dan sifon memiliki sifat yang tidak higroskopis/tidak menyerap air, sehingga warna jemputan tidak dapat terserap dengan baik.

### Kendala-kendala dalam Proses Penerapan Motif Hias dengan Teknik Jemputan dan Teknik *Painting* pada Kain dan Penanggulangannya

Kendala yang pertama dalam proses pewarnaan jemputan menggunakan pewarna tekstil yang sama sehingga menghasilkan warna yang berbeda pada kain yang digunakan. Karena kain yang digunakan ada yang berasal dari serat alam dan dari serat buatan. Pada proses pewarnaan dengan menggunakan kain serat alam yaitu kain katun prima dan kain sutra warna dapat menyerap dengan baik, sedangkan

pewarnaan pada kain serat buatan yaitu kain satin dan kain sifon tidak dapat menyerap dengan baik.

Kendala kedua yaitu pada proses penyetricaan kain yang sudah diberi warna dengan teknik jumputan, pada kain yang berasal dari serat alam yaitu kain katun prima dan kain sutra sangat sulit disetrica dan tidak bisa kencang seperti semula, sedangkan bahan yang berasal dari serat buatan yaitu kain satin dan kain sifon sangat mudah disetrica dan hasilnya kencang. Cara penanganannya adalah kain katun prima dan kain sutra disetrica dalam keadaan setengah basah untuk menghasiklan kain yang kencang.

Kendala yang ketiga adalah pada saat memindahkan/menjiplak motif pada kain sifon, karena kain sifon bahannya tipis dan licin sehingga susah pada saat penciplakan, sehingga untuk dapat jiplakan yang baik pada saat menjiplak pada bagian motif dan kain diberi jarum pentul pada bagian sisi-sisinya.

Kendala keempat adalah pada saat penerapan teknik *painting*, yaitu karena sifat kain yang berbeda-beda sehingga perlakuannya dalam *painting* juga berbeda. Pada kain katun dan kain sutra pada proses *painting* cukup sulit karena kain yang sudah dijumpit tidak bisa kencang seperti kain sebelumnya, dan kain katun prima dan kain satin sangat higroskopis yaitu dapat menyerap air sehingga pada waktu pewarnaan harus ditambahkan dengan air sehingga hasil pewarnaan tidak rata dan terdapat beberapa buliran pada kainnya. Sedangkan pada kain satin tidak ada masalah karena kainnya licin dan mudah dalam proses *painting*, sedangkan pada kain sifon teksturnya tipis dan tidak dapat menyerap air sehingga dalam pewarnaan catnya tidak boleh terlalu encer.

## PENUTUP

### *Simpulan*

Proses penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada bahan tekstil, yang dimulai dari persiapan alat-alat, bahan tekstil,

pembuatan desain/motif hias, mengikat kain, proses pencelupan, menjiplak motif pada bahan tekstil, lalu mencampur cat, baru memulai melukis/*painting* baru finishing.

Penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain katun prima dan kain sutra penerapannya sangat baik dilihat dari segi motif, penerapan warna, penyerapan warna dan tekstur. Sedangkan penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain satin dan sifon penerapannya baik dilihat dari segi motif, penerapan warna, penyerapan warna dan tekstur.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam penerapan motif hias dengan teknik jumputan dan teknik *painting* pada kain yaitu, proses pewarnaan jumputan, proses penyetricaan, proses pewarnaan *painting*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Asiani (2013) *Perbedaan Corak Kain Katun dan Kain Sutra dengan Teknik Jumputan*. Jurnal Iktiar volume 11 No 2 April-juni 2013.
- Garnadi, Yati Mariana. 2005. *Melukis di atas Kain*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Handoyo Joko Dwi. 2008. *Batik dan Jumputan*. Yogyakarta. Macanan Jaya Cemerlang.
- Poespo Goes. 2005. *Pemilihan Bahan Tekstil*. Yogyakarta. Kanisius.**
- Suhersono, Hery. 2004. *Desain Motif*. Jakarta. Puspa Terampil.
- Wahyupuspitowati. 2006. *Melukis Kain*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Hasyim Henny. 2010. *Tie Dye*. Surabaya. Tiara Aksara.
- Rasyid Djufri. 1976. *Teknologi pengelantangan, pencelupan dan pencapan*. Bandung: Institut Teknologi Tekstil.

## **PERAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI BALI**

**<sup>1</sup>I Nengah Suarmanayasa, <sup>2</sup>Ni Made Pratiwi Pendit**

<sup>1</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

<sup>2</sup>Staf Badan Pusat Statistik Kabupten Buleleng  
e-mail: [suarmanayasa\\_undiksha@yahoo.com](mailto:suarmanayasa_undiksha@yahoo.com)

### ***ABSTRACT***

*LPD as financial institutions of Bali indigenous communities have an important role in the functioning of financial intermediation. Since its establishment, the LPD showed a very good performance as evidenced by the increase throughout the financial component. This is very good considering the LPD profits must be returned to the community in the form of village development funds and social funds. This social function should be able to ease the burden on society that could ultimately help the government in poverty Alleviation. But, the reality is happening in different communities. Improved performance LPD was not in line with the poverty conditions in the field. The poverty rate in Bali province has always increased.*

*This study aims to determine the effect of LPD's performance against the number of poor people in Bali province. This study uses data from the years 2007 - 2011 in the form of annual data obtained from PT Bank BPD Bali, PLPDP Bali and BPS Bali. Data collection method used is the documentation method, further that data analysis by multiple linear regression models. The results of this study are reflected by the performance of LPD profit contributed in reducing poverty, but other indicators such as the increase in total loans and total assets of LPD does not affect poverty alleviation in Bali Province.*

**Keywords:** *poverty, LPD performance.*

## ABSTRAK

LPD sebagai lembaga keuangan komunitas adat Bali memiliki peran penting dalam fungsi intermediasi keuangan. Sejak pendiriannya, LPD menunjukkan kinerja sangat baik yang dibuktikan dengan meningkatnya seluruh komponen keuangan. Hal ini sangat bagus mengingat keuntungan LPD harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana pembangunan desa dan dana sosial. Fungsi sosial ini harusnya dapat meringankan beban masyarakat yang pada akhirnya bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Tetapi, kenyataan yang terjadi di masyarakat berbeda. Peningkatan kinerja LPD ternyata tidak sejalan dengan kondisi kemiskinan di lapangan. Angka kemiskinan di Provinsi Bali selalu mengalami peningkatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja LPD terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2007 - 2011 dalam bentuk data tahunan yang diperoleh dari PT Bank BPD Bali, PLPDP Bali dan BPS Bali. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis data dengan model regresi linear berganda. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kinerja LPD yang dicerminkan oleh perolehan laba berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi indikator yang lain seperti peningkatan jumlah kredit dan jumlah aset LPD tidak memengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bali.

**Kata kunci :** kemiskinan, kinerja LPD.

## PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan desa yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan cara menciptakan dan memberikan pelayanan di bidang keuangan. LPD merupakan salah satu kearifan lokal Bali yang dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat (*krama*). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD menyatakan bahwa LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk *krama* desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa LPD merupakan suatu bentuk lembaga ekonomi, yang oleh Perda diakui dan dikukuhkan dalam status hukum sebagai suatu bentuk badan usaha keuangan, dengan sifat yang bersifat khusus, karena hanya menyelenggarakan kegiatan usaha dalam wilayah *desa pakraman*.

Sebagaimana terurai dalam tujuannya, dari sejak awal berdirinya LPD diharapkan (1) mampu mendorong

pembangunan ekonomi masyarakat di daerah Bali melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, (2) memberantas sistem ijon, gadai gelap dan lain-lain yang bisa disamakan dengan itu di pedesaan, (3) menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi warga pedesaan, baik yang bisa ditampung oleh usaha-usaha produktif masyarakat yang dibiayai oleh LPD, dan (4) meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. (profile LPD, 2004).

Sejak pendirian pertamanya, LPD telah mencapai kinerja sangat baik. Berdasarkan data dari Bank BPD Bali, setelah pemerintah provinsi menargetkan pendirian sebuah LPD di masing-masing *desa pakraman*, jumlah LPD yang beroperasi bertambah dari 953 di tahun 2001 dan menjadi 1.418 pada tahun 2011. Pada Tabel 1.1 ditunjukkan bahwa semua indikator keuangan mengalami perkembangan rata-rata di atas 200 persen. Perkembangan fantastis terjadi tahun 1995-2001, yakni mengalami peningkatan di atas 500 persen, padahal pada periode tersebut

masih terjadi krisis moneter dan ekonomi. Ini membuktikan bahwa LPD sebagai lembaga keuangan berbasis adat mempunyai daya tahan dan stamina untuk bertahan

hidup sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali (Suartana, 2009).

**Tabel 1.1 Perkembangan LPD Bali Tahun 1995 – 2011**

| Indikator               | 1995 | 2001  | 2005  | 2009  | 2011  |
|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah LPD              | 848  | 953   | 1.304 | 1.379 | 1.418 |
| Total Asset (milyar)    | 97   | 696   | 1.743 | 4.228 | 6.583 |
| Total Kredit (milyar)   | 75   | 512   | 1.262 | 3.12  | 4.79  |
| Total Simpanan (milyar) | 70   | 540   | 1.346 | 3.41  | 5.401 |
| Jumlah Karyawan         | -    | 4.872 | 6.479 | 7.139 | 7.367 |

Sumber : PLPDP Bali, Tahun 2012

Jumlah aset LPD mengalami pertumbuhan dari Rp 696 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 1,7 trilyun pada tahun 2005 dan menjadi Rp 6,5 trilyun pada tahun 2011. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pinjaman berjalan yang tinggi pada periode itu. Selain itu, pendirian LPD baru juga meningkatkan jumlah aset pada periode yang sama. Dana pihak ketiga, yang terdiri dari tabungan dan deposito meningkat dari Rp 540 milyar pada tahun 2001 menjadi Rp 1,3 milyar pada tahun 2005 dan mencapai Rp 5,4 milyar pada tahun 2011. Kredit yang diberikan dari Rp 512 milyar pada tahun 2001 meningkat

menjadi Rp 1,2 milyar pada tahun 2005 dan mencapai Rp 4,7 milyar pada tahun 2011. Jumlah karyawan yang diserap sebanyak 6,4 ribu orang pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 7,3 ribu orang pada tahun 2011. Pada tahun 2000, 926 LPD melayani 895.512 nasabah (dari total jumlah penduduk sebesar 3,054 juta di Bali), yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa satu di antara tujuh rumah tangga terjangkau oleh sebuah LPD, suatu tingkat jangkauan yang dianggap Bank Indonesia dan GTZ tidak tertandingi di Indonesia (Bank Indonesia dan GTZ, 2000).

**Tabel 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2014 - September 2014**

| Daerah/Tahun       | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Persentase Penduduk Miskin |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Perkotaan</b>   |                               |                            |
| Maret 2014         | 99,90                         | 4,01                       |
| September 2014     | 109,20                        | 4,35                       |
| <b>Perdesaan</b>   |                               |                            |
| Maret 2014         | 85,30                         | 5,34                       |
| September 2014     | 86,76                         | 5,39                       |
| <b>Kota + Desa</b> |                               |                            |
| Maret 2014         | 185,20                        | 4,53                       |
| September 2014     | 195,95                        | 4,76                       |

Sumber : Badan Pusat Statistik Bali, 2015

Peningkatan kinerja LPD ternyata tidak sejalan dengan kondisi kemiskinan di Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2014 mencapai 195,95 ribu orang (4,76 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014, maka selama enam bulan tersebut terjadi pertambahan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 10,75 ribu orang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kinerja Lembaga Perkreditan Desa terhadap penanggulangan kemiskinan di Propinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris dan menjelaskan pengaruh kinerja Lembaga Perkreditan Desa terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.

Kinerja sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat menentukan dalam perkembangan perusahaan, karena tujuan dari sebuah perusahaan pada umumnya terdiri dari: tetap berdiri atau eksis (*survive*), untuk mendapatkan laba (*benefit*) dan berkembang (*growth*), semua ini dapat tercapai apabila perusahaan tersebut mempunyai performa yang baik. Kinerja

perusahaan dapat dilihat dari tingkat penjualan, tingkat keuntungan, tingkat pengembalian modal, tingkat *turn over* dan pangsa pasar yang diraihinya.

Kemiskinan dalam pengertian konvensional merupakan pendapatan (*income*) dari suatu kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu seringkali berbagai upaya pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Padahal sebenarnya, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang

tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah jumlah aset, jumlah kredit, dan jumlah laba serta jumlah penduduk miskin di Propinsi Bali. Ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas pada pengaruh variabel kinerja LPD terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Bali tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Data yang digunakan dalam

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda model *double log* yang dibantu dengan program komputer SPSS 17.0. Berdasarkan rangkuman hasil analisis data yang terdapat pada Tabel 4.2 maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :  $\text{Ln}\hat{Y} = 9,159 + 0,987 \text{Ln} X_1 + 0,285 \text{Ln} X_2 - 1,456 \text{Ln} X_3$

Variabel aset dan kredit LPD tidak berpengaruh terhadap penurunan atau peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Bali. Ini dibuktikan oleh nilai signifikansi kedua variabel tersebut di atas 0,05.

penelitian ini adalah data kuantitatif yakni data yang berbentuk angka-angka seperti data jumlah aset, jumlah kredit yang diberikan, jumlah laba dan jumlah penduduk miskin. Data tersebut adalah data tahunan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Variabel-variabel yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

Variabel terikat (*dependent variabel*) yang terdiri atas jumlah penduduk miskin

Variabel bebas (*independent variabel*) yang terdiri atas jumlah aset, jumlah kredit dan jumlah laba LPD.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut dapat dihitung dengan alat bantu komputer yaitu SPSS Versi 17.0 *For Windows*. Model regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_t$$

Keterangan :

= Penduduk miskin

$X_1$  = jumlah aset

$X_2$  = jumlah kredit

$X_3$  = jumlah laba

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien Regresi

$\beta_0$  = Intersep

$\mu_t$  = Faktor kesalahan atau gangguan stokhastik

Signifikansi variabel aset sebesar 0,518 dan nilai signifikansi variabel kredit sebesar 0,857. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jumlah kredit yang disalurkan belum secara optimal dimanfaatkan oleh masyarakat atau kemungkinan kredit yang disalurkan LPD belum menyentuh masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan.

Nilai estimasi koefisien laba  $\hat{\beta}_3 = -1,456$  memiliki arti jika laba LPD meningkat sebesar satu persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali menurun sebesar 1,456 persen dengan asumsi jumlah aset

dan kredit LPD konstan, begitu juga berlaku sebaliknya. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa laba berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf nyata 5 persen.

Kontribusi LPD dalam penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari laba LPD yang bersangkutan. Secara konseptual menurut Perda No. 8 tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Perda No. 4 tahun 2012, pembagian sisa hasil usaha (laba) LPD lebih banyak dinikmati oleh krama desa adat yang bersangkutan. Apabila labanya menurun maka secara otomatis alokasinya terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. Dengan demikian ada dua jalur dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan di Provinsi Bali. Jalur pertama LPD membiayai usaha kecil, jalur berikutnya adalah usaha kecil membuka lapangan kerja sekaligus menanggulangi kemiskinan.

Bank BPD Bali menyebutkan empat dampak positif LPD bagi pembangunan perdesaan, yaitu: 1) dengan adanya LPD, desa adat telah mendapatkan sumber biaya pembangunan sebesar 20 persen dari laba bersih, sedangkan untuk kepentingan lainnya bersumber dari dana sosial yang besarnya 5 persen; 2) LPD telah ikut serta menunjang program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan, serta memperluas kesempatan kerja; 3) ikut mendorong laju pertumbuhan industri kecil di perdesaan sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat desa semakin baik; dan dengan keberhasilan yang dicapai, LPD juga berperan sebagai objek penelitian tentang pemberdayaan ekonomi rakyat.

Secara sosial dan religius, peran LPD di Bali juga sangat jelas. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 perda LPD disebutkan bahwa pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun akan dipergunakan, untuk cadangan modal 60 persen, dana pembangunan desa 20 persen, jasa produksi 10 persen, dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan 5 persen, dan dana sosial 5 persen. Perda tersebut mewajibkan LPD

untuk menyumbangkan 20 persen dari laba yang diperolehnya setiap tahun untuk kepentingan desa dan banjar adat.

Disamping dipergunakan untuk pembangunan fisik desa dan banjar, bagian dana yang diperoleh dari LPD tersebut, oleh warga desa biasanya juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan upacara agama. Ini berarti bahwa disamping memiliki fungsi ekonomi yang luas, LPD juga memiliki fungsi sosial dan agama yang sangat tinggi di seluruh Bali. Kontribusi nyata lain yang berhasil disumbangkan LPD adalah dalam hal meringankan biaya upacara. Ada beberapa LPD yang menyelenggarakan program *Iuran Dana Ngaben* yang dananya baru bisa dicairkan pada pelaksanaan upacara ngaben. Masyarakat sangat antusias menyambut program ini karena dirasakan bermanfaat sekali. Masyarakat menjadi ringan bebannya sehingga bisa menciptakan keheningan dan kesucian dalam melaksanakan upacara tanpa harus memikirkan beban pendanaan yang berlebihan (Suartana, 2009).

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

Variabel jumlah aset dan kredit tidak berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Bali.

Jumlah laba LPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka diharapkan pengurus LPD lebih memprioritaskan pemberian kredit kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini masyarakat kecil/miskin yang tidak tersentuh oleh layanan perbankan konvensional. Pengurus juga harus ingat akan roh pendirian LPD. Bahwa LPD didirikan untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi

warga desa agar nantinya angka kemiskinan  
**UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yng Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lemlit dan FE Undiksha, Ketua PLPDP Provinsi Bali atas dukungan, semangat dan kerjasamanya yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan anugerahnya kepada kita semua, serta semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Adams, Dale W. & Delbert A. Fitchett, editors. 1992. *Informal Finance in Low-Income Countries*. Boulder, CO. : Westview Press
- Arsyad, Lincolin. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro : Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Bank Indonesia, The & GTZ. 2000. *Legislation, Regulation and Supervision of Microfinance Institutions in Indonesia, Project ProFi*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- di wilayah *desa pakraman* bisa berkurang  
Gunawan. 2009. Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi (Studi Pada LPD di Bali. Singaraja: Univrsitas Panji Sakti. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Volume 7 Nomor 2 Mei 2009
- Peraturan Daerah ProVinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa
- Kaplan, Robert and David P. Norton. 1996. *The Balance Scorecard*. Harvard Business Scholl Press.
- Ledgerwood, Joanna. 1999. *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perpective*. Washington, D.C.: The World Bank
- Suartana, I Wayan. 2009. *Arsitektur Pengelolaan Risiko pada Lembaga Perkreditan desa (LPD)*. Udayana University Press
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung
- Sumodingingrat, Gunawan. 2003. Peran Lembaga Keuangan dalam Menanggulangi Kemiskinan terkait dengan Kebijakan Otonomi daerah. [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)
- Sutopo, Wahyudi. 2005. Hubungan antara Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Usaha Kecil dalam Penanggulangan Kemiskinan. Usahawan No. 01 Tahun XXXIV, Januari
- Wiwin, 2012. Pengaruh Institusi (Good Governance) Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus LPD di Bali). *Jurnal Piramida*, Vol. Viii, No. 1 : 45-55, Juli 2012. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

## **PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF WARGA BELAJAR DENGAN PENDEKATAN *ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)* DALAM MENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI PROVINSI BALI**

**I Ketut Sudita<sup>1</sup>, Nengah Suandi<sup>2</sup>, Dewa Nyoman Sudana<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Jurusan Pendidikan Seni Rupa Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia <sup>2</sup> Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia <sup>3</sup> Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

### ***ABSTRACT***

*Creative economy in the tourism sector can be a model of economic development that has enough potential to improve the economy of communities in Bali. To develop the creative economy, need space of ideas to work, as well as self-actualization and creative ideas. Groups of learners are groups of people as a mirror that should be a place of creative economic development and need priority in the program of strengthening and expansion of the economy, particularly in Bali. This study aims to (1) Generate innovative design of the craft (creative economy) people learn to approach one village one product (OVOP) in accordance with the potential existence exists, (2) Generate marketing strategies creative economy approach OVOP in a broader scale, (3) innovative design approach OVOP to meet the market and the formation of business groups into groups permanent, and (4) producing an educational system and implementation strategy of economic learning creative approach OVOP is based on the Standards of Competence and the Basic Competency. the results showed that the producers included in the category of independent business, and has had a Certificate of literacy. The craftsmen as the learners have been able to produce a wide variety of products such as laptop bags, sokasi, a pen case, a place with a variety of offerings. People learn as craftsmen have been able to develop product design combined with a variety of materials in accordance with the conditions and demands of the market, supported by local potentials. People has been able to adopt and implement marketing strategies craft products in a wider scale. The craftsmen had the knowledge, insight into the various design and marketing strategies. People learn as craftsmen have formed the group permanently. People learn as craftsmen have had a wider network, with local governments, universities, and employers through focus group discussions have been conducted in the Ganesha University of Education.*

**Key words:** *creative economy, OVOP, tourism.*

## ABSTRAK

Ekonomi kreatif pada sektor wisata dapat menjadi sebuah model pengembangan ekonomi yang cukup potensial untuk meningkatkan perekonomian kelompok-kelompok masyarakat di Provinsi Bali. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, diperlukan ruang atau wadah sebagai tempat penggalan ide, berkarya, sekaligus aktualisasi diri dan ide-ide kreatif. Kelompok warga belajar adalah kelompok masyarakat sebagai cermin yang patut menjadi wadah pengembangan ekonomi kreatif dan mendapat prioritas dalam program penguatan dan perluasan ekonomi, khususnya di provinsi Bali. Bertolak dari pemikiran ini, penelitian ini bertujuan untuk (1) Menghasilkan desain yang inovatif mengenai kerajinan (ekonomi kreatif) warga belajar dengan pendekatan one village one product (OVOP) sesuai dengan potensi eksisting yang ada, (2) Menghasilkan strategi pemasaran ekonomi kreatif dengan pendekatan OVOP dalam skala yang lebih luas, (3) Perbaiki desain yang inovatif dengan pendekatan OVOP untuk memenuhi pasar dan pembentukan kelompok usaha pengerajin menjadi kelompok yang permanen, dan (4) Menghasilkan sistem edukasi dan strategi pelaksanaan pembelajaran ekonomi kreatif dengan pendekatan OVOP berdasarkan pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengerajin termasuk dalam kategori keaksaraan usaha mandiri, dan telah memiliki Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Para pengerajin sebagai warga belajar telah mampu menghasilkan berbagai variasi produk seperti tas laptop, sokasi, tempat pulpen, tempat sesajen dengan berbagai variasi. Warga belajar sebagai pengerajin telah mampu mengembangkan desain produk dikombinasikan dengan berbagai bahan sesuai dengan kondisi dan tuntutan pasar, yang didukung oleh potensi lokal yang ada. Warga belajar telah mampu mengadopsi dan menerapkan strategi pemasaran produk kerajinan dalam skala yang lebih luas. Para pengerajin telah memiliki pengetahuan, wawasan mengenai berbagai desain dan strategi pemasaran. Warga belajar sebagai pengerajin telah terbentuk kelompok secara permanen. Warga belajar sebagai pengerajin telah memiliki jaringan yang lebih luas, dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pengusaha melalui diskusi kelompok terbatas yang telah dilakukan di kampus Universitas Pendidikan Ganesha.

**Kata-kata kunci:** ekonomi kreatif, OVOP, pariwisata.

## PENDAHULUAN

Suparwoko (2010) menyatakan bahwa sinergi antara ekonomi kreatif dengan sektor wisata merupakan sebuah model pengembangan ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan di Indonesia, termasuk Provinsi Bali. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata dibutuhkan konektivitas, yaitu dengan menciptakan *outlet* produk-produk kreatif di lokasi yang strategis dan dekat dengan lokasi wisata. *Outlet* tersebut dapat berupa counter atau sentra kerajinan yang dapat sekedar membeli souvenir, tetapi juga melihat proses pembuatannya dan bahkan ikut serta dalam proses pembuatan tersebut (souvenir sebagai memorabilia). Sujana (2013) pengembangan dan peneympurnaan ekonomi kreatif dalam skala yang lebih luas, melibatkan kelompok warga belajar desa-desa lain. Di samping itu, hasil/produksi ekonomi kreatif warga belajar telah diterima oleh perusahaan mitra sebagai komoditi siap eksport.

Apri dkk, (2010) mengkaji tentang peningkatan produktifitas kelompok pengrajin kipas dengan salah satu caranya yakni memberikan pelatihan desain grafis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengkreasikan berbagai macam desain melalui media komputer. Dengan demikian masyarakat pengrajin akan lebih kreatif, tidak hanya secara dalam mendesain gambar dengan perangkat teknologi komputer juga paham tentang membuat gambar yang bagus dan menarik untuk di upload di internet melalui web. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Heni (2009) diklasifikasikan dua macam kelompok pengrajin kayu yakni kelompok karya terapan (meubeler dan perkakas rumah tangga) dan non terapan (souvenir dan hiasan).

Dalam mengembangkan ekonomi kreatif ada beberapa faktor yang menghambat dan mendukung. Faktor penghambat adalah tidak tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya modal, dan faktor pemasaran. Sedangkan faktor pendukungnya

antara lain ketersediaan bahan baku, kelengkapan peralatan, jumlah pesanan dan kerjama terhadap *stakeholders*. Ekonomi kreatif merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam menggerakkan sektor pariwisata. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.10 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Pariwisata dilakukan baik secara individual, keluarga, kelompok, dan paguyuban organisasi sosial. Pada umumnya pariwisata secara konvensional akan mengunjungi objek dan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus. Objek wisata didukung oleh tiga unsur pokok yaitu (1) *main tourism superstructure* (sarana pokok kepariwisataan) yang meliputi agen perjalanan, transportasi, restoran, objek wisata dan atraksi wisata, (2) *supplementing tourism* atau sarana pelengkap kepariwisataan yang meliputi fasilitas rekreasi dan olah raga, serta prasarana umum, seperti: jalan raya, jembatan, listrik, lapangan udara, telekomunikasi, air bersih, pelabuhan, (3) *supporting tourism superstructure* yang meliputi hiburan malam, *entertainmen, mailing service*, dan *souvenir shop*.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. UNDP (2008) yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya. Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif dapat mencakup banyak aspek.

Departemen Perdagangan (2008) mengidentifikasi setidaknya 14 sektor yang termasuk dalam ekonomi kreatif yaitu: (1)

periklanan, (2) arsitektur, (3) pasar barang seni, (4) kerajinan (*handicraft*), (5) desain, (6) *fashion*, (7) film, video, dan fotografi, (8) permainan interaktif, (9) musik, (10) seni pertunjukan, (11) penerbitan dan percetakan,

layanan komputer dan piranti lunak, (13) radio dan televisi, (14) riset dan pengembangan.

Keaksaraan usaha mandiri adalah merupakan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencaharian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.

*One Village One Product (OVOP)* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wadah koperasi atau UKM. Tujuan *OVOP* adalah (1) Mengembangkan komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi pemasaran lokal maupun internasional, (2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta nilai, (3) tambah produk, agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri (Impor), (4) Khusus kegiatan *OVOP* yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengembangkan *OVOP* harus melalui Koperasi, (5) Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kriteria Produk Program *OVOP*: (a) Merupakan unggulan daerah yang telah dikembangkan turunterurun; (b) Merupakan produk khas daerah setempat; (c) Berbasis pada sumberdaya lokal; (d) Memiliki penampilan dan kualitas produk yang sesuai tuntutan pasar; (e) Memiliki peluang pasar, baik domestik maupun internasional; (f) Memiliki nilai ekonomi yang tinggi; (e) Bisa menjadi penghela bagi perekonomian daerah.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengembangan desain yang inovatif mengenai kerajinan (ekonomi kreatif) warga belajar

dengan pendekatan *OVOP* sesuai dengan potensi eksisting yang ada? (2) Bagaimanakah strategi pemasaran ekonomi kreatif dalam skala yang lebih luas dengan pendekatan *OVOP*? (3) Bagaimanakah memperbaiki desain yang inovatif berkualitas dengan pendekatan *OVOP* untuk memenuhi pasar dan pembentukan kelompok usaha pengerajin yang permanen? (4) Bagaimanakah sistem edukasi dan strategi pelaksanaan pembelajaran ekonomi kreatif dengan pendekatan *OVOP*?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, yang difokuskan pada warga belajar (WB) yang telah lulus melaksanakan keaksaraan dasar dan mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Warga Belajar yang telah mendapatkan SUKMA dimantapkan kembali melalui keaksaraan usaha mandiri sekaligus mengembangkan kemampuan/keterampilan usaha warga belajar dalam bentuk ekonomi kreatif dengan pendekatan *OVOP*. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Data dalam penelitian ini berwujud data kualitatif. Data ini dianalisis dengan melakukan berbagai kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, penafsiran data, dan menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992; Faisal, 1995). Dalam analisis ini data disusun yakni digolongkan dalam kategori, konsep, proposisi atau tema-tema tertentu. Kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan penyajian data, merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan bisa berlangsung secara ulang-alik, sampai mendapatkan hasil penelitian akhir, yakni etnografi yang holistik dan sarat makna, dalam konteks pemberian jawaban terhadap masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

## **HASIL**

Hasil ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi

produk unggulan dengan pendekatan *one village one product* di Bali dapat dipaparkan sebagai berikut.

**Kerajinan Bambu, di Desa Tigawasa.**  
Desa Tigawasa terletak pada ketinggian 500 s/d 700 m dari permukaan air laut, dengan suhu udara rata-rata 27<sup>0</sup>C sampai 35<sup>0</sup>C, dengan luas wilayah Desa Tigawasa adalah 1690 Ha, dari pegunungan sampai ke pantai (laut) Tukad Cebol (kini Desa Kaliasem ) kampung Bunut Panggang, Bingin Banjah dan Kampung Labuan Aji adalah wilayah Desa Tigawasa. Dahulu ketika masih jaman penjajahan Belanda, kampung-kampung yang tersebut di atas itu semua diperintah oleh Perbekel Desa Tigawasa. Karena itu orang-orang penduduk kampung yang mempunyai tanah sawah, kebun, ladang dalam wilayah Desa Tigawasa kena tiga sana (sarining tahun) tiap-tiap tahun yang berupa uang atau padi, yang dijadikan kas pura, dan tiga sana padi disimpan di *jineng sanghiyang* (Lumbung) di Pura Desa. Pengerajin bambu di Desa Tigawasa menghasilkan berbagai jenis sokasi, tempat pulpen, tempat sesajen, taplak meja dari anyaman bambu, dan tas laptop, tempat laptop dengan berbagai ukuran.

## **Kerajinan Ingke Lidi Pohon Lontar di Desa Tembok.**

Desa Tembok terletak di daerah yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah salah satunya adalah pohon ental. Sebagian besar masyarakat di Desa Tembok sangat memanfaatkan pohon ental, dimulai dari daun, batang dan buahnya yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan minuman tuak yang menjadi minuman tradisional masyarakat Bali. Sebagaimana dijelaskan mengenai kondisi alamnya, Desa Tembok memiliki kondisi alam yang indah yang menjadikan Desa Tembok menjadi salah satu akomodasi pariwisata bagi para investor. Dapat ditemui banyak hotel, villa dan bungalow disekitaran Desa Tembok dan dengan mudah dapat ditemukan penunjuk jalan menuju lokasi tersebut. Dari segi mata pencaharian, mayoritas penduduk di Desa

Tembok bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Namun, tidak terlepas juga masyarakat yang bekerja ke luar daerah untuk merantau mencari pekerjaan karena masalah ekonomi yang mereka temui sehingga, masyarakat merasa perlu untuk merantau baik keluar kabupaten maupun pulau. Disamping itu, terdapat juga kelompok masyarakat yang memanfaatkan potensi alam sekitar dengan membentuk perkumpulan pengerajin *Ingka*.

Berdasarkan temuan kegiatan ekonomi kreatif di lapangan bahwa di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula terdapat dikembangkan motif dan *design* Baru untuk Kerajinan *Ingke* Lidi Lontar. Namun, motif dan *design ingke* yang terdapat di desa Tembok cenderung monoton dan belum memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Maka dari itu, peneliti bersama warga belajar mengembangkan motif dan desain baru yang lebih bervariasi sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Saat musim hujan, *ingke* yang ada di Desa Tembok berubah warna menjadi kuning karena kurang mendapat penyinaran dari sinar matahari. Mengingat pada saat musim hujan, suhu menjadi turun sehingga udara menjadi lembab yang menyebabkan *ingke* cenderung jamur. Bahan kimia sebagai pengawet *ingke* belum ditemukan oleh pengerajin, dan akhirnya ditawarkan pengawet kimia dengan resiko efek samping. Strategi pemanasan yang paling baik di musim hujan adalah meletakkan di kamar, dengan suhu relative lebih panas. Usaha lain adalah dengan mencoba menemukan zat-zat antibakteri yang dapat mengawetkan bahan kerajinan *ingke* saat musim hujan agar tetap dapat dipergunakan dan mampu menjadi bahan yang baik untuk kerajinan *ingke*. Kerajinan *ingke* Desa Tejakula, relatif lebih menarik dari tampilan, warna dan lebih lentur, bila dibandingkan dengan *ingke-ingke* di tempat lain. Selain itu, kerajinan *ingke* di Desa Tembok didukung dengan potensi bahan baku yang relatif mendukung, untuk mengembangkan *one village one product* (OVOP).

### **3. Kerajinan Ukiran Patung Akar Kelapa Desa Penuktukan.**

Desa Penuktukan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Tejakula, dengan keadaan penduduk yang cukup padat didukung oleh adanya potensi desa yang cukup baik. Banyak terdapat kegiatan/usaha yang dapat dilakukan oleh warga desa, seperti adanya industri rumah tangga, kelompok nelayan, serta banyak lagi yang lainnya. Industri rumah tangga pembuatan patung akar kelapa mendapat perhatian yang khusus karena karya seni patung berbahan dasar akar kelapa sangat jarang dijumpai di daerah lain dan ini merupakan ciri khas dari Desa Penuktukan. Di Desa Penuktukan, ditemukan bahwa bentuk patung yang dihasilkan pengerajin bersifat monoton. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, ini ditunjukkan dengan adanya internet yang dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas. Semua informasi yang diinginkan tersedia di internet. Di kantor desa Penuktukan sudah tersedia internet dan para perangkat desa sudah bisa menggunakan internet namun desa Penuktukan belum memiliki web/blog desa untuk memperluas jaringan pemasaran wisata bahari dan produk kerajinan patung sangat diperlukan sarana untuk memperkenalkan potensi Desa Penuktukan (khususnya pemasaran) kepada khalayak umum melalui internet. Melalui pembuatan blog desa, potensi Desa Penuktukan bisa dikenal oleh khalayak dan pemasaran wisata bahari dan produk kerajinan patung juga bisa lebih dijangkau oleh masyarakat luas. Hal tersebut mendorong kami untuk melakukan pembuatan website/blog Desa Penuktukan.

**Kerajinan Padas di Desa Blahkiuh.** *Desa Pakraman* Blahkiuh merupakan ibu kota Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang memiliki aset kesenian yang tersohor di Bali seperti Tari Kecak, Parwa, Arja Basur, Joged Bumbung, dan seni ukiran. Batas wilayah *desa pakraman* Blahkiuh

sebelah utara berbatasan dengan Desa Sangeh, sebelah timur berbatasan dengan Tukad Yeh Adeng, sebelah selatan berbatasan dengan *desa pakraman* Abiansemal, dan sebelah barat berbatasan dengan Tukad Yeh Penet. *Desa pakraman* Blahkiuh juga memiliki tiga tempat pembakaran mayat (Setra). Di *desa pakraman* Blahkiuh terdapat Bumi Perkemahan Pramuka Dukuh yang cukup terkenal di Bali. Bumi Perkemahan ini adalah lahan milik Anak Agung Mayun yang merupakan raja pada zaman dulu yang sekarang pengelolaannya diserahkan ke *Desa pakraman* Blahkiuh termasuk Pura Luhur Giri Kusuma. *Desa pakraman* Blahkiuh juga dipimpin oleh seorang Bendesa. *Desa pakraman* Blahkiuh terdiri dari 8 Banjar (Bali)/Dusun yaitu Banjar Kembang Sari, Banjar Ulanan I, Banjar Ulanan II, Banjar Delod Pasar, Banjar Tengah, Banjar Benekawan, Banjar Pikhah, Banjar Pacung. Disini terjadi keunikan pada Banjar Pacung, secara teritorial dan kedinasan Banjar Pacung berada di Desa Adat Sangeh, tetapi secara adat masuk ke dalam wewidangan *desa pakraman* Blahkiuh. Kerajinan yang banyak dikembangkan di *desa pakraman* Blahkiuh adalah kerajinan ukiran padas, yang didukung dengan potensi lokal di *desa pakraman* Blahkiuh.

**Kerajinan Bambu di Desa Sulahan.** *Desa pakraman* Sulahan, kecamatan Susut, kabupaten Bangli, memiliki luas wilayah 8,571 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk per Desember 2014 adalah 8,170 jiwa dengan jumlah wilayah bawahan 9 sembilan banjar dinas. Mata pencaharian masyarakat desa Sulahan ada di sektor pertanian dalam arti luas, perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri rumah tangga atau ekonomi kreatif. Sektor ekonomi kreatif menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Sulahan, terutama kerajinan bambu. Kerajinan bambu tersebut di jual di lingkungan masyarakat lokal dan sampai keluar daerah. Kerajinan bambu di Desa Sulahan telah dikembangkan dengan inovasi berbagai desain, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Di Desa Sulahan di

Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebagai pengrajin bambu karena didukung oleh potensi bambu di Desa Sulahan.

### **Kerajinan Batok Kelapa di Desa Abang Karangasem.**

Di desa Waliang, Karangasem, tempurung kelapa biasa diolah menjadi bermacam macam kerajinan baik fungsional maupun dekoratif seperti tempat buah, *tamas*, *sok nasi* dan lain-lain. Hal ini digemari selain karena keindahannya tapi juga sekaligus dengan menggunakan kerajinan tempurung kelapa ini adalah suatu bentuk sikap ramah lingkungan. Pemanfaatan tempurung kelapa menjadi berbagai kerajinan adalah sangat membantu menjaga lingkungan karena mampu mengurangi limbah sisa produksi olahan kelapa, dimana khususnya di kabupaten Karangasem sendiri banyak sekali ditumbuhi pohon kelapa. Sehingga secara teori seharusnya produk kerajinan ini memiliki tingkat kontinuitas yang tinggi dan masih dapat berkembang lebih besar lagi.

Untuk memperoleh bahan baku juga tidak perlu untuk merusak lingkungan karena di Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem sangat banyak di temui pohon kelapa, sehingga jika diamati seharusnya untuk mendapatkan bahan baku batok kelapa, tidak mengalami kesulitan. Walaupun pada prakteknya terkadang memang mengalami kendala namun masih bisa didatangkan dari Kabupaten Klungkung. Karena jumlahnya yang melimpah, dan belum diolah secara optimal, maka sebelumnya batok kelapa ini sering dipakai hanya untuk kayu bakar.

Salah satu perajin yang ada di Kecamatan Abang adalah IKM Eka Lestari. Dengan kreatifitasnya maka batok kelapa yang sebelumnya tidak berguna, dapat diolah menjadi berbagai barang kerajinan batok kelapa. Di daerah luar Bali memang banyak hasil olahan batok kelapa, namun hasil kerajinan batok kelapa masyarakat Desa Waliang tetap mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak ditemui di daerah lain. Batok kelapa di daerah ini diolah dengan cara dianyam,

dimana sebelumnya batok kelapa tersebut telah dibentuk bulat-bulat seperti uang kepeng Bali kuno. Selanjutnya setelah anyaman berbentuk baru dilakukan proses finishing dengan pernis untuk mengkilapkan sekaligus meningkatkan daya tahan produk.

## SIMPULAN

Ekonomi kreatif warga belajar telah berkembang dengan baik karena dikerjakan dengan baik, sentuhan perguruan tinggi, dan didukung oleh potensi eksisting yang ada di desa. Karena telah didukung oleh potensi yang ada di desa, sehingga sangat mungkin dikembangkan dengan pendekatan *one village one product (OVOP)*. Pada awalnya inovasi dan pengembangan desain cenderung monoton, namun setelah diadakan pelatihan dan adanya sentuhan pelatih, akhirnya inovasi desain mampu dilakukan. Pengembangan desain yang inovatif mampu menambah nilai jual produk kerajinan para pengerajin. Selain inovasi desain, strategi pemasaran yang lebih luas telah mampu dilakukan oleh pengerajin dibantu oleh peneliti. Melalui diskusi kelompok terbatas, telah dihasilkan kesepakatan kerjasama antara pengerajin dengan pemerintah daerah, yang difasilitasi oleh Undiksha. Bahkan penguatan kelompok sudah ditata oleh pengerajin untuk menjajagi bantuan fasilitas dan pemasaran dari pemerintah daerah. Kerajinan yang dominan dihasilkan oleh para pengerajin adalah ingke, tempat lampu dari lidi lontar, bingkai foto, dari lidi rontal; sokasi dengan berbagai model dan jenis, patung dari akar pohon kelapa, patung dari batu padas, tempat laptop atau tas laptop, tempat sesajen dari batok kelapa. Beberapa produk yang dihasilkan pengerajin telah dipajang melalui pameran.

## DAFTAR PUSTAKA

Apri Nuryanto, Penny Rahmawaty, Sutopo, Paryanto, 2010 Peningkatan Produksi

Kelompok Pengerajin Kipas di Jipangan Melalui Konsep Proses Produksi Terpadu

Badan Pusat Statistik. 2010. *Bali Dalam Angka 2010*

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dirltjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdiknas. 2011. *Keaksaraan dasar dan Keaksaraan Usaha Mandiri*. Jakarta: Kemdiknas.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *"Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 : Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009 – 2025"*

Faisal, Nanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Heny Prananingrum, 2009, *Perkembangan Desain dan Proses Produksi Kerajinan Kayu di Desa Batokan Kasiman Bojonegoro*, Jurusan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Huberman, A.B dan Miles M.B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan). Jakarta: UI Press.

UNDP. 2008. *"Creative Economy Report 2008"*  
Pangestu, Mari Elka. 2008. *"Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025"*, disampaikan dalam *Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2015 yang diselenggarakan pada Pekan Produk Budaya Indonesia 2008, JCC, 4 -8 Juni 2008*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Pokok-Pokok Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025*

- disampaikan dalam Rakernas Kementerian KUKM tanggal 14 Mei 2011 di Jakarta.
- Suparwoko, 2010, Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Industri Pariwisata, Simposium Nasional 2010: Menu Purworejo Dinamis dan Kreatif.
- Sujana, Edy. 2012. Pengembangan Ekonomi Kreatif Warga Belajar dalam Mendukung Kepariwisata di Provinsi Bali. Singaraja: Undiksha (*Laporan Penelitian MP3EI*).
- Sujana, Edy. 2013. Pengembangan Ekonomi Kreatif Warga Belajar dalam Mendukung Kepariwisata di Provinsi Bali. Singaraja: Undiksha (*Laporan Penelitian MP3EI*).
- Wesnawa, Astra, dkk.2011. Pengembangan Potensi Pariwisata Berkelanjutan Bagi Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat pada Koridor Bali sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Nasional. Sngaraja: Undiksha (*Lapran Penelitian MP3EI*).

## **KEBERTAHANAN TRADISI MANAK SALAH PADA MASYARAKAT PADANG BULIA**

**I Nyoman Pursika, I Ketut Sudiatmaka**

Email: [nypursika@gmail.com](mailto:nypursika@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The background of this research is a tradition Manak Salah is not uncommon for parties faced conditions dilemma, on the one hand Manak Salah as a form of tradition that is alive and growing in Bali should be maintained by the local community as it relates to cultural transformation once the bond primordial which remain to be implemented due reflects adherence to tradition inherited ancestral ties will be full of magical religious charge. According to local belief this tradition persists as a form of public accountability Padang Bulia of scale and noetic. On the other hand, problems arise when reviewed that there is discriminated against on the implementation of the tradition Manak Wrong. In general, this study aims to develop modelkebijakan ham guarantee to the families who sanctioned tradition in the village Manak Salah Padang Bulia. Adapun objectives to be obtained from this study in 2016, is as follows: (1) To determine the viability Tradition Manak Salah community Padang Bulia. (2) To determine the forms of guaranteeing human rights tradition Manak Wrong. (3) To determine the implications of Manak Salah tradition for families and people in the village Padang Bulia.*

*The research objective in 2017, as a continuation of the previous research stage, adapaun such objectives, namely: (1) To determine the viability driving factors Manak Salah tradition that on the other hand some of the villages in the province of Bali already elimination. (2) To determine the forms of violation of human rights guarantees that could be recommended to the implementation of the tradition Manak Wrong. (3) To determine the impact it has on the families affected by the sanctions Manak Salah sociologically, and (4) To identify model policies guarantee of human rights that can be offered as efforts taken refuge for the families who sanctioned Manak Salah without negating the continuity of tradition applicable.*

*To achieve the above objectives, this study will use a research approach which integrated with research development of culture (culture research). This research is located in the village district Padang Bulia districts Sukasada this Buleleng. Penelitian akandilakukan in Buleleng, Bali Province. The choice of location is based on several rational, namely: This research is using qualitative approach.*

*The focus of his research include: 1. Implementation of human rights guarantees for the public service Padang Bulia. Sumber primary data in this study sampel. Sampel in this study were selected using purposive sampling with descriptive analysis.*

**Keywords:** *Manak Salah, guarantee of human rights policy models, Padang Bulia, tradition.*

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah tradisi Manak Salah tidak jarang berbagai pihak dihadapkan kondisi dilematis, di satu sisi Manak Salah sebagai sebuah bentuk tradisi yang hidup dan berkembang pada Bali harus tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat karena berhubungan dengan transformasi budaya sekaligus ikatan primordial yang harus tetap dilaksanakan karena mencerminkan kepatuhan terhadap ikatan tradisi pewarisan leluhur yang sarat akan muatan religius magis. Menurut kepercayaan masyarakat setempat tradisi ini tetap berlangsung sebagai wujud pertanggung jawaban masyarakat Padang Bulia secara skala dan niskala. Di sisi lain, permasalahan muncul ketika ditinjau bahwa ada perlakuan diskriminasi dari pelaksanaan tradisi Manak Salah. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model kebijakan penjaminan ham terhadap pihak keluarga yang terkena sanksi tradisi Manak Salah di desa Padang Bulia. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini pada tahun 2016, adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui keberlanjutan Tradisi Manak Salah pada masyarakat Padang Bulia. (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk penjaminan hak asasi manusia Tradisi Manak Salah. (3) Untuk mengetahui implikasi Tradisi Manak Salah bagi keluarga dan masyarakat di desa Padang Bulia.

Tujuan penelitian di tahun 2017, sebagai keberlanjutan dari tahapan penelitian sebelumnya, adapun tujuan yang ingin dicapai diantaranya, yaitu: (1) Untuk mengetahui faktor pendorong keberlanjutan tradisi Manak Salah yang di sisi lain beberapa desa di propinsi Bali sudah menghapuskannya. (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran jaminan HAM yang dapat direkomendasikan terhadap pelaksanaan tradisi Manak Salah. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi keluarga yang terkena sanksi Manak Salah secara sosiologis, dan (4) Untuk mengetahui model kebijakan penjaminan HAM yang dapat ditawarkan sebagai upaya-upaya yang ditempuh perlindungan bagi pihak keluarga yang terkena sanksi Manak Salah tanpa meniadakan keberlangsungan tradisi yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan di atas, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian pengembangan yang diintegrasikan dengan penelitian kebudayaan (culture research). Lokasi penelitian adalah di desa Padang Bulia kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu: Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya antara lain : 1. Implementasi Pelayanan jaminan HAM bagi masyarakat Padang Bulia. Sumber data primer dalam penelitian ini sampel. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian: (1) awig-awig adat pada tradisi manak salah harus diselaraskan dengan ketentuan konstitusi negara Republik Indonesia; (2) tradisi manak salah tidak sesuai dengan penjaminan HAM; (3) sanksi Kasepekang ini sangat tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai ajaran agama Hindu.

**Kata Kunci:** Manak Salah, model kebijakan penjaminan HAM, Padang Bulia, tradisi.

## A. PENDAHULUAN

### *Latar Belakang*

Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Dasar dari studi Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa dalam UUD 1945 ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang HAM relatif terbatas, tetapi hal ini tidak akan menghambat penegakan HAM, karena sudah diperlengkapi dengan undang-undang lain, seperti UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Hak Asasi Manusia, dan UU Pengadilan HAM. Sekalipun demikian, telah diusulkan juga untuk membuka kesempatan memasukkan pasal-pasal HAM ke dalam UUD 1945 melalui amandemen. Salah satu ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas pengaturannya

pada 28 B Ayat (2) bahwa hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa kelangsungan masa depan anak menjadi bagian dari penjaminan hak azasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Di tengah kondisi negara Indonesia yang majemuk beragam khasanah adat dan tradisi melingkupi tatanan kehidupan masyarakatnya yang mengikat seluruh komponen masyarakat dalam sebuah ikatan primodial yang kental dan membudaya sehingga pelaksanaannya secara turun-temurun sampai saat ini dijumpai keberadaannya. Salah satu wujud corak tradisi yang masih sampai saat ini diberlakukan di desa Padang Bulia yang merupakan bagian dari wilayah propinsi Bali adalah tradisi Manak Salah. Mengkaji tradisi Manak Salah tidak jarang berbagai pihak dihadapkan kondisi dilematis, di satu sisi tradisi Manak Salah sebagai sebuah bentuk kearifan lokal Bali harus tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat karena berhubungan dengan transformasi budaya sekaligus ikatan primodial yang harus tetap dilaksanakan karena mencerminkan kepatuhan terhadap ikatan tradisi pewarisan leluhur yang sarat akan muatan religius magis. Menurut kepercayaan masyarakat setempat tradisi ini tetap berlangsung sebagai wujud pertanggung jawaban masyarakat Padang Bulia secara *skala* dan *niskala*. Di sisi lain, permasalahan muncul ketika ditinjau bahwa ada perlakuan diskriminasi dari pelaksanaan tradisi *Manak Salah*. Di mana anak kembar *buncing* (laki-laki, dan perempuan) dinilai sebagai sebuah kelahiran yang salah sehingga apabila terdapat kelahiran *Manak Salah* di desa Padang Bulia desa dalam kondisi *cuntaka* dan perlu *banten* atau upacara pembersihan (*pangruwatan*). Demikian juga kepada pihak keluarga yang memiliki anak kembar *buncing* (*Manak Salah*) diasingkan ke kuburan (*setra*).

Masyarakat setempat menganggap bahwa kelahiran bayi kembar *buncing* merupakan

kutukan dari Dewa Brahma. Tempat kelahiran dan keluarga bersangkutan akan mengalami *cuntaka* (dalam keadaan kotor). Maka untuk menyucikan kembali tempat atau desa beserta keluarga yang dilanda *cuntaka*, maka masyarakat setempat harus mengadakan upacara penyucian, baik dari segi Desa ataupun keluarga, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sinilah dikenal istilah "Tradisi *Manak Salah*" yang masih dilaksanakan di Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dari turun temurun. Tradisi adat demikian ini tidak didasari oleh ketakutan memada-mada ratu dalam artian warisan sisa-sisa feodalisme yang sudah dihapus dengan perda no. 10 tahun 1951. Tradisi Adat seperti diatas, dilaksanakan berdasarkan "*pemuwus*" *Ida Bhatara di Pura Desa* pada tahun 1980 sehingga Desa Adat tidak akan melaksanakan melasti jika tidak ada yang lahir kembar *buncing*, walaupun itu dalam menyambut hari raya Nyepi atau piodalan di Pura.

Tradisi *Manak Salah* merupakan budaya yang telah lama di yakini dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Tradisi ini menyalahkan tentang adanya kelahiran bayi kembar *buncing*, yaitu kelahiran bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Kebudayaan Adat Kembar *Buncing* atau *Manak Salah* yang berlaku di desa Padang Bulia merupakan salah satu kearifan lokal khusus bagi desa tersebut, karena selain Desa Padang Bulia tidak ada desa lainnya yang menerapkan kebudayaan ini atau dengan kata lain dilarang mempertahankan budaya adat ini. baca selengkapnya. Sebelumnya budaya adat seperti ini diterapkan oleh seluruh desa yang ada di Provinsi Bali, namun karena adanya pemikiran mengenai HAM maka budaya adat ini dihapuskan. Tapi meniadakan suatu tradisi bukan merupakan sikap bijak dari generasi penerus terhadap peninggalan dari pendahulunya.

Berdasarkan studi tentang HAM dalam pelaksanaan tradisi tersebut peneliti telah

melakukan observasi ke lapangan dan mendapatkan permasalahan pada dasarnya masyarakat Padang Bulia ingin tetap mempertahankan tradisi Manak Salah tanpa mengabaikan penghargaan terhadap upaya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dari segi hak asasi yang sifatnya hakiki. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, melalui penelitian ini akan diarahkan pada fokus kajian terhadap model kebijakan penjaminan HAM terhadap pihak keluarga yang terkena sanksi tradisi *Manak Salah* di desa Padang Bulia

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yang telah dilaksanakan pada tahun pertama di tahun 2016, yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimanakah keberthanan *Tradisi Manak Salah* pada masyarakat Padang Bulia? (2) Bagaimanakah bentuk-bentuk penjaminan hak asasi manusia *Tradisi Manak Salah*? (3) Bagaimanakah implikasi *Tradisi Manak Salah* bagi keluarga dan masyarakat di desa Padang Bulia?

Penelitian pada tahun kedua di tahun 2017, sebagai penelitian yang sifatnya kontinyuitas peneliti bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis, (1) Apakah yang menjadi faktor pendorong keberthanan tradisi *Manak Salah* yang di sisi lain beberapa desa di propinsi Bali sudah menghapuskannya?, (2) Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran jaminan HAM yang dapat direkomendasikan terhadap pelaksanaan tradisi *Manak Salah*?, (3) Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan bagi keluarga yang terkena sanksi Manak Salah secara sosiologis?, dan (4) Model kebijakan penjaminan HAM seperti apa yang dapat ditawarkan sebagai upaya-upaya yang ditempuh perlindungan bagi pihak keluarga yang terkena sanksi *Manak Salah* tanpa meniadakan keberlangsungan tradisi yang berlaku?.

### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini pada tahun 2015, adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui keberthanan *Tradisi Manak Salah* pada masyarakat Padang Bulia. (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk penjaminan hak asasi manusia *Tradisi Manak Salah*. (3) Untuk mengetahui implikasi *Tradisi Manak Salah* bagi keluarga dan masyarakat di desa Padang Bulia.

Tujuan penelitian di tahun 2017, sebagai keberlanjutan dari tahapan penelitian sebelumnya, adapun tujuan yang ingin dicapai diantaranya, yaitu: (1) Untuk mengetahui faktor pendorong keberthanan tradisi *Manak Salah* yang di sisi lain beberapa desa di propinsi Bali sudah menghapuskannya. (2) Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran jaminan HAM yang dapat direkomendasikan terhadap pelaksanaan tradisi *Manak Salah*. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi keluarga yang terkena sanksi Manak Salah secara sosiologis, dan (4) Untuk mengetahui model kebijakan penjaminan HAM yang dapat ditawarkan sebagai upaya-upaya yang ditempuh perlindungan bagi pihak keluarga yang terkena sanksi *Manak Salah* tanpa meniadakan keberlangsungan tradisi yang berlaku.

### 3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Urgensi (keutamaan), yaitu terjadi pembalikan paradigma berpikir masyarakat Padangbuli dengan pelaksanaan tradisi *Manak Salah* yang semula cenderung mengabaikan HAM menjadi sarat mempertimbangkan muatan HAM dalam keberlakuannya bagi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh karena muatan HAM bagi setiap warga negara Indonesia menjadi sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah tradisi adat yang oleh masyarakat Padang Bulia masih tetap dijunjung tinggi, hanya saja esensi tradisi adat yang berlangsung harus menyesuaikan dengan konten penjaminan HAM setiap anggota

keluarga dan masyarakat untuk keberlangsungan kehidupannya dan penerimaan masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Penelitian dengan mengambil kajian model kebijakan penjaminan HAM terhadap pihak keluarga yang terkena sanksi tradisi *Manak Salah* di desa Padang Bulia, pada dasarnya adalah dengan penerapan model tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan serta mengambil langkah-langkah konstruktif agar dapat tercipta pelayanan di bidang jaminan perlindungan HAM yang lebih baik dan menjamin kepuasan warga masyarakat Padang Bulia. Penelitian ini diharapkan mampu menambah kemampuan analisis, memperkaya wawasan tentang pengembangan tradisi adat Bali dengan tetap menjaga dari segi kelestariannya, pengembangan nilai-nilai religius magis dengan mengakomodir penghormatan terhadap jaminan HAM bagi setiap warga negara Indonesia. Fokus manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tambahan wawasan tentang landasan ilmiah pengkajian HAM terhadap *awig-awig adat* desa Padang Bulia dalam menjalankan tradisi *Manak Salah* ditinjau dari perspektif perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat.

#### 4. Luaran Penelitian

Adapun yang menjadi target luaran dalam penelitian ini berupa luaran wajib diantaranya, yaitu: laporan hasil penelitian, artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal nasional ber-ISSN. Luaran tambahannya berupa prosiding ilmiah baik dalam skala nasional maupun internasional, dan buku ajar yang adapat dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk memahami kearifan lokal Bali dalam teori dan prakteknya.

## B. METODE PENELITIAN

### Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dalam bangunan rekayasa kebijakan publik

(*development research in public policy paradigm*) (Borg & Gall, 1989), sehingga penekanannya bukan pada pengukuran, melainkan pada upaya pemetaan, sinkritasi, dan rekayasa secara aktual, faktual, dan holistik, emik, dan etik tentang bentuk dan makna perilaku yang ditampilkan dari penjatuhan sanksi *Manak Salah* dilihat dari penjaminan HAM bagi.

Upaya penggalian, analisis, dan pemetaan fokus masalah penelitian dilakukan dengan mengacu pada model analisis lintas-situs sebagaimana yang lazim dilakukan dalam penelitian-penelitian sosial dan budaya (Carspecken, 1998). Model analisis lintas-situs ini akan memudahkan peneliti dalam mengungkap dan memetakan masalah, kaitan masalah satu dengan masalah lainnya, dan kaitan masalah penelitian dengan latar alamiah penelitian sebagai factor eksternal dalam analisis data penelitian. Berdasarkan pola analisis ini, akan dapat diformulasikan dan sekaligus diverifikasi bangunan informasi, metode, dan model baru dalam menghampiri masalah-masalah sejenis dengan tingkat kebenaran ilmiah yang lebih tinggi.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan lokasi ini didasari oleh beberapa rasional, yaitu: Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya antara lain : 1. Implementasi Pelayanan jaminan HAM bagi masyarakat Padang Bulia.

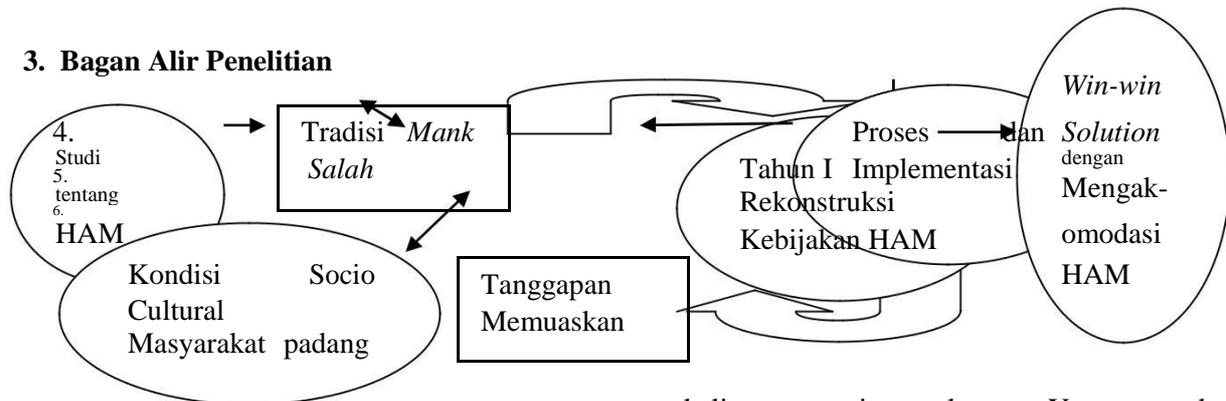
Sumber data primer dalam penelitian ini sampel. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan dan kemandapan peneliti dalam pengumpulan data. Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan sampel (mencapai titik jenuh), maka peneliti tidak mencari sampel baru dan proses pengumpulan sampel dianggap selesai. Adapun yang menjadi sampel penelitian meliputi : 1) *Kelian* dan *prajuru* desa adat Padang Bulia, dan masyarakat Padang Bulia.

### Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Keseluruhan data ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan untuk mengurai masing-

masing permasalahan penelitian. Oleh karenanya, analisa peneliti lakukan terhadap inventarisasi bahan hukum dan penerapannya dalam kaitannya dengan pelaksanaan tradisi *Manak Salah* di Padang Bulia.

### 3. Bagan Alir Penelitian



## C. PEMBAHASAN

### 1. Kebertahanan *Tradisi Manak Salah* pada Masyarakat Padang Bulia

Contoh tradisi kembar *buncing* “*manak salah*” di Desa Adat Padang Bulia, **Suasana** di Desa Adat Padang Bulia, Sukasada, Buleleng, Rabu (16 Juni 2004), terlihat amat sibuk. Puluhan warga dengan pakaian adat lengkap tampak membersihkan sampah dan rumput liar di sekitar pura dan jalan-jalan desa, sementara sebagian warga lain sibuk menggelar upacara penyucian (*mecaru*) di sejumlah tempat yang sakral. Kesibukan warga ini ternyata berkaitan dengan peristiwa kelahiran bayi kembar *buncing* yang diwarnai dengan *dresta* pengungsian atau *tapa berata* di suatu tempat di sudut desa.

Seharusnya bayi kembar buah kasih pasangan Nengah Tarsa (34) dan Ketut Susun (39) itu dipulangkan dari lokasi *tapa berata* tepat pada Buda Cemeng Ukir kemarin. Setelah diupacarai dalam upacara penyucian, bayi itu lantas diantar ke rumah tinggalnya bersama warga adat. Lalu pada hari *Tilem Sasih Sada*, Kamis (17/6) hari ini, semestinya bayi itu bersama warga adat menggelar upacara melasti ke *segara*.

Namun, di desa yang sejuk itu, Rabu kemarin, tak ada upacara penyucian bayi

sekaligus prosesi pemulangan. Yang tampak hanya ratusan warga yang sibuk membakar *kubu* bekas tempat pengungsian sang bayi, lalu upacara penyucian di bekas *kubu* itu dan sejumlah pura serta *pelinggih* di desa tersebut.

*Bendesa* Adat Padang Bulia Gusti Nyoman Bisana memaparkan bayi kembar *buncing* itu ternyata sudah meninggalkan lokasi *tapa berata* pada 24 April 2004, jauh sebelum batas akhir pemulangan yang ditentukan menurut *dresta* desa adat. Diceritakan, pada 24 April itu si bayi kembar sakit. Atas seizin desa adat, bayi itu lantas dibawa ke rumah sakit di Singaraja, dengan perjanjian setelah sembuh bayi itu akan kembali menempati lokasi *tapa berata* di sebuah sudut desa di Padang Bulia. Namun, menurut Bisana, ketika pulang dari rumah sakit pada 10 Mei 2004 bayi itu ternyata dibawa pulang ke rumah oleh orangtuanya, bukan ke tempat pengungsian.

Bisana mencoba melakukan pendekatan agar Tarsa mau kembali mengikuti *dresta* adat yakni kembali membawa bayinya ke lokasi *tapa berata*. Ternyata pendekatannya gagal, Tarsa malah mengirimkan surat penolakan yang dilampiri salinan Perda No.10 tahun 1951 tentang penghapusan *manak salah*. Atas perbuatannya itu, desa adat menggelar *paruman* dan memutuskan memberi denda

kepada Tarsa sesuai awig-awig. Denda yang dikenakan berjumlah Rp 2.100.000 karena dianggap melanggar *papetetan wong desa* dan dianggap berbohong. Selain itu, desa adat juga mengenakan uang *pecamil* (semacam ganti rugi) Rp 5.950.000.

Denda itu harus dibayarkan pada *sangkepan* desa adat pertama yang akan digelar pada Buda Umanis Kulantir, 23 Juni mendatang. Jika tak mau membayar, denda akan dilipatgandakan menjadi dua dan harus dibayar pada *sangkepan* adat berikutnya. "Jika terus-terusan tidak bayar, maka akan dikeluarkan dari anggota adat," kata Bisana.

Seperti diberitakan sebelumnya bayi kembar *buncing* yang lahir Jumat, 9 April 2004 sekitar pukul 7.40 wita dan pukul 8.10 wita itu menjalani masa pengungsian (*tapa berata*) di sebuah tanah kosong di sudut desa. Untuk tempat tinggal, warga adat membuatkan bayi itu sebuah bangunan sederhana dan setiap malam dijaga warga secara bergiliran. Pada 21 April 2004 bayi itu sempat mau dipulangkan secara sukarela, namun sebelum keputusan adat diambil secara resmi, tiba-tiba terjadi peristiwa gaib di mana sekitar 11 warga Desa Adat Padang Bulia *kerauhan* sehingga pemulangan bayi itu dibatalkan.

Membicarakan tradisi adat di Bali tak akan pernah ada habisnya. Meski lembaga adat berkali-kali ganti nama, tradisi adat tetap saja ada dan menimbulkan konflik, baik konflik perorangan, konflik warga, maupun konflik lintas desa adat. Majelis Pembina Lembaga Adat boleh berganti rupa menjadi Majelis Utama Desa Pekraman, tetapi awig-awig adat tak semuanya bisa dikontrol. Pernah ada imbauan agar awig-awig adat disesuaikan dengan hukum formal. Maksudnya, bagaimana agar aturan hukum tradisional ini tidak melanggar aturan hukum yang lebih tinggi yang dibuat oleh negara. Desa adat tidak bisa menjadi negara dalam negara. Apalagi kalau awig-awig itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar. Sulitnya adalah masalah adat di Bali selalu dikaitkan dengan agama Hindu, dan orang bahkan

menyebutkan antara adat dan agama Hindu tak bisa dipisahkan. Yang menjadi pertanyaan, ajaran Hindu yang mana? Kalau kita bicara Hindu tentu rujukannya adalah kitab suci Weda. Para leluhur kita di masa lalu sudah mengajarkan Weda melalui *lontar-lontar*. Cara mengajarkan bisa berupa penafsiran agar lebih jelas diterima masyarakat sesuai tingkat pendidikan, bisa berupa inti sari melalui cerita atau lagu, dan banyak cara lagi. Semuanya ditulis dalam lontar karena memang itu sarana yang ada. Namun, banyak *lontar* yang tidak merujuk ke ajaran Weda dan memang bukan dimaksudkan sebagai pengajaran agama. Jadi semacam karya fiksi atau catatan situasi pada zamannya. Setelah berabad-abad kemudian, semua *lontar* itu dianggap keramat dan semuanya dianggap ajaran agama. Padahal belum tentu dan kita harus arif menyikapi masalah ini. Kalau kita perhatikan tradisi-tradisi adat, banyak hal yang di luar logika dan bahkan tidak dapat diterangkan bagaimana hubungannya dengan ajaran agama. Tradisi aktual di Bali, misalnya, masih ada yang memberlakukan hukum adat "*manak salah*". Logika mana yang membuat kita setuju, keluarga yang melahirkan "*manak salah*" itu harus dihukum dan dibuatkan rumah pengasingan dekat kuburan. Ini bukan saja melanggar hukum formal (mengenakan tahanan rumah tanpa ada keputusan pengadilan) juga melanggar HAM. Bukankah pada setiap kelahiran kembar, sang bayi harus dirawat lebih serius dengan penuh perhatian karena berat badannya tidak normal sebagaimana bayi yang tidak kembar.

Kebetulan untuk "*manak salah*" ada banyak *lontar* dan sebagian umat setia mengikuti *lontar* itu karena selalu mengira *lontar* adalah sesuatu yang harus ditaati karena dikaitkan dengan keyakinan agama. Padahal tidak ada satupun sloka ajaran agama yang menyebutkan hal itu. Tradisi ini tentu akan menimbulkan konflik, bukan saja konflik antara warga (yang pro dan kontra terhadap hukuman itu) tetapi bisa melibatkan konflik lintas warga adat, karena pasti ada "orang luar"

yang mempermasalahkan hal ini atas nama kemanusiaan. Ada banyak hal yang “tidak masuk akal” dalam urusan adat.

Jadi, adat ini justru membelenggu warganya sendiri. Dan ketika ada yang mempermasalahkan, langsung menimbulkan konflik antar pribadi. Karena ada yang bersikukuh mempertahankan adat karena dikaitkan dengan keyakinan. Bicara keyakinan, semuanya menyebut beragama Hindu. Kitab Hindu yang mana dijadikan rujukan? Tidak ada, paling larinya pada istilah “*mule keto*” dan adat yang harus dilestarikan. Contoh seperti ini banyak sekali. Kita terlena dengan kebesaran adat tanpa menangkap semangat yang ada dalam lembaga adat itu. Sejarah desa adat di Bali adalah sejarah yang sudah ada berabad-abad yang lalu, ketika Mpu Kuturan memperkenalkan ikatan warga *pekraman* yang dicirikan dengan adanya tiga pura yang disebut *Tri Kahyangan*. Dari situ muncul istilah agama menjadi jiwa dari adat. Lupa bahwa zaman Mpu Kuturan itu ikatan desa *pekraman* adalah mutlak, karena jumlah desa itu sedikit dan jarak satu desa dengan desa lainnya berjauhan. Mata pencarian penduduk dalam satu desa pun sama. Tetapi ketika desa itu semakin banyak, penduduk berjubel, mata pencarian berbeda, dan pemerintah memperkenalkan desa dinas, keberadaan desa *pekraman* tak pernah dipikirkan lebih serius, terutama apakah pengikatnya itu, yakni awig-awig adat, masih relevan atau tidak dengan situasi zaman. Ini biangnya konflik. Tapi kita bersyukur, kian banyak awig-awig adat yang sudah diperbarui yang tidak mengekang masyarakat yang menjadi anggota adat itu. ( 1 Maret 2004; 34) Beberapa komponen yang signifikan dan relevan dengan hal tersebut adalah *desa pakraman* (desa adat), pemerintah, dan pemerhati HAM. Dalam hal ini pihak *desa pakraman* hendaknya mengkaji secara cerdas *awig-awig desa* (peraturan desa) yang disusun sehingga tidak berbenturan dengan hukum positif yang berlaku. *Awig-awig* tentang *Manak Salah*, patut dikaji ulang karena berpotensi melanggar HAM. *Bendesa*

*pakraman* sebagai pemimpin *desa pakraman* mempunyai kewajiban untuk menyelaraskan isi *awig-awig* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Bendesa pakraman* harus menjadi inisiator sekaligus fasilitator dalam mengelola *krama desa pakraman* (masyarakat desa) dalam memahami konsep *Manak Salah* dikaitkan dengan HAM. Dalam hal ini, *bendesa pakraman* didukung oleh *prajuru desa* (pengurus di desa adat) lainnya, wajib bahu membahu menyamakan langkah dan menyatukan persepsi terhadap konsep *Manak Salah*. Bahwa, penghakiman kesalahan terhadap seseorang yang melahirkan anak kembar laki dan perempuan adalah tidak benar. Untuk itu *awig-awig* yang akan diterapkan di wilayah *desa pakraman* mestinya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal lain yang penting diperhatikan yaitu *awig-awig* tersebut tidak melanggar HAM.

Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pengayom kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, hendaknya mencermati kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Pencermatan dilakukan dalam kerangka mensinergikan dan menyelaraskan kearifan lokal dimaksud sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks *Manak Salah*, maka pemerintah wajib melakukan pemetaan terhadap daerah yang diduga menerapkan konsep tersebut. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi tentang berbagai perundang-undangan yang berlaku, baik yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara maupun HAM. Untuk itu, pemerintah hendaknya melakukan pendekatan secara persuasif sehingga tidak ada ketersinggungan di kalangan masyarakat. Hal ini karena masyarakat menerima konsep tersebut secara turun temurun, sehingga merupakan kepercayaan yang sangat kuat. Oleh karena itu upaya penyadaran terhadap masyarakat hendaknya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga setiap perubahan dapat dipahami dengan baik.